



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kebumen atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan laporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
2. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
3. Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran;
 - b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan;
 - g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

sisanya lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
19. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
20. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

22. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati (Perbup) Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 105);
24. Perbup Kebumen Nomor 106 tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 89);
25. Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 95);
26. Perbup Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 2);
27. Perbup Kebumen Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 8); Perbup Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 14);
28. Perbup Kebumen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 27);
29. Perbup Kebumen Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 32);
30. Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 53) :
31. Perbup Kebumen Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 55) ;
32. Perbup Kebumen Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 62) ; dan

33. Perbup Kebumen Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 69).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen
- 2.2 Ekonomi Makro
- 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD
- 2.4 Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2023
- 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4 Laporan Operasional

5.5 Laporan Arus Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2024

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

1. Letak Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7o27' – 7o50' lintang selatan dan 109o22' – 109o50' bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
Sebelah timur : Kabupaten Purworejo
Sebelah selatan : Samudera Indonesia
Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Kebumen



*) Sumber : Kebumen dalam Angka

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

2. Demografi

a. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 adalah 1.434.023 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 727.418 jiwa dan perempuan sebanyak 706.605 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

473.245 KK. Sementara itu kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 1.100 jiwa/km².

b. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebanyak 1.090.885 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 919.860 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sekitar 74,54% dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 71,57%.

Sementara itu nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 5,11% mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 5,92%, dimana TPT merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja.

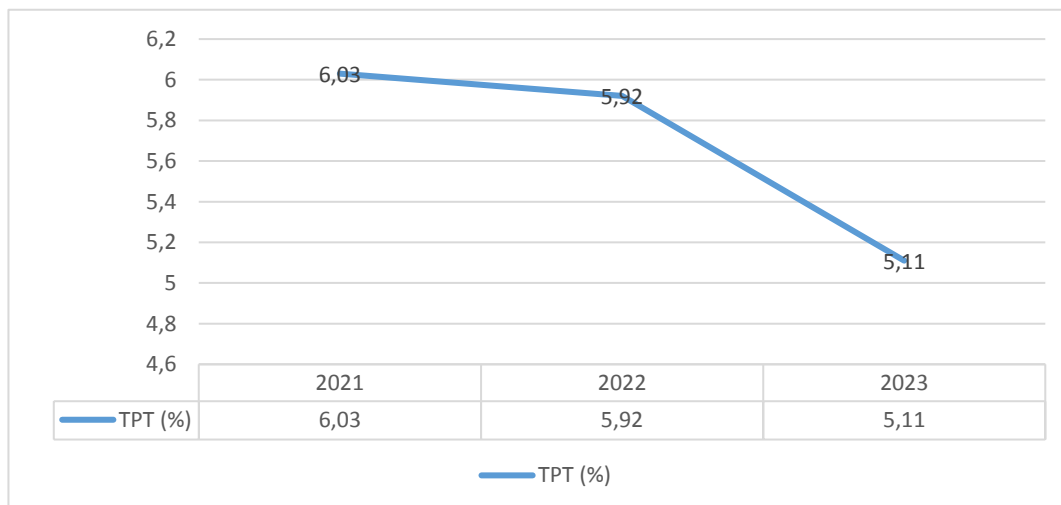
Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu TPT. Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Adapun perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2024

Grafik 2. 1 TPT Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2023

Perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen selama tahun 2021 – 2023 menunjukkan tren penurunan dari 6,03% pada tahun 2021 menjadi 5,92% pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat enam orang yang menganggur.

Indikator kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat juga dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kebumen yang meningkat dari Rp2.035.890,00 pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.121.947,00 pada tahun 2023 atau naik sebesar Rp86.057,00 (4,06%). Capaian urusan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2023

No	Indikator	2021	2022	2023	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,03	5,92	5,11	
2	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	1.895.000	2.035.890	2.121.947	

Sumber : BPS , Dinas Tenaga Kerja Kab. Kebumen, Data Diolah, 2023

c. Organisasi

Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bupati/wakil bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Dalam melaksanakan pemerintahan, bupati/wakil bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) DPRD

Anggota DPRD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. DPRD Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan Wakil Ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Munawar Kholil.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

2) Bupati/Wakil Bupati
Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-2026 dipimpin oleh H. Arif Sugiyanto, SH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M.

3) Perangkat Daerah (PD)
Sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Perda tersebut mengatur tentang perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A. Hal yang mendasari perubahan nomenklatur perangkat daerah tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan yang terbagi dalam 50 SKPD yang dirinci pada **Lampiran 1**.

d. Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera : bermakna suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata;

Mandiri : bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;

Berakhlak : berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etikadan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;

Bersama Rakyat : artinya masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.2. Ekonomi Makro

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Secara umum selama periode Tahun 2021-2023 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 5,92% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,03%. Kemudian pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh sebesar 5,66%.

Pada tahun 2023, berdasarkan angka proyeksi, terdapat 11 jenis lapangan usaha mengalami penurunan. Penurunan tersebut terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0.31, Industri Pengolahan sebesar 0.16, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 0.84, Konstruksi 4.92, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

2.09, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4.02, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -5.53, *real estate* sebesar 0.5, Jasa Perusahaan sebesar 1.7, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0.5, dan Jasa Lainnya sebesar 2.47 dan terdapat 6 jenis lapangan usaha mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.12, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0.7, Transportasi dan Pergudangan sebesar 1.18, Informasi dan Komunikasi sebesar 0.15, dan Jasa Pendidikan sebesar 1.19, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.78.

Angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

2. Struktur Ekonomi

Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama enam tahun terakhir (2016-2021) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, di antaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di tahun 2023, di mana peranan berdasarkan harga perkiraan 2023 struktur PDRB Kabupaten Kebumen menunjukkan distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB di tahun 2023 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 22,24%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,03%; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,67%. Sementara itu distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04%.

3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

4. Kualitas Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalan potensi Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan daerah. Kualitas SDM diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

berhasil jika penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 1,83% dari tahun 2021 sebesar 70,05% dan pada tahun 2023 sebesar 71,88% atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,915%. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama lima tahun terakhir semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi. Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat lima tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 73,39 dan 74,39.

5. Angka Kemiskinan

Dalam kurun waktu selama sepuluh tahun terakhir, tren kemiskinan pada Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dengan nilai rata-rata penurunan sebesar 0,02%.

Kejadian luar biasa terjadi pada saat pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021.

Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.2. Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2023

Profil Kemiskinan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	211.090	212.900	196.160	195.450
Persentase Penduduk Miskin	17,59%	17,83%	16,41%	16,34%
Garis Kemiskinan (Rp)	380.557	390.599	416.004	451.678
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,62	3,24	3,41	2,89
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,55	0,88	1,02	0,75

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2023

Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2020-2023 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2023 terjadi kenaikan yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

semakin besar, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin jauh atau ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar. P1 pada tahun 2021 sebesar 3,24% dan kembali meningkat menjadi 3,41% pada tahun 2022, sedangkan P2 pada tahun 2021 sebesar 0,88% dan mengalami kenaikan menjadi 1,02% pada tahun 2022. Secara rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar 3,04 dan 0,8 untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Tabel 2.3. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023

Uraian	% Penduduk Miskin			% Penurunan 2021-2023
	2021	2022	2023	
Kebumen	17,83	16,41	16,34	0,07

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2023

6. Inflasi

Laju inflasi adalah salah satu Indikator makro ekonomi yang penting. Tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari laju inflasi. Pengendalian inflasi dilakukan agar tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan untuk pengendalian inflasi adalah dengan melaksanakan Pemantauan dan pengendalian jalur-jalur distribusi serta penyediaan informasi harga bahan pokok dan pengendalian harga, menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat.

Pada akhir tahun 2017 tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen mencapai inflasi sebesar 3,01%. Angka inflasi tersebut naik pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,25 %. Setahun kemudian pada tahun 2019, tingkat inflasi menurun menjadi 2,18%.

Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2023, mengacu pada tingkat inflasi di Purwokerto maka tingkat inflasi di Kebumen sebesar 2,61% sama dengan angka nasional. Angka inflasi ini masih dibawah Inflasi Provinsi Jawa Tengah, sebesar 2,89%.

7. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Ketimpangan pendapatan Kabupaten Kbeumen menurut ukuran Bank Dunia pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 19,86% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah (kategori baik). Hal ini



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

merujuk pada definisi oleh Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan capaian 19,86 dari target 20,50-21,00.

Berdasarkan data BPS Tahun 2023 ukuran ketimpangan Koefisien Gini adalah sebesar 0,333. Besaran ukuran ketimpangan Koefisien Gini pada tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 0,354 dan 2021 sebesar 0,350.

Tabel 2.4. Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Gini Ratio		
	Kab. Kebumen	Prov. Jateng	Nasional
2019	*)	0.358	0.38
2020	*)	0.362	0.381
2021	0.333	0.368	0.381
2022	0.354	0.366	0.381
2023	0.35	0.369	0.388

Sumber: Subjek Kemiskinan dan Ketimpangan, BPS, 2023

2.3. Arah dan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 merupakan tahun kedua dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada porsi penganggaran, dimana struktur APBD TA 2023 mengatur jenis pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sehingga proses pengelolaan keuangan dari penganggaran struktur APBD TA 2023 selaras dengan struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Secara umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dimana RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan *Open-gov* dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Kebijakan umum APBD TA 2023 mempedomani RKPD Tahun 2023 didalamnya tercantum prioritas pembangunan pada Tahun 2023. Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan dan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD TA 2023, arah kebijakan pembangunan tahun ketiga yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Bupati dan diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah,. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan prioritas:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui Upaya
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan
 - c. Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 - b. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
 - c. Peningkatan pengelolaan persampahan; IV-7
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi; dan
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - c. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

Pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan lesunya aktivitas perekonomian juga berdampak bagi perolehan pendapatan daerah baik dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi serta PAD sendiri. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen adalah alat kebijakan fiskal daerah yaitu selain untuk memfasilitasi juga sebagai stimulan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan sinkronisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Kebijakan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

berlaku. Kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam rangka peningkatan kinerjanya akan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sistematika Pendapatan Daerah tahun 2023 telah disesuaikan dengan sistematika pendapatan daerah pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) dan Lain-lain PAD yang Sah (LLPADYS). Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja Pendapatan Daerah pada tahun 2023 ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Optimalisasi PAD melalui:

- 1) Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- 2) Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
- 3) Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
- 4) Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
- 6) Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
- 7) Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- 9) Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
- 10) Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
- 11) Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada PAD;
- 12) Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

- 13) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- b. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah; serta
- c. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja daerah tahun 2023 secara umum dialokasikan dalam rangka:

Pemenuhan alokasi persentase belanja *mandatory* yaitu untuk pendidikan minimal sebesar 20% dan kesehatan minimal sebesar 10% sebagaimana amanat perundangundangan. Sedangkan alokasi belanja *mandatory* untuk infrastruktur, peningkatan kapasitas ASN dan pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi pendanaan yang ada;

- a. Pemenuhan alokasi belanja untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
- b. Pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- c. Upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19* melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas unggulan pertanian, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan promosi dan pemasaran produk UMKM, pengembangan pariwisata serta peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serkaligus untuk mengurangi angka kemiskinan.

Rincian alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* disajikan pada **Lampiran 3**.

Struktur belanja daerah dalam rancangan APBD TA 2023 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

a. Belanja Operasi

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, 3) Belanja Bunga, 4) Belanja Subsidi, 5) Belanja hibah, dan 6) Bantuan Sosial. Arah kebijakan Belanja Operasi pada tahun 2023, antara lain:

1) Belanja Pegawai

- (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- (b) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- (c) Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai formasi pegawai tahun 2023;
- (d) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2023 dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- (f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN;
- (g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (h) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - (j) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik; dan
 - (k) Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, dengan struktur honorarium berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan mempedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Perbup Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemkab Kebumen TA 2023.
 - (b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetakan dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - (c) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (d) Penganggaran biaya sertifikasi atas Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
- (g) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan) milik pemda sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing Perda;
- (h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*;
- (j) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
- (k) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemda; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

3) Belanja Subsidi

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak *Covid-19* dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada BUMD sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD TA 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani Perbup Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, yang telah disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengadaan Aset Tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi Aset Tetap. Batas minimal kapitalisasi Aset Tetap diatur dalam Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Nilai Aset Tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Pemda harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemda kepada pemda lainnya dan/atau dari pemda kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Pemkab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA sebelumnya dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penganggaran belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan dalam APBD TA 2023. Besaran penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman kepada PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

Bantuan Keuangan Partai Politik yang diatur dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2.4. Perubahan Kebijakan Umum APBD

Pada pelaksanaan APBD TA 2023 s.d. Semester I Tahun 2023, Pemkab Kebumen telah melakukan perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 sebanyak lima kali, perubahan pertama, kedua dan ketiga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, perubahan keempat mengatur tentang Perbup Nomer 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemkab Kebumen Tahun 2023. Perubahan kelima menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2023. Adapun data pergeseran anggaran s.d. Semester 1 tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 4**.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2023 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi;
2. Berdasar LKPD TA 2022 (*Audited*) yang dituangkan pada Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS sebesar Rp4.722.503.214,00, Belanja BLUD RSUD dr. Soedirman sebesar Rp52.325.530.201,00, BLUD RSUD Prembun sebesar Rp30.578.253.474,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp4.592.561.339,98 serta SiLPA di RKUD sebesar Rp162.258.784.241,00;
3. Adanya penyesuaian dengan Perbup Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemkab Kebumen;
4. Penyesuaian Belanja Daerah berdasarkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
5. Penyesuaian Belanja Daerah berdasarkan PMK Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada TA 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada TA 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

6. Perubahan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
7. Perubahan Belanja daerah diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemkab Kebumen. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan.

APBD Perubahan TA 2023 ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023. Dalam pelaksanaannya APBD Perubahan mengalami pergeseran sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 5**.

2.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. PAD sebesar Rp432.821.047.000,00 atau 15,15% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp133.030.000.000,00 atau 4,66% dari total Pendapatan;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 36.368.440.000,00 atau 1,27% dari total Pendapatan;
 - 3) Pendapatan HPKDYYD sebesar Rp19.123.337.000 atau 0,67% dari total Pendapatan;
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp244.299.270.000,00 atau 8,55% dari total Pendapatan.
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.421.983.808.000,00 atau 84,77% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.233.962.752.000,00 atau 78,19% dari total Pendapatan;
 - 2) Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp188.021.056.000,00 atau 6,58% dari total Pendapatan.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2.176.583.000,00 atau 0,08% dari total Pendapatan.

2. Belanja

Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp2.124.708.998.900,00 atau 68,67% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp1.226.237.772.050,00 atau 39,63% dari total Belanja;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp753.610.646.850,00 atau 24,36% dari total Belanja;
 - 3) Belanja Subsidi sebesar Rp730.000.000,00 atau 0,02% dari total Belanja;
 - 4) Belanja Hibah sebesar Rp132.241.048.000,00 atau 4,27% dari total Belanja;
 - 5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11.889.532.000,00 atau 0,38% dari total Belanja.
- b. Belanja Modal sebesar Rp290.509.850.100,00 atau 9,39% dari total Belanja, yang terdiri dari:
- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.594.820.000,00 atau 0,05% dari total Belanja;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.599.220.763,00 atau 2,25% dari total Belanja;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp78.195.858.337,00 atau 2,53% dari total Belanja;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp129.636.032.000,00 atau 4,19% dari total Belanja;
 - 5) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp11.483.919.000,00 atau 0,37% dari total Belanja;
- c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.235.728.000,00 atau 0,04% dari total Belanja;
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp677.473.383.000,00 atau 21,9% dari total Belanja, yang terdiri dari:
- 1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp13.792.758.000,00 atau 0,45% dari total Belanja;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp663.680.625.000,00 atau 21,45% dari total Belanja.

3. Pembiayaan

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada APBD TA 2023, Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp236.946.522.000,00 yang berarti SiLPA minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp283.277.522.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp46.331.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemkab Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.805.528.213.000,00 sedangkan pada APBD-Perubahan targetnya naik menjadi Rp2.856.981.438.000,00. Realisasi Pendapatan pada TA 2023 sebesar Rp2.901.021.509.721,00 atau 101,54%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 yang sebesar Rp2.847.196.017.404,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.823.993.060,00 atau 1,88%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/3
1	PAD	432.821.047.000,00	463.650.961.705,00	30.829.914.705,00	107,12
	Pajak Daerah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	4.192.705.502,00	103,15
	Retribusi Daerah	36.368.440.000,00	28.881.046.419,00	(7.487.393.581,00)	79,41
	HPKD YD	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	3.688,00	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	244.299.270.000,00	278.423.869.096,00	34.124.599.096,00	113,97
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.421.983.808.000,00	2.435.850.438.454,00	13.866.630.454,00	100,57
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.765.872.796.000,00	1.783.201.602.063,00	17.328.806.063,00	100,98
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	468.089.956.000,00	467.765.621.200,00	(324.334.800,00)	99,93
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	(3.137.840.809,00)	98,33
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84
	Pendapatan Hibah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84
	JUMLAH PENDAPATAN	2.856.981.438.000,00	2.901.021.509.721,00	44.040.071.721,00	101,54

Dari rincian Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat bahwa target PAD TA 2023 sebesar Rp432.821.047.000,00 dan terealisasi sebesar Rp463.668.071.215,00 atau 107,12%. Realisasi PAD tersebut terdiri dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp137.222.705.502,00 atau tercapai 103,15% dari target anggaran sebesar Rp133.030.000.000,00, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp28.881.046.419,00 atau tercapai 79,41% dari target anggaran sebesar Rp36.368.440.000,00, realisasi HPKD YD sebesar Rp19.123.340.688,00 atau tercapai 100,00% dari target anggaran sebesar Rp19.123.337.000,00 dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rp278.423.869.096,00 atau tercapai 113,97% dari target anggaran sebesar Rp244.299.270.000,00.

Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp2.421.983.808.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.435.831.829.687,00 atau 100,57%. Realisasi Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.250.948.614.496,00 atau 100,76% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp184.883.215.191,00 atau 98,33%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.520.109.562,00 dari target anggaran sebesar Rp2.176.583.000,00 atau sebesar 69,84%.

Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis Pendapatan pada tahun 2023, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemkab Kebumen dengan kontribusi sebesar 83,96% dari total realisasi Pendapatan. Sedangkan PAD menyokong Pendapatan Daerah sebesar 15,98% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,05%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2023 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp2.805.528.213.000,00 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp3.093.927.960.000,00 pada APBD-Perubahan. Selanjutnya pada APBD pergeseran setelah perubahan ketiga, Belanja Daerah TA 2023 menjadi sebesar Rp3.116.444.020.000,00. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah pada TA 2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2023 dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/3
1	BELANJA OPERASI	2.124.708.998.900,00	2.020.914.516.871,00	(103.794.482.029,00)	95,11
	Belanja Pegawai	1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	(72.462.327.185,00)	94,09
	Belanja Barang dan Jasa	753.610.646.850,00	726.725.182.478,00	(26.885.464.372,00)	96,43
	Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56
	Belanja Hibah	132.241.048.000,00	128.698.064.603,00	(3.542.983.397,00)	97,32
	Belanja Bantuan Sosial	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	(849.363.477,00)	92,86
2	BELANJA MODAL	290.509.850.100,00	278.842.913.538,00	(11.666.936.562,00)	95,98
	Belanja Modal Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.599.220.763,00	65.799.396.633,00	(3.799.824.130,00)	94,54
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	(2.930.649.436,00)	96,25
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	(4.714.471.268,00)	96,36
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	(27.722.968,00)	99,76
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17
	Belanja Tidak Terduga	1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/3
4	BELANJA TRANSFER	677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	(498.839.381,00)	99,93
	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	(49.591.119,00)	99,64
	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93
	JUMLAH BELANJA	3.093.927.960.000,00	2.977.141.914.829,00	(116.786.045.171,00)	96,23

Belanja Daerah TA 2023 terealisasi 96,23% atau sebesar Rp2.977.141.914.829,00. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.020.914.516.871,00, Belanja Modal sebesar Rp278.842.913.538,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp409.940.801,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp676.974.543.619,00.

Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 67,88% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 9,37%, Belanja Tak Terduga sebesar 0,01% dan Belanja Transfer sebesar 22,74 %.

3. Pembiayaan

Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/3
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95
	SiLPA Tahun Sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,90	(8.911.122,10)	100,00
	Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	(125.720.000,00)	99,44
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37
	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,49
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	3.865.368.877,98	101,63

4. SiLPA

Dari penjelasan komposisi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan di atas, diperoleh SiLPA TA 2023 sebesar Rp164.691.485.769,98.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Pendapatan Daerah

Capaian Pendapatan Daerah TA 2023 terealisasi sebesar 101,54%, namun untuk Pendapatan Retribusi Daerah hanya tercapai 79,46%. Pencapaian target Pendapatan Daerah dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memaksimalkan Pendapatan Daerah;
- b. Pemungutan Pendapatan Daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual; dan
- c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- d. Pada kelompok penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan Bagi Hasil Baik Pajak maupun SDA dari pemerintah dan penerimaan Dana Bagi Hasil dari provinsi;
- e. Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola Pendapatan Daerah melalui pelatihan, bimbingan teknik dan *in house training*;
- c. Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi;
- d. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk menggali pendapatan; dan

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi dana-dana transfer.
Belanja Daerah

Capaian Belanja Daerah TA 2023 terealisasi sebesar 96,23%. Kendala dalam pencapaian Belanja Daerah antara lain disebabkan:

- a. Terdapat paket pekerjaan yang tidak terlaksana 100%;
- b. Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan yang tidak terserap optimal;
- c. Dana BTT direalisasikan untuk bantuan korban bencana alam, korban kebakaran, bantuan migran, korban tindak kekerasan dan bantuan orang kehabisan bekal/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai kebutuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Kebumen Tahun 2024 yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Perbup Kebumen Nomor 60 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen.

4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemda atau satuan organisasi di lingkungan pemda atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas pelaporan pada Pemkab Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemkab Kebumen meliputi rekening-rekening entitas pemerintah daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemkab Kebumen. Laporan Keuangan Pemkab Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Kebumen selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Pemkab Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemkab Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk perusahaan daerah maupun yayasan dan entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemkab Kebumen.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Kebumen Tahun 2024 adalah basis akrual, dimana pengakuan Pendapatan, Beban, Aset, Utang, dan Ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Kebumen Tahun 2024 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemkab Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemda atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

4.4.1.1 Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

- 1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemda yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke RKUD.

Termasuk kas adalah:

- 1) Pendapatan yang telah diterima RKUD;
- 2) Penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke RKUD s.d. tanggal pelaporan keuangan;
- 3) Penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) maupun pihak lain s.d. tanggal pelaporan keuangan;
- 4) Potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke RKUN s.d. tanggal pelaporan keuangan;
- 5) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang dilaporkan ke BUD sebagai pendapatan BLUD;
- 6) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke BUD untuk disahkan sebagai pendapatan; dan
- 7) Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke RKUD dan dilaporkan ke BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di BLUD;
- 5) Kas Dana BOS;
- 6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP; dan
- 7) Kas Lainnya.

Termasuk dalam Setara Kas adalah Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b. Pengakuan

- 1) Kas dan Setara Kas diakui pada saat Kas dan Setara Kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan;
- 2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke BUD untuk disahkan sebagai Pendapatan Daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

- 1) Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK;
- 2) Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.

e. Pengungkapan

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian Kas dan nilai Kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) Rincian Kas dan nilai Kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan ke RKUN, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemda dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu tiga bulan s.d. 12 bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- 1) Saham;
- 2) Deposito;
- 3) Surat Utang Negara (SUN);



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Surat Perbendaharaan Negara;
 - 6) Investasi Jangka Pendek BLUD.
- b. Pengakuan
- 1) Investasi Jangka Pendek diakui saat terdapat pengeluaran Kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan pemda memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
 - 2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang Investasi Jangka Pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemda. Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (PAD).
- c. Pengukuran
- Pengukuran Investasi Jangka Pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:
- 1) Saham dicatat sebesar harga perolehan;
 - 2) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
 - 3) SUN dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
 - 4) SBI dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
 - 5) Surat Perbendaharaan Negara dicatat dengan nilai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
 - 6) Investasi Jangka Pendek BLUD dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Penyajian
- Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.
- e. Pengungkapan
- Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:
- 1) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
 - 2) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan
 - 3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).

3. Piutang

- a. Definisi
- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - 2) Piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - a) Piutang Pendapatan, meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (1) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - (2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - (3) Piutang Transfer Antar Pemerintahan, adalah hak pemda untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
- b) Piutang Lainnya, meliputi:
- (1) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - (2) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban Dibayar Dimuka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Pengakuan
- Piutang dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
- 1) Telah terbit atau keluar dokumen resmi yang menyatakan dan kewajiban secara jelas;
 - 2) Nilai piutang dapat diukur;
 - 3) Dapat dilakukan penagihan atas dokumen resmi pada nomor angka 1), dan
 - 4) Kewajiban belum dilunasi.
- c. Pengukuran
- 1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *Net Realizable Value* (NRV) dengan memperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
 - 2) Penyisihan kerugian Piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan Piutang dan dibentuk sebesar nilai Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan kualitas dan umur Piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 3) Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 4) Penggolongan kriteria kualitas Piutang berdasarkan jenis Piutang:
 - a) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas Piutang Pajak Daerah dapat dipilih berdasarkan cara pemungutan:

- (1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- (2) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Piutang Retribusi Daerah

Penggolongan Piutang Retribusi Daerah terdiri dari:

- (1) Kualitas Lancar
 - (a) Umur piutang 0 s.d. 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar
 - (a) Umur piutang 1 (satu) bulan s.d. 3 (tiga) bulan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet
 - (a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- c) Piutang selain Pajak dan Retribusi
 - (1) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 5) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 6) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d) pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.
- d. Penyajian
Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.
- e. Pengungkapan
- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang;
 - b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian Piutang; dan
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
 - 2) Penghapus bukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4. Beban Dibayar Dimuka

- a. Definisi
Beban Dibayar Dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban Dibayar Dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang pemda yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan.
- b. Pengakuan
- 1) Beban Dibayar Dimuka diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
 - 2) Beban Dibayar Dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima.
 - 3) Beban Dibayar Dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.
- c. Pengukuran
Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.
- d. Penyajian
Biaya Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- e. Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
 - 1) Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima.
 - 2) Disajikan secara neto.

5. Persediaan

- a. Definisi
 - 1) Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemda, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
- b. Pengakuan
Persediaan diakui:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c. Pengukuran
 - 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

yang terkait dengan Persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - 2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
 - 3) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
 - 4) Persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- d. Penyajian
Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.
- e. Pengungkapan
Pengungkapan Persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:
- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Persediaan;
 - 2) Penjelasan lebih lanjut Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 3) Jenis, jumlah, dan nilai Persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.2 Aset Non Lancar

1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Non Permanen

- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki s.d. tanggal jatuh temponya;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (3) Dana yang disisihkan oleh pemda dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- (4) Investasi Non Permanen Lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - (2) Tercantum dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - (3) Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
 - (4) Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - (5) Pemda dapat menarik kembali Dana Bergulir.
- d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada PAD-Lain-lain PAD yang Sah.
- e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di BUD tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
- f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
- g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan Dana Bergulir, tetapi secara periodik pemda harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.
- h) Untuk mendapatkan nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (NRV) maka dilakukan perhitungan nilai penyisihan Dana Bergulir. Nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (NRV) diperoleh dari Dana Bergulir dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir. Penyisihan Dana Bergulir bukan merupakan penghapusan Dana Bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- i) Besaran Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- j) Kualitas Dana Bergulir adalah hampiran atas ketertagihan Dana Bergulir yang diukur berdasarkan umur Dana Bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur. Penggolongan Kriteria kualitas Dana Bergulir terdiri atas:
 - (1) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
 - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir s.d. 1 tahun; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3)) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana kooperatif.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun; dan/atau
 - (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5)) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Dana Bergulir dengan *executing agency*;
 - (a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan Lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemda; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*
 - (a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir s.d. 1 tahun; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima Dana Bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5)) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Investasi Permanen
 - a) Investasi Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
 - b) Investasi Permanen dapat berupa:
 - (1) Penyertaan modal pemda pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemda untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pengakuan
 - 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan pemda memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
 - 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari Penyertaan Modal pemda yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan
 - b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemda.
- c. Pengukuran
 - 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi Nonpermanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemda (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemda, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan
 - f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.
- d. Penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- 1) Metode biaya;
Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas;
Metode ekuitas pemda mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemda. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- 1) Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemda.

2. Aset Tetap

a. Definisi

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemda serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemda dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pengerjaan namun pada tanggal laporan keuangan belum dapat dimanfaatkan.

b. Pengakuan

- 1) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 2) Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- 3) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 4) batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 2.5. Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Uraian	Harga Satuan/Unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Harga Satuan/Unit (Rp)
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-

- 5) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
 - 6) Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemda tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Pengukuran
- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 2) Biaya perolehan Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - 3) Biaya perolehan Aset Tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
 - a) Honorarium terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Belanja dokumen/administrasi tender;
 - c) Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - d) Belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan Aset Tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
 - e) Belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan Aset Tetap;
 - f) Biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.
 - 4) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - 5) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
 - 6) Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
 - 7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
 - 8) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 9) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset Lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan Aset Tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;
- 12) Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*Capitalization Thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada **Lampiran 6**.

d. Penyajian

- 1) Aset Tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan Aset Tetap:
 - a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - c) Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan asumsi nilai residu Rp0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- d) Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - e) Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap disajikan pada **Lampiran 7**.
 - f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan Aset Tetap. Penyusutan disajikan dalam LO sebagai Beban Penyusutan.
 - g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan Aset Tetap sehingga nilai buku Aset Tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- 3) Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- 4) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- 5) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Pengungkapan
- 1) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) Mutasi Aset Tetap Lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - 2) Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.
- 3) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.
- 2) KDP mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan

- 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.
- 3) KDP dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

KDP dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

d. Penyajian

KDP disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Tetap.

e. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:

- 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

4. Dana Cadangan

a. Definisi

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan Dana Cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber Dana Cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

b. Pengakuan

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan.

c. Pengukuran

- 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan;
- 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan; dan
- 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemda merupakan penambah Dana Cadangan.

d. Penyajian

Dana Cadangan disajikan di Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- 5) Sumber Dana Cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5. Aset Lainnya

a. Definisi

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.
- 2) Aset Lainnya terdiri dari:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemda. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemda diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
 - (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
 - (3) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT); dan
 - (4) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO).
 - d) Aset Tak Berwujud (ATB)
ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemda. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. ATB dapat berupa:
 - (1) *Goodwill*;
 - (2) Hak Paten atau Hak Cipta;
 - (3) Royalti;
 - (4) *Software*;
Software komputer yang diakui sebagai ATB adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.
 - (5) Lisensi;
 - (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

(7) ATB Lainnya.

e) Aset Lain-lain.

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemda direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan

- 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 4) KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 5) BGS/BOT diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 6) BSG/BTO diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 7) Pengakuan *Software* komputer:
 - a) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.
 - b) *Software* yang diperoleh dengan cara pembelian:
 - (1) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau s.d. 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
 - (2) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau s.d. 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - (3) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau s.d. 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- (4) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

c. Pengukuran

- 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
- 4) KSP dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- 5) BGS/BOT dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemda kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- 6) BSG/BTO dicatat sebesar nilai perolehan Aset Tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai Aset Tetap yang diserahkan pemda ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 7) ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemda untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemda tersebut.
- 8) Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk ATB diatur sebagai berikut:

Tabel 2.6. Masa Manfaat ATB

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Bulan)
1.5.03.01.01	ATB	
1.5.03.01.01.01	<i>Goodwill</i>	120
1.5.03.01.01.02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	120
1.5.03.01.01.03	Hak Cipta	120
1.5.03.01.01.04	Hak Paten	120
1.5.03.01.01.05	<i>Software</i>	120
1.5.03.01.01.06	Kajian	120
1.5.03.01.01.07	ATB yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	120
1.5.03.01.01.08	ATB dalam Pengerjaan	120
1.5.03.01.01.09	ATB Lainnya	120

- 9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.
- 10) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

- d. Penyajian
Aset Lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Non Lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- e. Pengungkapan
Pengungkapan Aset Lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Besaran dan rincian Aset Lainnya;
 - 2) Kebijakan amortisasi atas ATB;
 - 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS/BOT, dan BSG/BTO); dan
 - 4) Informasi lainnya yang penting.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- 1. Definisi
 - a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda. Kewajiban pemda dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
 - b. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
 - c. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek antara lain Utang Transfer Pemda, Utang kepada Pegawai, Utang Bunga, Utang Jangka Pendek kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - d. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

2. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemda menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemda berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemda, kewajiban diakui ketika pemda berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemda dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemda.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemda, kewajiban diakui ketika pemda memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemda memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3. Pengukuran

- a. Kewajiban pemda dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs 68engah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
- b. Pengukuran kewajiban atau Utang Jangka Pendek pemda berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemda menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemda mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
 - 2) Pengukuran Utang Transfer
Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Pengukuran Utang Bunga



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

c. Kewajiban atau Utang Jangka Panjang pemda juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik Utang Jangka Panjang pemda, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemda. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4. Penyajian

Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang pemda disajikan dalam neraca disisi pasiva.

5. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- 1. Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemda yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada LPE.
- 2. Pengakuan
Pengakuan atas Ekuitas tergantung dari saat pengakuan Aset dan Kewajiban.
- 3. Penyajian dan Pengungkapan
Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah

- 1. Definisi
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemda.
- 2. Pengakuan
Pendapatan Daerah menggunakan basis kas sehingga Pendapatan Daerah diakui pada saat:
 - a. Diterima di RKUD; atau
 - b. Diterima oleh SKPD; atau
 - c. Diterima entitas lain diluar pemda atas nama BUD.
- 3. Pengukuran
 - a. Pendapatan Daerah diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Daerah bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4. Penyajian



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

5. Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja Daerah

1. Definisi
Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BBUD yang mengurangi SAL dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pmda.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat:
 - a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
 - b. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
 - c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
3. Pengukuran
Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
4. Penyajian dan Pengungkapan
 - a. Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
 - b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran Kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Daerah

1. Definisi
Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pmda dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUN/D antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
2. Pengakuan
 - a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
 3. Pengukuran
 - a. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
 4. Penyajian dan Pengungkapan
Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi
Pendapatan-LO adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Termasuk Pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke RKUD dan dilaporkan ke BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah.
2. Pengakuan
 - a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:
 - 1) PAD
Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui penetapan, PAD tanpa penetapan, dan PAD dari hasil eksekusi jaminan.
 - 2) PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

3) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

4) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

5) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemda. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

6) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke BUD pada akhir periode.

7) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari PAD yaitu pendapatan Pajak Daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan Retribusi dan sebagian dari Lain-lain PAD yang Sah.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan Pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- 2) Alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.
- 3) Alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

3. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadi konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya Kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari RKUD. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi Aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemda. Sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai Aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a) Pengakuan Beban pada SKPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

6) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b) **Pengakuan Beban Pada SKPD**

1) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GUP/TUP, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

2) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

3. Pengukuran
Beban diukur sesuai dengan:
 - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan
 - b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.
4. Penyajian dan Pengungkapan
Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
2. Kesalahan perhitungan matematis;
3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
4. Kesalahan interpretasi fakta;
5. Kecurangan; atau
6. Kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

1. Kesalahan berulang dan sistemik
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan Daerah maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
2. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
 - b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

- a) Kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun neraca terkait.
- b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah /Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.
- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.
- d) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3.062.696.919.000,00	3.137.694.279.634,00	74.997.360.634,00	102,45	2.901.021.509.721,0

Anggaran Pendapatan dalam Perbup Kebumen Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kebumen Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 ditargetkan sebesar Rp3.062.696.919.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.137.694.279.634,00 yang terdiri dari.

Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	467.192.970.000,00	484.291.013.938,00	17.098.043.938,00	103,66	463.650.961.705,00
Pendapatan Transfer	2.595.403.949.000,00	2.634.840.256.696,00	39.436.307.696,00	101,52	2.435.850.438.454,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.000.000,00	18.563.009.000,00	18.463.009.000,00	18563,01	1.520.109.562,00
Jumlah	3.062.696.919.000,00	3.137.694.279.634,00	74.997.360.634,00	102,45	2.901.021.509.721,00

Pendapatan Pemkab Kebumen TA 2024 mencapai target sebesar 102,45% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp74.997.360.634,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp236.672.769.913,00 atau naik sebesar 8,16%.

Tabel 5.1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen utama Pendapatan Pemkab Kebumen dengan kontribusi sebesar 83,97% dari total realisasi Pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyokong Pendapatan sebesar 15,43% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,59%. Kontribusi PAD turun dari kontribusi pada TA 2023 yang sebesar 0,55%

Realisasi PAD secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada TA 2024 realisasinya sebesar Rp484.291.013.938,00 atau 103,66% sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp463.650.961.705,00 atau naik sebesar 4,45%. Pendapatan Transfer TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.634.840.256.696,00 atau 101,52%, mengalami kenaikan sebesar 8,17% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.435.850.438.454,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp18.563.009.000,00 atau 18.563,01%, jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.520.109.562,00 secara nominal mengalami kenaikan sebesar 1121,16%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
467.192.970.000,00	484.291.013.938,00	17.098.043.938,00	103,66	463.650.961.705,00

Realisasi PAD TA 2024 Pemkab Kebumen sebesar Rp484.291.013.938,00 terdiri atas:

Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan 2023

PAD	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Daerah	142.880.000.000,00	139.434.789.479,00	(3.445.210.521,00)	97,59	137.222.705.502,00
Retribusi Daerah	34.328.188.000,00	33.229.154.159,00	(1.099.033.841,00)	96,80	28.881.046.419,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.751.620.000,00	21.856.399.056,00	104.779.056,00	100,48	19.123.340.688,00
Lain-lain PAD yang Sah	268.233.162.000,00	289.770.671.244,00	21.537.509.244,00	108,03	278.423.869.096,00
Jumlah	467.192.970.000,00	484.291.013.938,00	17.098.043.938,00	103,66	463.650.961.705,00

Dari empat objek PAD terdapat dua obyek PAD yang mencapai target yaitu Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar 100,48% dan Lain-Lain PAD yang Sah tercapai sebesar 108,03%. Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah tidak mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 97,59%, jika dibandingkan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp137.222.705.502,00 secara nominal Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1,61% dan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 96,80%, jika dibandingkan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp28.881.046.419,00 secara nominal Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 15,06%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
142.880.000.000,00	139.434.789.479,00	(3.445.210.521,00)	97,59	137.222.705.502,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tidak mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 97,59% dari target anggaran sebesar Rp142.880.000.000,00 terealisasi sebesar Rp139.434.789.479,00. Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memungut 11 Jenis Pajak Daerah. Pemungutan 11 Jenis Pajak Daerah diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diatur dengan peraturan kepala daerah. Rincian Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Pajak Daerah	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	3.100.000.000,00	2.728.082.330,00	(371.917.670,00)	88,00	2.915.673.634,00
Pajak Restoran	13.900.000.000,00	14.038.805.792,00	138.805.792,00	101,00	13.254.656.107,00
Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	1.096.652.834,00	(103.347.166,00)	91,39	1.129.890.815,00
Pajak Reklame	2.200.000.000,00	1.792.719.928,00	(407.280.072,00)	81,49	2.324.243.500,00
Pajak Penerangan Jalan	46.780.000.000,00	46.640.474.661,00	(139.525.339,00)	99,70	42.269.699.527,00
Pajak Parkir	700.000.000,00	536.819.441,00	(163.180.559,00)	76,69	744.359.699,00
Pajak Air Tanah	400.000.000,00	398.343.480,00	(1.656.520,00)	99,59	405.744.478,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	625.161.762,00	(374.838.238,00)	62,52	593.014.174,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	57.500.000.000,00	58.136.414.662,00	636.414.662,00	101,11	56.985.271.522,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.100.000.000,00	13.103.245.920,00	(2.996.754.080,00)	81,39	16.600.152.046,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	338.068.669,00	338.068.669,00	-	-
Jumlah	142.880.000.000,00	139.434.789.479,00	(3.445.210.521,00)	97,59	137.222.705.502,00

Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp139.434.789.479,00 atau naik sebesar 1,61% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 yang hanya sebesar Rp137.222.705.502,00. Terdapat 2 objek Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai di atas 100,00% dari target anggaran. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Adapun Rincian Pendapatan Pajak Dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Perbup Kebumen Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, dimana tarif pengenaan Pajak Hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.

Pendapatan Pajak Hotel TA 2024 ditargetkan sebesar Rp3.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.728.082.330,00 atau 88,00%. Realisasi pendapatan Pajak Hotel pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp187.591.304,00 atau 6,43% dari TA 2023. Penurunan dan tidak tercapainya target realisasi Pajak Hotel disebabkan karena tidak ada event berskala besar di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024.

2. Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran dan Perbup Kebumen Nomor 110 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

tentang Pajak Restoran, dimana tarif Pajak Restoran sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pendapatan Pajak Restoran TA 2024 ditargetkan sebesar Rp 13.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.038.805.792,00 atau 101,00%. Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp784.149.685,00 atau 5,92% dari TA 2023. Rincian pendapatan Pajak Restoran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2024 dan 2023

Pajak Daerah	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	3.662.941.500,00	162.941.500,00	104,66	2.971.806.454,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.400.000.000,00	10.375.864.292,00	(24.135.708,00)	99,77	10.282.849.653,00
Jumlah	13.900.000.000,00	14.038.805.792,00	138.805.792,00	101,00	13.254.656.107,00

3. Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan dan Perbup Kebumen Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- Tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
- Pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
- Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).

Pendapatan Pajak Hiburan TA 2024 ditargetkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.096.652.834,00 atau 91,39%. Realisasi pendapatan Pajak Hiburan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.237.981,00 atau 2,94% dari TA 2023. Penurunan dan tidak tercapainya target realisasi Pajak Hotel disebabkan karena tidak ada event berskala besar di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024. Rincian pendapatan Pajak Hiburan disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2024 dan 2023

Pajak Daerah	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Tontonan Film	770.000.000,00	470.154.090,00	(299.845.910,00)	61,06	345.345.344,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	225.000.000,00	201.671.354,00	(23.328.646,00)	89,63	233.037.116,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	180.000.000,00	412.396.990,00	232.396.990,00	229,11	537.078.355,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	6.180.400,00	(13.819.600,00)	30,90	14.430.000,00
Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00	125,00	-
Jumlah	1.200.000.000,00	1.096.652.834,00	(103.347.166,00)	91,39	1.129.890.815,00

Objek Pajak Hiburan yang realisasinya mengalami kenaikan pada TA 2024 yaitu Pajak Tontonan Film sebesar Rp124.808.746,00 atau 36,14% dari TA 2023. Sedangkan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya mengalami penurunan sebesar Rp31.365.762,00 atau 13,46% dari TA 2023. Kemudian Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan mengalami penurunan sebesar Rp124.681.365,00 atau 23,21% dari TA 2023. Serta, Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) mengalami penurunan sebesar Rp8.249.600,00 atau 57,17% dari TA 2023.

Pada TA 2024 terdapat realisasi Pajak Pertandingan Olahraga sebesar Rp6.250.000,00 atau sebesar 125,00%.

4. Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dan Perbup Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 ditargetkan sebesar Rp2.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.792.719.928,00 atau 81,49%. Realisasi pendapatan Pajak Reklame TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp531.523.572,00 atau 22,87% dari TA 2023. Rincian pendapata Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.6 Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2024 dan 2023

Pajak Daerah	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.575.000.000,00	999.012.735,00	(575.987.265,00)	63,43	1.419.751.035,00
Pajak Reklame Kain	625.000.000,00	793.707.193,00	168.707.193,00	126,99	904.492.465,00
Jumlah	2.200.000.000,00	1.792.719.928,00	(407.280.072,00)	81,49	2.324.243.500,00

5. PPJ

Pemungutan PPJ berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang PPJ dan Perbup Kebumen Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang PPJ.

Dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif PPJ sebesar 10% (sepuluh persen), penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dengan tarif PPJ sebesar 3% (tiga persen) dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tarif PPJ sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Wajib Pajak untuk PPJ adalah penyedia tenaga listrik karena penggunaan listrik di Kabupaten Kebumen adalah listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) sehingga yang menjadi Wajib Pajak adalah PT PLN (Persero). Untuk kelancaran pemungutan PPJ, telah disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, Penanganan Lampu Penerangan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen antara Pemkab Kebumen dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cilacap dan BPKPD Kabupaten Kebumen dengan Nomor 0026.Pj/KEU.01.06/F03010000/2024 dan Nomor 100.3.7.1/306.2 tanggal 26 Januari 2024 serta antara Pemkab Kebumen dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Purwokerto dengan Nomor 024.Pj/KEU.AGA.04.01/03080000/2024 dan Nomor 100.3.7.1/306.1 tanggal 26 Januari 2024.

Pendapatan PPJ TA 2024 ditargetkan sebesar Rp46.780.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 46.640.474.661,00 atau 99,70%. Meskipun secara persentase terhadap target tidak dapat tercapai karena tidak adanya pemasangan sambungan listrik untuk industri baru dan konsumsi listrik di BUBK menurun tetapi nilai realisasi pendapatan PPJ TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.370.775.134,00 atau sebesar 10,34% dari TA 2023.

6. Pajak Parkir

Pemungutan Pajak Parkir berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir dan Perbup Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pendapatan Pajak Parkir TA 2024 ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp536.819.441,00 atau 76,69%. Realisasi pendapatan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Parkir TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp207.540.258,00 atau 27,88% dari TA 2023.

7. Pajak Air Tanah

Pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Perbup Kebumen Nomor 115 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perolehan air tanah.

Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp398.343.480,00 atau 99,59%. Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.400.998,00 atau 1,82% dari TA 2023.

8. Pajak MBLB

Pemungutan Pajak MBLB berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak MBLB dan Perbup Kebumen Nomor 114 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak MBLB. Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual hasil pengambilan MBLB.

Pendapatan Pajak MBLB ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi Rp625.161.762,00 atau 62,52%. Realisasi pendapatan Pajak MBLB TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp32.147.588,00 atau 5,42% dari TA 2023. Tidak terealisasinya Pajak MBLB disebabkan para kontraktor di Kebumen memilih menggunakan batuan dari kabupaten lain karena batuan di Kebumen tidak memenuhi standar dalam spesifikasi pekerjaan.

9. PBB-P2

Pemungutan PBB-P2 berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang PBB-P2 dan Perbup Kebumen Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang PBB-P2.

Pendapatan PBB-P2 TA 2024 ditargetkan sebesar Rp57.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.136.414.662,00 atau 101,11%. Realisasi pendapatan PBB-P2 TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.151.143.140,00 atau 2,02% dari realisasi TA 2023.

10. BPHTB

Pemungutan BPHTB berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang BPHTB dan Perbup Kebumen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Kebumen.

Pendapatan BPHTB ditargetkan sebesar Rp16.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.103.245.920,00 atau 81,39%. Pendapatan BPHTB TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.496.906.126,00 atau 21,07% dari realisasi TA 2023. Kurangnya capaian target dan adanya penurunan realisasi disebabkan oleh adanya kenaikan NJOPTKP BPHTB yang semula Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00 dan adanya penurunan pengajuan BPHTB pada tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
34.328.188.000,00	33.229.154.159,00	(1.099.033.841,00)	96,80	28.881.046.419,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp34.328.188.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.229.154.159,00 atau hanya mencapai 96,80%. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.348.107.740,00 atau 15,06% dari TA 2023.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari tiga jenis Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari lima jenis Retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari sepuluh jenis Retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari tiga jenis Retribusi.

Pemkab Kebumen pada TA 2024 memungut Retribusi Jasa Umum sebanyak empat jenis, Retribusi Jasa Usaha sebanyak enam jenis dan Retribusi Perizinan tertentu sebanyak satu jenis.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Retribusi	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	730.000.000,00	872.041.000,00	142.041.000,00	119,46	795.516.300,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	842.547.000,00	1.359.660.826,00	517.113.826,00	161,38	1.441.471.300,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.660.000.000,00	1.654.817.000,00	(1.005.183.000,00)	62,21	1.170.762.700,00
Retribusi Pelayanan Pasar	7.722.334.000,00	7.232.868.182,00	(489.465.818,00)	93,66	6.246.595.015,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	548.336.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	-	140.955.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	84.120.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	1.271.616.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Retribusi	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Sub Jumlah I	11.954.881.000,00	11.119.387.008,00	(835.493.992,00)	93,01	11.699.372.815,00
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.660.886.000,00	8.555.546.763,00	(1.105.339.237,00)	88,56	4.656.304.233,00
Retribusi Tempat Pelelangan	1.140.000.000,00	1.015.980.302,00	(124.019.698,00)	89,12	1.438.639.484,00
Retribusi Terminal	-	-	-	-	94.461.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.519.731.000,00	7.176.574.009,00	656.843.009,00	110,07	5.021.520.600,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	24.920.000,00	25.050.000,00	130.000,00	100,52	27.610.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	28.665.000,00	(6.335.000,00)	81,90	37.877.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.492.770.000,00	3.319.842.700,00	(172.927.300,00)	95,05	4.720.282.500,00
Sub Jumlah II	20.873.307.000,00	20.121.658.774,00	(751.648.226,00)	96,40	15.996.695.317,00
Retribusi Perizinan Tertentu				-	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-	1.173.548.287,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	11.430.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.988.108.377,00	488.108.377,00	132,54	-
Sub Jumlah III	1.500.000.000,00	1.988.108.377,00	488.108.377,00	132,54	1.184.978.287,00
Jumlah	34.328.188.000,00	33.229.154.159,00	(1.099.033.841,00)	96,80	28.881.046.419,00

Tabel 5.1.7 menunjukkan bahwa dari 11 rincian obyek pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 terdapat lima rincian objek retribusi yang mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 119,46%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 161,38%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 110,07%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 101,96%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar 100,52%, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 132,54%.

Sedangkan, enam rincian objek retribusi lainnya tidak dapat mencapai target yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 62,21%, karena berkurangnya titik/lokasi parkir.
2. Retribusi Pelayanan Pasar hanya mencapai 93,66%, karena sebagian besar kios dan los tutup dan tidak aktif berjualan dan banyaknya minimarket/pasar online/pasar tradisional.
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mencapai 88,56%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

4. Retribusi Tempat Pelelangan hanya mencapai 89,12% karena Pengelolaan BUBK dilakukan secara BLUD serta adanya *free* retribusi pada bulan Februari dan pengurangan retribusi 30% pada bulan Maret s.d. Mei.
5. Retribusi Rumah Potong Hewan hanya mencapai 81,90%.
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya mencapai 95,05%.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD disajikan pada **Lampiran 8**.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
21.751.620.000,00	21.856.399.056,00	104.779.056,00	100,48	19.123.340.688,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) TA 2024 ditargetkan sebesar Rp21.751.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.856.399.056,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Pendapatan HPKDYD TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.733.058.368,00 atau 14,29% dari TA 2023.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD oleh Pemkab Kebumen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rincian Pendapatan HPKDYD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8 Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Lembaga Keuangan					
PT BPD Jateng	13.967.403.000,00	13.967.403.517,00	517,00	100,00	12.782.353.955,00
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	3.786.138.000,00	3.890.915.251,00	104.777.251,00	102,77	3.412.154.809,00
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	553.730.000,00	553.730.533,00	533,00	100,00	583.206.099,00
Aneka Usaha					
PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	189.888.000,00	189.888.145,00	145,00	100,00	199.212.900,00
Bidang Air Minum					
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	3.254.461.000,00	3.254.461.610,00	610,00	100,00	2.146.412.925,00
Jumlah	21.751.620.000,00	21.856.399.056,00	104.779.056,00	100,48	19.123.340.688,00

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
268.233.162.000,00	289.770.671.244,00	21.537.509.244,00	108,03	278.423.869.096,00

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp268.233.162.000,00 dan terealisasi sebesar Rp289.770.671.244,00,00 atau mencapai 108,03%. Realisasi Lain-lain



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

PAD yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.346.802.148,00 atau 4,08% dari TA 2023. Rincian Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.464.200.000,00	1.766.231.100,00	302.031.100,00	120,63	2.038.015.879,00
Jasa Giro	2.160.000.000,00	2.217.445.179,00	57.445.179,00	102,66	1.941.444.932,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	37.500.000,00	35.890.226,00	(1.609.774,00)	95,71	47.250.000,00
Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	3.172.468.032,00	(827.531.968,00)	79,31	5.411.536.170,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000,00	269.795.181,00	19.795.181,00	107,92	403.885.062,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	22.317.520,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.500.000,00	-	(18.500.000,00)	0,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	245.000.000,00	184.056.145,00	(60.943.855,00)	75,12	355.217.506,00
Pendapatan BLUD	256.148.814.000,00	279.006.253.370,00	22.857.439.370,00	108,92	266.431.178.288,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.909.148.000,00	3.118.532.011,00	(790.615.989,00)	79,78	1.773.023.739,00
Jumlah	268.233.162.000,00	289.770.671.244,00	21.537.509.244,00	108,03	278.423.869.096,00

Tabel 5.1.9 menunjukkan bahwa terdapat empat realisasi objek Lain-Lain PAD yang Sah yang belum melampaui target anggaran yaitu Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar 95,71%, Pendapatan Bunga sebesar 79,31%, Pendapatan dari Pengembalian sebesar 75,12% dan Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebesar 79,78%.

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD disajikan pada **Lampiran 9**.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.595.403.949.000,00	2.634.840.256.696,00	9.436.307.696,00	101,52	2.435.850.438.454,00

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.595.403.949.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.634.840.256.696,00 atau 101,52% merupakan pendapatan yang realisasinya dicatat berdasarkan pada realisasi transfer yang masuk ke RKUD periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Rincian Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.837.487.200.000,00	1.884.387.249.883,00	46.900.049.883,00	102,55	1.783.201.602.063,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	489.634.195.000,00	482.107.956.000,00	(7.526.239.000,00)	98,46	467.765.621.200,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.282.554.000,00	268.345.050.813,00	62.496.813,00	100,02	184.883.215.191,00
Jumlah	2.595.403.949.000,00	2.634.840.256.696,00	39.436.307.696,00	101,52	2.435.850.438.454,00

Tabel 5.1.10 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp198.989.818.242,00 atau 8,17% dari TA 2023.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.837.487.200.000,00	1.884.387.249.883,00	6.900.049.883,00	102,55	1.783.201.602.063,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 terealisasi sebesar 102,56% atau Rp1.884.523.490.811,00 dari anggaran sebesar Rp1.837.487.200.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.783.201.602.063,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp101.321.888.748,00 atau 5,68%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	30.626.645.000,00	33.987.975.000,00	3.361.330.000,00	110,98	36.123.723.591,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.266.367.162.000,00	1.306.369.023.000,00	40.001.861.000,00	103,16	1.239.930.914.430,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	540.493.393.000,00	544.030.251.883,00	3.536.858.883,00	100,65	507.146.964.042,00
Jumlah	1.837.487.200.000,00	1.884.387.249.883,00	46.900.049.883,00	102,55	1.783.201.602.063,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
30.626.645.000,00	33.987.975.000,00	3.361.330.000,00	110,98	36.123.723.591,00

Pendapatan DBH TA 2024 dianggarkan sebesar Rp30.626.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.987.975.000,00 atau 110,98%. Realisasi TA 2024 mengalami penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

sebesar Rp2.135.748.591,00 atau 5,91% dibandingkan TA 2023. Rincian pendapatan DBH disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12 Anggaran dan Realisasi DBH TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.687.169.000,00	3.246.950.850,00	559.781.850,00	120,83	3.585.351.950,00
DBH PPh Pasal 21	12.334.197.000,00	14.985.904.000,00	2.651.707.000,00	121,50	14.486.092.027,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.883.132.000,00	13.983.303.000,00	100.171.000,00	100,72	15.296.931.852,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	102.944.000,00	119.737.400,00	16.793.400,00	116,31	408.856.946,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	20.841.000,00	50.456.750,00	29.615.750,00	242,10	104.757.255,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	680.000,00	3.941.000,00	3.261.000,00	579,56	1.010.933,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber	170.982.000,00	170.982.000,00	-	100,00	389.207.417,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.426.700.000,00	1.426.700.000,00	-	100,00	1.851.515.211,00
Jumlah	30.626.645.000,00	33.987.975.000,00	3.361.330.000,00	110,98	36.123.723.591,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.266.367.162.000,00	1.306.369.023.000,00	40.001.861.000,00	103,16	1.239.930.914.430,00

Pendapatan DAU TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.266.367.162.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.306.369.023.000,00 atau 103,16%. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp66.438.108.570,00 atau 5,36% dibandingkan TA 2023. Rincian pendapatan DAU disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.13 Anggaran dan Realisasi DAU TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
DAU				-	
Block Grant	1.160.605.710.000,00	1.160.605.710.000,00	-	100,00	989.079.141.430,00
Tambahan	-	40.001.861.000,00	40.001.861.000,00	-	19.536.196.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	-	100,00	2.200.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian	9.554.706.000,00	9.554.706.000,00	-	100,00	50.868.048.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan (SG)	44.654.483.000,00	44.654.483.000,00	-	100,00	100.248.901.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan (SG)	27.752.760.000,00	27.752.760.000,00	-	100,00	56.839.975.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum (SG)	21.599.503.000,00	21.599.503.000,00	-	100,00	21.158.653.000,00
Jumlah	1.266.367.162.000,00	1.306.369.023.000,00	40.001.861.000,00	103,16	1.239.930.914.430,00

Anggaran DAU TA 2024 Kabupaten Kebumen berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024. Pendapatan DAU melampaui anggaran karena terdapat alokasi DAU Tambahan atas DAU Khusus THR 50% dan TPG 50% sebesar Rp40.001.861.000,00 berdasarkan KMK Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAU TA 2024 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru dan Aparatur Sipil Negara di Daerah. Atas alokasi DAU Tambahan tersebut telah diterima di RKUD pada tanggal 16 Desember 2024 sebesar Rp40.001.861.000,00 atau 100%.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
540.493.393.000,00	544.030.251.883,00	3.536.858.883,00	100,65	507.146.964.042,00

Pendapatan DAK TA 2024 dianggarkan sebesar Rp540.493.393.000,00 dan terealisasi sebesar Rp544.030.251.883,00 atau 100,65%. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp36.883.287.841,00 atau 7,27% dibandingkan TA 2023. Rincian pendapatan DAK disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi DAK TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.644.209.000,00	68.388.503.136,00	(1.255.705.864,00)	98,20	49.510.073.990,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	470.849.184.000,00	475.641.748.747,00	4.792.564.747,00	101,02	457.636.890.052,00
Jumlah	540.493.393.000,00	544.030.251.883,00	3.536.858.883,00	100,65	507.146.964.042,00

Rincian DAK Fisik dan Non Fisik dijelaskan pada **Lampiran 10**.

1. DAK Fisik

Realisasi DAK Fisik tercapai sebesar Rp69.644.209.000,00 atau 98,20% dari anggaran sebesar Rp68.388.503.136,00. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp18.878.429.146,00 atau 38,13% dari TA 2023.

2. DAK Non Fisik

Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 tercapai sebesar Rp475.641.748.747,00 atau 101,62% dari anggaran sebesar Rp470.849.184.000,00. Realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp118.004.858.695,00 atau 3,93% dari TA 2023. Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 sebesar Rp475.641.748.747,00 termasuk realisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang disalurkan langsung ke Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta sebesar Rp166.596.042.921,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.15 Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik-BOSP TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
BOS Reguler-SDN	137.679.375.000,00	137.884.947.421,00	205.572.421,00	100,15	139.219.467.064,00
SD Negeri		85.317.833.340,00			86.299.680.314,00
SMP Negeri		37.479.476.929,00			37.271.568.097,00
SD Swasta		5.405.810.055,00			5.239.092.948,00
SMP Swasta		9.681.827.097,00			10.233.507.400,00
Bunga		-			1.251,00
Pengembalian LHP APIP		-			175.617.054,00
BOS Kinerja	5.287.500.000,00	5.287.500.000,00	-	100,00	6.835.000.000,00
SD Negeri		3.917.500.000,00			5.140.000.000,00
SMP Negeri		970.000.000,00			405.000.000,00
SD Swasta		225.000.000,00			905.000.000,00
SMP Swasta		175.000.000,00			385.000.000,00
BOP PAUD	-	-	-	-	21.421.708.000,00
BOP Kesetaraan	-	-	-	-	2.294.711.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BOSP-BOP PAUD	20.818.800.000,00	20.774.283.000,00	(44.517.000,00)	99,79	-
BOSP-BOP Kesetaraan	2.696.600.000,00	2.649.312.500,00	(47.287.500,00)	98,25	-
Jumlah	166.482.275.000,00	166.596.042.921,00	113.767.921,00	100,07	169.770.886.064,00

Realisasi DAK Non Fisik yang melebihi anggaran adalah dari DAK Non Fisik-TPG PNSD DAN dak Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sesuai KMK-423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2024.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
489.634.195.000,00	482.107.956.000,00	(7.526.239.000,00)	98,46	467.765.621.200,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar 98,46% atau Rp482.107.956.000,00 dari anggaran sebesar Rp489.634.195.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp467.765.621.200,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.342.334.800,00 atau 3,07%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Desa	463.030.927.000,00	461.258.494.000,00	(1.772.433.000,00)	99,62	455.959.893.200,00
Insentif Fiskal	26.603.268.000,00	20.849.462.000,00	(5.753.806.000,00)	78,37	11.805.728.000,00
Jumlah	489.634.195.000,00	482.107.956.000,00	(7.526.239.000,00)	98,46	467.765.621.200,00

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
463.030.927.000,00	461.258.494.000,00	(1.772.433.000,00)	99,62	455.959.893.200,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Penganggaran Dana Desa pada TA 2024 yang bersumber dari APBN, dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp461.258.494.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

atau sebesar 99,62% dari anggaran sebesar Rp463.030.927.000,00. Tidak tercapainya anggaran tersebut karena pada penyaluran Dana Desa Tahap II, Desa Surejan, Kecamatan Puring tidak dapat memenuhi syarat salur sebagaimana tercantum pada Pasal 14 ayat (3) huruf b PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Rincian Dana Desa yang disalurkan langsung dari RKUN kepada 449 Desa dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.1.1.2.2 Insentif Fiskal

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
26.603.268.000,00	20.849.462.000,00	(5.753.806.000,00)	78,37	11.805.728.000,00

Pemkab Kebumen pada TA 2024 memperoleh Insentif Fiskal sebesar Rp20.849.462.000,00 atau 78,37% dari anggaran. Insentif Fiskal merupakan dana yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah. Pada TA 2024 Pemkab Kebumen memperoleh Insentif Fiskal baik atas pencapaian Kinerja tahun sebelumnya dan pencapaian atas Kinerja tahun berjalan.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
268.282.554.000,00	268.345.050.813,00	62.496.813,00	100,02	184.883.215.191,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 terealisasi sebesar Rp268.345.050.813,00 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp268.282.554.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp184.883.215.191,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp83.461.835.622,00 atau 45,14%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	180.767.754.000,00	181.816.080.313,00	1.048.326.313,00	100,58	174.243.934.191,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	87.514.800.000,00	86.528.970.500,00	(985.829.500,00)	98,87	10.639.281.000,00
Jumlah	268.282.554.000,00	268.345.050.813,00	62.496.813,00	100,02	184.883.215.191,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
180.767.754.000,00	181.816.080.313,00	1.048.326.313,00	100,58%	174.243.934.191,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rp181.816.080.313,00 atau 100,58% dari anggaran sebesar Rp180.767.754.000,00. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.572.146.122,00 atau 4,35% dari TA 2023. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	67.310.008.000,00	61.359.596.236,00	(5.950.411.764,00)	91,16	65.144.158.189,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		40.989.010.767,00	40.989.010.767,00		43.781.141.043,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		20.370.585.469,00	20.370.585.469,00		21.363.017.146,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	40.923.200.000,00	48.566.524.970,00	7.643.324.970,00	118,68	44.912.780.605,00
Pajak Air Permukaan (PAP)	344.556.000,00	321.403.955,00	(23.152.045,00)	93,28	406.632.566,00
Pajak Rokok	72.189.990.000,00	71.568.555.152,00	(621.434.848,00)	99,14	63.780.362.831,00
Jumlah	180.767.754.000,00	181.816.080.313,00	1.048.326.313,00	100,58	174.243.934.191,00

5.1.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
87.514.800.000,00	86.528.970.500,00	(985.829.500,00)	98,87	10.639.281.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2023 merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2024 sebesar Rp86.528.970.500,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp87.514.800.000,00. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp75.889.689.500,00 atau 713,30% dari TA 2023. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
TMMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00	753.000.000,00
SPPD	10.618.800.000,00	10.592.923.500,00	(25.876.500,00)	99,76	-
Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Kab Kebumen	10.495.095.000,00	10.495.095.000,00	-	100,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
SIPD Profil Daerah Kab Kebumen	123.705.000,00	97.828.500,00	(25.876.500,00)	79,08	-
Bantuan Sarana Prasarana	30.000.000.000,00	29.243.952.000,00	(756.048.000,00)		9.886.281.000,00
Pengadaan Alkes RS ICU RSUD Prembun Kab Kebumen	5.000.000.000,00	4.923.000.000,00	(77.000.000,00)	98,46	-
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Ruang Rawat Inap RSUD Prembun KAB. KEBUMEN	5.000.000.000,00	4.840.000.000,00	(160.000.000,00)	96,80	-
Rekontruksi Jalan KABEKELAN-LEMBUPURWO NO RUAS 20 KAB. KEBUMEN	5.000.000.000,00	4.877.417.000,00	(122.583.000,00)	97,55	-
Pelebaran Jalan Ruas Adiluhur-Kalipurwo No. Ruas 149 KAB. KEBUMEN	2.500.000.000,00	2.439.245.000,00	(60.755.000,00)	97,57	-
Pelebaran Jalan SRUNI-KRAKAL NO RUAS 6 KAB. KEBUMEN	5.000.000.000,00	4.858.034.000,00	(141.966.000,00)	97,16	-
Rekontruksi Jalan Donorojo-Kedungwringin No. Ruas 200 KAB. KEBUMEN	7.500.000.000,00	7.306.256.000,00	(193.744.000,00)	97,42	-
Bantuan Pendidikan	45.896.000.000,00	45.692.095.000,00	(203.905.000,00)	99,56	-
Jumlah	128.133.600.000,00	126.365.846.000,00	(1.767.754.000,00)	98,62	10.639.281.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
100.000.000,00	18.563.009.000,00	18.463.009.000,00	18563,01%	1.520.109.562,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp18.563.009.000,00 atau 18563,01% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.042.899.438,00 atau 1121,16% dari TA 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
100.000.000,00	18.563.009.000,00	18.463.009.000,00	18563,01%	1.520.109.562,00

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 sebesar Rp18.563.009.000,00 atau 18563,01% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.042.899.438,00 atau 1121,16% dari TA 2023. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Hibah dari Pemerintah Pusat Reimburse Dana Hibah AMBK (Air Minum Berbasis Kinerja) PDAM	100.000.000,00	3.309.187.000,00	3.209.187.000,00	3309,19%	208.312.500,00
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	-	15.253.822.000,00	15.253.822.000,00	-	-
Hibah Air Minum Pedesaan (AMD)	-	-	-	-	1.188.000.000,00
Hibah IPDMIP	-	-	-	-	123.797.062,00
Jumlah	100.000.000,00	18.563.009.000,00	18.463.009.000,00	18563,01%	1.520.109.562,00

Pada Tahun 2024 Pemkab Kebumen menganggarkan hibah dari pemerintah pusat dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

5.1.2 Belanja

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.531.202.567.000,00	2.424.845.424.995,00	(106.357.142.005,00)	95,80	2.300.167.371.210,00

Belanja TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.531.202.567.000,00 dan terealisasi sebesar 95,80% atau sebesar Rp2.424.845.424.995,00. Realisasi Belanja TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp124.678.053.785,00 atau 5,42% dari TA 2023. Rincian Belanja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Operasi	2.240.808.596.285,00	2.145.786.592.502,00	(95.022.003.783,00)	95,76	2.020.914.516.871,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Modal	288.393.970.715,00	278.735.832.493,00	(9.658.138.222,00)	96,65	278.842.913.538,00
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	323.000.000,00	(1.677.000.000,00)	16,15	409.940.801,00
Jumlah	2.531.202.567.000,00	2.424.845.424.995,00	(106.357.142.005,00)	95,80	2.300.167.371.210,00

Kontribusi masing-masing jenis Belanja terhadap total Belanja didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 88,49% kemudian Belanja Modal 11,49% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,01%.

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp2.424.845.424.995,00 sudah termasuk Belanja yang tidak melalui RKUD sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp143.569.372.894,00;
2. Belanja BOSP-BOP PAUD sebesar Rp20.794.778.000,00 dan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp2.649.312.500,00;
3. Belanja BLUD RSUD dr. Soedirman sebesar Rp145.883.431.355,00 dan RSUD Prembun sebesar Rp69.232.277.319,00;
4. Belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp75.453.667.521,00; serta
5. Belanja BOK Puskesmas sebesar Rp28.938.173.064,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.240.808.596.285,00	2.145.786.592.502,00	(95.022.003.783,00)	95,76	2.020.914.516.871,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp2.145.786.592.502,00 atau mencapai 95,76% dari anggaran sebesar Rp2.240.808.596.285,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp124.872.075.631,00 atau 6,18% dari TA 2023. Rincian Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Pegawai	1.253.846.431.851,00	1.188.427.007.238,00	(65.419.424.613,00)	94,78	1.153.775.444.865,00
Belanja Barang dan Jasa	827.393.106.434,00	800.813.552.333,00	(26.579.554.101,00)	96,79	726.725.182.478,00
Belanja Subsidi	1.450.000.000,00	1.447.997.750,00	(2.002.250,00)	99,86	675.656.402,00
Belanja Hibah	147.997.946.000,00	145.222.914.681,00	(2.775.031.319,00)	98,12	128.698.064.603,00
Belanja Bantuan Sosial	10.121.112.000,00	9.875.120.500,00	(245.991.500,00)	97,57	11.040.168.523,00
Jumlah	2.240.808.596.285,00	2.145.786.592.502,00	(95.022.003.783,00)	95,76	2.020.914.516.871,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.253.846.431.851,00	1.188.427.007.238,00	(65.419.424.613,00)	94,78%	1.153.775.444.865,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Pegawai merupakan Belanja yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan belanja pegawai BLUD. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.188.427.007.238,00 atau 94,78% dari anggaran sebesar Rp1.253.846.431.851,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.651.562.373,00 atau 3,00% dari TA 2023. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	844.816.107.851,00	784.721.336.254,00	(60.094.771.597,00)	92,89%	750.484.534.791,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	104.362.396.000,00	103.094.506.943,00	(1.267.889.057,00)	98,79%	108.132.182.896,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	268.922.488.400,00	265.437.207.459,00	(3.485.280.941,00)	98,70%	244.365.884.474,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.633.954.000,00	33.373.298.862,00	(260.655.138,00)	99,23%	33.256.897.740,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	775.305.600,00	519.084.720,00	(256.220.880,00)	66,95%	539.554.364,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	995.360.000,00	957.762.000,00	(37.598.000,00)	96,22%	1.027.401.000,00
Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	15.389.395.600,00
Belanja Pegawai BLUD	340.820.000,00	323.811.000,00	(17.009.000,00)	95,01%	579.594.000,00
Jumlah	1.253.846.431.851,00	1.188.427.007.238,00	(65.419.424.613,00)	94,78%	1.153.775.444.865,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.188.427.007.238,00 sudah termasuk Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp323.811.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp255.783.000,00 atau 44,13% dari TA 2023. Rincian Belanja Pegawai BLUD pada BLUD RSUD Dr.Soedirman, RSUD Prembun dan 35 Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Rincian Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 per rincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran 14** dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
827.393.106.434,00	800.813.552.333,00	(26.579.554.101,00)	96,79%	726.725.182.478,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Barang dan Jasa yang direalisasikan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 digunakan untuk menunjang operasional Pemkab Kebumen dan tersebar di seluruh SKPD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp800.813.552.333,00 atau 96,79% dari anggaran sebesar Rp827.393.106.434,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp74.088.369.855,00 atau 10,19% dari TA 2023. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Barang	142.299.888.808,00	137.995.238.496,00	(4.304.650.312,00)	96,97%	113.519.910.153,00
Belanja Jasa	187.676.649.708,00	179.744.938.711,00	(7.931.710.997,00)	95,77%	153.014.641.062,00
Belanja Pemeliharaan	40.823.297.069,00	40.010.015.359,00	(813.281.710,00)	98,01%	54.731.550.207,00
Belanja Perjalanan Dinas	42.473.968.240,00	38.094.249.159,00	(4.379.719.081,00)	89,69%	50.636.739.096,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.715.379.000,00	10.989.806.000,00	(725.573.000,00)	93,81%	4.036.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	93.597.854.109,00	94.610.212.259,00	1.012.358.150,00	101,08%	85.241.751.109,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	26.711.733.000,00	25.681.457.068,00	(1.030.275.932,00)	96,14%	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	282.094.336.500,00	273.687.635.281,00	(8.406.701.219,00)	97,02%	265.543.950.851,00
Jumlah	827.393.106.434,00	800.813.552.333,00	(26.579.554.101,00)	96,79%	726.725.182.478,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp800.813.552.333,00 sudah termasuk:

1. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 10.989.806.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.953.166.000,00 atau 172,25% dari TA 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.470.779.000,00	9.313.406.000,00	(157.373.000,00)	98,34%	4.030.445.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.244.600.000,00	1.676.400.000,00	(568.200.000,00)	74,69%	6.195.000,00
Jumlah	11.715.379.000,00	10.989.806.000,00	(725.573.000,00)	93,81%	4.036.640.000,00

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 terdiri dari:
- 1) Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan dianggarkan sebesar Rp1.636.828.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.581.700.000,00 atau terserap 96,63%;
 - 2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi dianggarkan sebesar Rp19.950.500,00 dan terealisasi sebesar Rp19.906.000,00 atau 99,78%;
 - 3) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dianggarkan sebesar Rp7.450.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.350.000.000,00 atau 98,66%;
 - 4) Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp299.400.000,00 atau 99,80%;
 - 5) Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain dianggarkan sebesar Rp64.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp62.400.000,00 atau 97,50%.
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat seluruhnya berupa Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat.
2. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp94.610.212.259,00
Pengelolaan Dana BOS tidak melalui RKUD melainkan ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing sekolah di lingkungan Disdikpora Kabupaten Kebumen dan digunakan langsung untuk operasional sekolah.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2024 menyesuaikan dengan jumlah siswa dan pemakaian sisa tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.368.461.150,00 atau 10,99% dari TA 2023. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS per satuan pendidikan negeri dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
3. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp273.687.635.281,00 merupakan belanja operasional barang dan jasa pada BLUD RSUD Dr. Soedirman, RSUD Prembun dan 35 Puskesmas.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.143.684.430,00 atau 3,07% dari TA 2023. Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD per BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 per rincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran 18** dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.450.000.000,00	1.447.997.750,00	(2.002.250,00)	99,86%	675.656.402,00

Pemkab Kebumen mengalokasikan dana untuk program subsidi kepada BUMD sebesar Rp1.447.997.750,00. Program subsidi kepada BUMD dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan. Pedoman pelaksanaan Belanja Subsidi bunga diatur melalui Peraturan Kepala Daerah berikut:

1. Perbup Kebumen Nomor 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024; dan
2. Perbup Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024.

Program subsidi bunga tersebut disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 dan 2023

Lembaga Keuangan Penyalur	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00%	173.263.827,00
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00%	300.000.000,00
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00%	72.409.584,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	1.050.000.000,00	1.047.997.750,00	(2.002.250,00)	99,81%	129.982.991,00
Jumlah	1.450.000.000,00	1.447.997.750,00	(2.002.250,00)	99,86%	675.656.402,00

Belanja Subsidi direalisasikan sesuai SP2D berikut:

- i. SP2D Nomor 33.05/04.0/000013/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp25.000.000,00.
- ii. SP2D Nomor 33.05/04.0/000017/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp350.000.000,00.
- iii. SP2D Nomor 33.05/04.0/000014/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp25.000.000,00.
- iv. SP2D Nomor 33.05/04.0/000039/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebesar Rp200.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- v. SP2D Nomor 33.05/04.0/000045/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/PPR1/9/2024 tanggal 03 September 2024 sebesar Rp850.000.000,00.

Atas realisasi SP2D tersebut, terdapat pengembalian sisa anggaran subsidi bunga dari PT Aneka Usaha Kebumen Jaya sebesar Rp2.002.250,00.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
147.997.946.000,00	145.222.914.681,00	(2.775.031.319,00)	98,12	128.698.064.603,00

Rekening Belanja Hibah digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp145.222.914.681,00 atau 98,12% dari anggaran sebesar Rp147.997.946.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.545.345.078,00 atau 12,86% dari TA 2023. Rincian Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat					
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	37.031.517.000,00	36.833.950.580,00	(197.566.420,00)	99,47	22.225.540.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	54.391.291.000,00	53.031.978.729,00	(1.359.312.271,00)	97,50	76.328.475.383,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	-	41.146.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.028.250.000,00	33.157.504.720,00	(1.870.745.280,00)	94,66	27.229.635.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Hibah kepada Koperasi	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	100,00	423.392.220,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.300.000.000,00	1.100.000.000,00	(200.000.000,00)	84,62	-
Belanja Hibah Dana BOS					
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.317.100.000,00	6.867.039.276,00	549.939.276,00	108,71	385.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	8.275.157.000,00	8.620.597.876,00	345.440.876,00	104,17	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.134.631.000,00	2.134.631.000,00	-	100,00	2.064.876.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP					
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.370.000.000,00	2.327.212.500,00	(42.787.500,00)	98,19	-
Jumlah	147.997.946.000,00	145.222.914.681,00	(2.775.031.319,00)	98,12	128.698.064.603,00

Rincian Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Realisasi Hibah TA 2024 sebesar Rp145.222.914.681,00 sudah termasuk:

- Belanja BOSP-BOP PAUD sebesar Rp20.744.283.000,00 rincian penerima pada **Lampiran 21**;
- Belanja Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp2.327.212.500,00 rincian penerima pada **Lampiran 22**;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.134.631.000,00 yang diberikan kepada sembilan partai politik dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Partai Nasional Demokrat	232.029.250,00	232.029.250,00	-	100,00	162.873.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	412.938.250,00	412.938.250,00	-	100,00	356.487.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	131.178.500,00	131.178.500,00	-	100,00	126.141.000,00
PDI Perjuangan	473.042.000,00	473.042.000,00	-	100,00	464.832.000,00
Partai Golongan Karya	186.593.500,00	186.593.500,00	-	100,00	228.741.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	280.512.250,00	280.512.250,00	-	100,00	281.346.000,00
Partai Demokrat	112.424.750,00	112.424.750,00	-	100,00	133.671.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Partai Amanat Nasional	144.599.750,00	144.599.750,00	-	100,00	146.091.000,00
Partai Persatuan Pembangunan	161.312.750,00	161.312.750,00	-	100,00	164.694.000,00
Jumlah	2.134.631.000,00	2.134.631.000,00	-	100,00	2.064.876.000,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
10.121.112.000,00	9.875.120.500,00	(245.991.500,00)	97,57%	11.040.168.523,00

Rekening Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial TA 2024 pada masing-masing SKPD dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa penganggaran Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp 9.875.120.500,00 atau 97,57% dari anggaran sebesar Rp10.121.112.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.165.048.023,00 atau 10,55% dari TA 2023. Rincian Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.541.612.000,00	9.298.602.500,00	(243.009.500,00)	97,45	9.022.309.473,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	379.500.000,00	376.518.000,00	(2.982.000,00)	99,21	546.900.150,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	1.470.958.900,00
Jumlah	10.121.112.000,00	9.875.120.500,00	(245.991.500,00)	97,57	11.040.168.523,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.2.2 Belanja Modal

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
288.393.970.715,00	278.735.832.493,00	(9.658.138.222,00)	96,65%	278.842.913.538,00

Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp278.735.832.493,00 atau mencapai 96,98% dari anggaran sebesar Rp288.393.970.715,00. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp107.081.045,00 atau 0,04% dari realisasi TA 2023. Rincian Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM-Tanah	5.633.135.000,00	5.547.762.848,00	(85.372.152,00)	98,48	1.400.551.240,00
BM-Peralatan dan Mesin	120.419.785.636,00	117.947.198.909,00	(2.472.586.727,00)	97,95	65.799.396.633,00
BM-Gedung dan Bangunan	41.747.023.424,00	40.299.475.917,00	(1.447.547.507,00)	96,53	75.265.208.901,00
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi	105.852.413.000,00	102.857.035.252,00	(2.995.377.748,00)	97,17	124.921.560.732,00
BM-Aset Tetap Lainnya	14.701.613.655,00	12.044.972.327,00	(2.656.641.328,00)	81,93	11.456.196.032,00
BM-Aset Lainnya	40.000.000,00	39.387.240,00	(612.760,00)	98,47	-
Jumlah	288.393.970.715,00	278.735.832.493,00	(9.658.138.222,00)	96,65	278.842.913.538,00

Tabel 5.1.30 menunjukkan bahwa penyerapannya tertinggi Belanja Modal adalah Belanja Modal Tanah sebesar 98,48% dari anggaran. Sedangkan penyerapan terendah adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 81,93% dari anggaran. Namun jika melihat dari besaran nilai sisa anggaran yang tidak terserap maka Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan memiliki nilai sisa anggaran terbesar yaitu sebesar Rp2.995.377.748,00.

Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 42,32% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 36,90%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 14,46%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 4,32%, Belanja Modal Tanah sebesar 1,99% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 0,01%.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sudah termasuk realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp33.881.823.483,00 dan Belanja Modal BLUD sebesar Rp16.557.929.914,00.

Rincian Belanja Modal dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.633.135.000,00	5.547.762.848,00	(85.372.152,00)	98,48	1.400.551.240,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp5.547.762.848,00 atau 98,48% dari anggaran sebesar Rp5.633.135.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.147.211.608,00 atau 296,11% dari TA 2023. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 seluruhnya merupakan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.301 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
DPUPR	5.633.135.000,00	5.547.762.848,00	(85.372.152,00)	98,48	1.400.551.240,00
Jumlah	5.633.135.000,00	5.547.762.848,00	(85.372.152,00)	98,48	1.400.551.240,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
120.419.785.636,00	117.947.198.909,00	(2.472.586.727,00)	97,95%	65.799.396.633,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp117.947.198.909,00 atau 97,95% dari anggaran sebesar Rp120.419.785.636,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp52.147.802.276,00 atau 79,25% dari TA 2023. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Alat Besar	1.127.605.000,00	1.112.154.251,00	(15.450.749,00)	98,63	1.762.794.010,00
BM Alat Angkutan	11.857.959.000,00	11.517.143.795,00	(340.815.205,00)	97,13	9.589.913.800,00
BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	390.725.000,00	384.347.470,00	(6.377.530,00)	98,37	40.290.000,00
BM Alat Pertanian	289.450.000,00	280.685.000,00	(8.765.000,00)	96,97	278.416.400,00
BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.689.429.000,00	37.355.077.300,00	(334.351.700,00)	99,11	7.280.936.190,00
BM Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.023.759.900,00	1.992.505.700,00	(31.254.200,00)	98,46	1.360.636.400,00
BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.089.144.000,00	15.778.762.207,00	(310.381.793,00)	98,07	16.139.933.075,00
BM Alat Laboratorium	657.750.000,00	637.175.000,00	(20.575.000,00)	96,87	2.304.399.360,00
BM Komputer	17.744.270.000,00	17.464.832.500,00	(279.437.500,00)	98,43	25.979.667.398,00
BM Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	60.543.500,00
BM Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	15.192.000,00
BM Rambu-Rambu	38.676.000,00	38.600.000,00	(76.000,00)	99,80	984.311.500,00
BM Peralatan Olahraga	-	-	-	-	2.363.000,00
BM Peralatan dan Mesin BOS	16.540.051.000,00	16.516.568.538,00	(23.482.462,00)	99,86	-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Peralatan dan Mesin BOSP	5.273.913.236,00	5.408.580.618,00	134.667.382,00	102,55	-
BM Peralatan dan Mesin BLUD	10.697.053.500,00	9.460.766.530,00	(1.236.286.970,00)	88,44	-
Jumlah	120.419.785.636,00	117.947.198.909,00	(2.472.586.727,00)	97,95	65.799.396.633,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 per rincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran 24** dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp117.947.198.909,00 sudah termasuk:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp16.516.568.538,00 dengan rincian pada **Lampiran 26A**;
2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp5.408.580.618,00 dengan rincian pada **Lampiran 26B**;
3. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp9.460.766.530,00 dengan rincian pada **Lampiran 27**;

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran (Rp)	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
41.747.023.424,00	40.299.475.917,00	(1.447.547.507,00)	96,53%	75.265.208.901,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp40.299.475.917,00 atau 96,53% dari anggaran Rp 41.747.023.424,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp34.965.732.984,00 atau 46,46% dari TA 2023. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Bangunan Gedung	35.417.925.424,00	34.203.672.173,00	(1.214.253.251,00)	96,57%	75.102.865.901,00
BM Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-	162.343.000,00
BM Gedung dan Bangunan BLUD	6.329.098.000,00	6.095.803.744,00	(233.294.256,00)	96,31%	-
Jumlah	41.747.023.424,00	40.299.475.917,00	(1.447.547.507,00)	96,53%	75.265.208.901,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 per subrincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran 28** dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp 40.299.475.917,00 sudah termasuk realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp6.095.803.744,00 dengan rincian pada **Lampiran 30**;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
105.852.413.000,00	102.857.035.252,00	(2.995.377.748,00)	97,17%	124.921.560.732,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp102.857.035.252,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp105.852.413.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp22.064.525.480,00 atau 17,66% dari TA 2023. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Jalan dan Jembatan	67.488.658.000,00	66.006.347.200,00	(1.482.310.800,00)	97,80%	83.228.778.300,00
BM Bangunan Air	16.489.906.000,00	15.860.986.314,00	(628.919.686,00)	96,19%	20.487.819.697,00
BM Instalasi	577.032.000,00	572.419.000,00	(4.613.000,00)	99,20%	1.152.751.000,00
BM Jaringan	20.242.817.000,00	19.416.523.098,00	(826.293.902,00)	95,92%	20.052.211.735,00
BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.054.000.000,00	1.000.759.640,00	(53.240.360,00)	94,95%	-
Jumlah	105.852.413.000,00	102.857.035.252,00	(2.995.377.748,00)	97,17%	124.921.560.732,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023 per rincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran 31** dan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Dinkes PPKB	1.054.000.000,00	1.000.759.640,00	(53.240.360,00)	94,95	1.973.402.633,00
DPUPR	83.978.564.000,00	81.867.333.514,00	(2.111.230.486,00)	97,49	103.443.572.497,00
Disperkimhub	20.242.817.000,00	19.416.523.098,00	(826.293.902,00)	95,92	17.046.932.102,00
Distapang	-	-	-	-	-
DLHKP	577.032.000,00	572.419.000,00	(4.613.000,00)	99,20	316.184.000,00
Disperindag KUKM	-	-	-	-	1.787.500.000,00
Itda	-	-	-	-	78.944.000,00
Kec. Karanganyar	-	-	-	-	275.025.500,00
Jumlah	105.852.413.000,00	102.857.035.252,00	(2.995.377.748,00)	97,17	124.921.560.732,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp102.857.035.252,00 sudah termasuk realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp 1.000.759.640,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PKM Alian	-	-	-	-	49.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PKM Ambal I	-	-	-	-	-
PKM Karangsambung	-	-	-	-	-
PKM Klirong I	-	-	-	-	5.313.000,00
PKM Petanahan	-	-	-	-	3.480.000,00
PKM Poncowarno	-	-	-	-	7.000.000,00
PKM Prembun	-	-	-	-	-
PKM Sadang	-	-	-	-	10.500.000,00
PKM Sruweng	-	-	-	-	2.225.000,00
PKM Karangsambung	30.000.000,00	29.750.000,00	(250.000,00)	99,17	-
PKM Sempor II	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	-
RSUD dr Soedirman	1.000.000.000,00	951.009.640,00	(48.990.360,00)	95,10	-
Jumlah	1.050.000.000,00	1.000.759.640,00	(49.240.360,00)	95,31	78.468.000,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
14.701.613.655,00	12.044.972.327,00	(2.656.641.328,00)	81,93%	11.456.196.032,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp12.044.972.327,00 atau 81,93% dari anggaran sebesar Rp14.701.613.655,00. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp588.776.295,00 atau 5,14% dari TA 2023. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	88.500.000,00	87.698.000,00	(802.000,00)	99,09%	10.995.291.032,00
Belanja Modal Buku Umum	-	-	-	-	10.873.160.652,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	88.500.000,00	87.698.000,00	(802.000,00)	99,09%	122.130.380,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	-	-	-	-	460.905.000,00
Belanja Modal Alat Musik	-	-	-	-	460.905.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.759.273.000,00	7.750.243.516,00	(9.029.484,00)	99,88%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.759.273.000,00	7.750.243.516,00	(9.029.484,00)	99,88%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.852.840.655,00	4.206.430.811,00	(2.646.409.844,00)	61,38%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.852.840.655,00	4.206.430.811,00	(2.646.409.844,00)	61,38%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00%	-
Jumlah	14.701.613.655,00	12.044.972.327,00	(2.656.641.328,00)	81,93%	11.456.196.032,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 32**:

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp12.084.359.567,00 sudah termasuk realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp7.750.243.516,00 dengan rincian pada **Lampiran 33**, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp4.206.430.811,00 dengan rincian pada **Lampiran 34**, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp600.000,00 pada RSUD Prembun.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
40.000.000,00	39.387.240,00	(612.760,00)	98,47%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp39.387.240,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% dari TA 2023 karena pada TA 2023 Pemkab Kebumen tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 seluruhnya merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.000.000.000,00	323.000.000,00	(1.677.000.000,00)	16,15%	409.940.801,00

Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2024 dianggarkan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi BTT TA 2024 sebesar Rp323.000.000,00 atau 16,15% dari nilai anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp86.940.801,00 atau 21,21% dari TA 2023. Rincian BTT disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.38 Anggaran dan Realisasi BTT TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pengajuan kelebihan pembayaran PBB P2 Tahun 2021	2.000.000.000,00	-	(1.677.000.000,00)		728.875,00
Pengembalian Dana BOSP TA 2020-2022		-			85.211.926,00
Bantuan kepada korban bencana alam		175.000.000,00			103.000.000,00
Bantuan kepada korban kebakaran		120.000.000,00			200.000.000,00
Bantuan orang kehabisan bekal/PMKS		21.000.000,00			21.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Penanganan darurat bencana dampak banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kab. Kebumen Tahun 2022		-			-
Pengajuan kelebihan pembayaran BPHTB Tahun 2021		7.000.000,00			-
Jumlah	2.000.000.000,00	323.000.000	(1.677.000.000,00)	16,15	409.940.801,00

1. Bantuan kepada korban bencana alam sebesar Rp175.000.000,00 merupakan pemberian bantuan kepada korban bencana alam yang disalurkan dalam enam tahap sesuai dengan Persetujuan Bupati Kebumen No. 400.9.10/1299 tanggal 21 Mei 2024, Persetujuan Bupati Kebumen No. 400.9.10/1443 tanggal 28 Juni 2024, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.10/1540 tanggal 22 Juli 2024, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.10/3242 tanggal 12 November 2024, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.10/3269 tanggal 20 November 2024, dan Persetujuan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.10/3326 tanggal 10 Desember 2024;
2. Bantuan kepada korban kebakaran sebesar Rp120.000.000,00 merupakan merupakan pemberian bantuan kepada korban kebakaran yang disalurkan dalam delapan tahap sesuai dengan Persetujuan Bupati Kebumen No. 400.9.9/352 2024 tanggal 22 Februari 2024, Persetujuan Bupati Kebumen No. 400.9.9/1300 tanggal 21 Mei 2024, Persetujuan Bupati Kebumen No. 400.9.9/1440 tanggal 26 Juni 2024, Persetujuan Bupati Kebumen No. 400.9.9/2600 tanggal 8 Agustus 2024, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.9/3097 tanggal 15 Oktober 2024, Persetujuan Bupati Kebumen nomor : 400.9.9/3173 tanggal 28 Oktober 2024, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.9/3241 tanggal 12 November 2024, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.9/3327 tanggal 10 Desember 2024;
3. Bantuan orang kehabisan bekal/PMKS sebesar Rp21.000.000,00 merupakan) Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam hal ini diberikan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan biaya.;
4. Pengajuan kelebihan pembayaran BPHTB Tahun 2021 sebesar Rp7.000.000,00 merupakan pengembalian atas pembayaran Pajak BPHTB Tahun 2021 atas nama Nugroho Bayu Aji dengan NOP 33.05.120.012.0020.0.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.3 Transfer

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
706.334.577.000,00	701.849.108.462,00	(4.485.468.538,00)	99,36%	676.974.543.619,00

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp706.334.577.000,00 dan terealisasi sebesar 99,36% atau sebesar Rp701.849.108.462,00 yang seluruhnya merupakan Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Realisasi Transfer TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.874.564.843,00 atau 3,67% dari TA 2023.

5.1.3.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
706.334.577.000,00	701.849.108.462,00	(4.485.468.538,00)	99,36%	676.974.543.619,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2024 sebesar Rp701.849.108.462,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp706.334.577.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.874.564.843,00 atau 3,67% dari TA 2023. Rincian Transfer/Bagi Hasil ke Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.39 Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Bagi Hasil Pajak	12.984.387.000,00	12.930.080.000,00	(54.307.000,00)	99,58%	11.224.696.000,00
Bagi Hasil Retribusi	3.017.804.000,00	3.004.239.925,00	(13.564.075,00)	99,55%	2.518.470.881,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	690.332.386.000,00	685.914.788.537,00	(4.417.597.463,00)	99,36%	663.231.376.738,00
Jumlah	706.334.577.000,00	701.849.108.462,00	(4.485.468.538,00)	99,36%	676.974.543.619,00

5.1.3.1.1 Bagi Hasil Pajak

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12.984.387.000,00	12.930.080.000,00	(54.307.000,00)	99,58%	11.224.696.000,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp12.930.080.000,00 atau 99,58% dari anggaran sebesar Rp12.984.387.000,00 yang seluruhnya merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.705.384.000,00 atau 15,19% dari TA 2023.

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa disalurkan kepada 449 desa berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 35 Tahun 2024 tanggal 07 Juni 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 35**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.1.3.1.2 Bagi Hasil Retribusi

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3.017.804.000,00	3.004.239.925,00	(13.564.075,00)	99,55%	2.518.470.881,00

Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2024 sebesar Rp3.004.239.925,00 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp3.017.804.000,00 yang seluruhnya merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp485.769.044,00 atau 19,29% dari TA 2023.

Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 449 desa berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 35 Tahun 2024 tanggal 07 Juni 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

5.1.3.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
690.332.386.000,00	685.914.788.537,00	(4.417.597.463,00)	99,36%	663.231.376.738,00

Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 sebesar Rp685.914.788.537,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp690.332.386.000,00 seluruhnya merupakan Bantuan Keuangan. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.683.411.799,00 atau 3,42% dari TA 2023. Rincian Bagi Hasil Pendapatan Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.40 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-	634.847.198.738,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-	634.847.198.738,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	690.332.386.000,00	685.914.788.537,00	-	-	28.384.178.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau	-	-	-	-	28.384.178.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Kabupaten/Kota kepada Desa					
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	43.087.900.000,00	40.480.900.000,00	(2.607.000.000,00)	93,95%	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	463.030.927.000,00	461.258.494.000,00	(1.772.433.000,00)	99,62%	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	184.213.559.000,00	184.175.394.537,00	(38.164.463,00)	99,98%	-
Jumlah	690.332.386.000,00	685.914.788.537,00	(4.417.597.463,00)	99,36%	663.231.376.738,00

1. Pada TA 2024 dilakukan penyesuaian rekening belanja untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang semula Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa menjadi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Tabel 5.1.41 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Alokasi Dana Desa (ADD)	184.213.559.000,00	184.175.394.537,00	(38.164.463,00)	99,98%	177.678.305.538,00
Dana Desa	463.030.927.000,00	461.258.494.000,00	(1.772.433.000,00)	99,62%	455.959.893.200,00
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	1.209.000.000,00
Jumlah	647.244.486.000,00	645.433.888.537,00	(1.810.597.463,00)	99,72%	586.702.739.500,00

- a. ADD sebesar Rp184.175.394.537,00
Pelaksanaan Bantuan Keuangan ADD berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang ADD di Kabupaten Kebumen TA 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Kebumen Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang ADD di Kabupaten Kebumen TA 2024.
Realisasi Bantuan Keuangan ADD TA 2024 termasuk untuk Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa sebesar Rp1.310.379.470,00. Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS merupakan pemotongan iuran BPJS perangkat desa



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan. Iuran tersebut dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Berkaitan dengan hal tersebut PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah sebelum ADD ditransfer ke rekening Kas Desa untuk kemudian dibayarkan kepada BPJS. Rincian ADD per desa dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

b. Dana Desa sebesar Rp461.258.494.000,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi pengeluaran Dana Desa TA 2024 sama dengan realisasi penerimaan Dana Desa TA 2024 sebagaimana disajikan pada catatan nomor 5.1.1.2.2.2 akun Dana Desa yaitu sebesar Rp461.258.494.000,00. Dana Desa TA 2024 tersebut disalurkan langsung dari RKUN kepada 449 desa berdasarkan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Rincian Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

2. Pada TA 2024 dilaksanakan perubahan nomenklatur Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa menjadi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa. Realisasi pada TA 2024 sebesar Rp40.480.900.000,00 atau 93,95% dari anggaran sebesar Rp43.087.900.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.384.178.000,00 atau 42,62% dari TA 2023. Rincian Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.42 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Infrastruktur	39.979.900.000,00	37.372.900.000,00	(2.607.000.000,00)	93,48%	25.884.178.000,00
Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.108.000.000,00	3.108.000.000,00	-	100,00%	-
Operasional penyelenggaraan event/festival	-	-	-	-	2.500.000.000,00
Jumlah	43.087.900.000,00	40.480.900.000,00	(2.607.000.000,00)	93,95%	28.384.178.000,00

a. Infrastruktur sebesar Rp37.372.900.000,00

Bantuan keuangan khusus pembangunan infrastruktur TA 2023 diberikan kepada 194 pemerintah desa dalam 302 kegiatan yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/754 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2024 dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/869 Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/869 Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2024. Rincian Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Infrastruktur dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

- b. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebesar Rp3.108.000.000,00
Bantuan keuangan khusus penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan kepada 94 pemerintah desa untuk penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.3/19 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kebumen TA 2024. Rincian Bantuan Keuangan untuk Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

5.1.4 Pembiayaan

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
174.840.225.000,00	174.965.945.769,98	125.720.769,98	100,07%	240.811.890.877,98

Rekening Pembiayaan digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp174.840.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.965.945.769,98 atau 100,07%. Realisasi Pembiayaan TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.845.945.108,00 atau 27,34% dari TA 2023. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.43 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Penerimaan Pembiayaan	179.440.225.000,00	179.270.945.769,98	(169.279.230,02)	99,91%	283.142.890.877,98
Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000,00	4.305.000.000,00	(295.000.000,00)	93,59%	42.331.000.000,00
Pembiayaan Neto	174.840.225.000,00	174.965.945.769,98	125.720.769,98	100,07%	240.811.890.877,98

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
179.440.225.000,00	179.270.945.769,98	(169.279.230,02)	99,91%	283.142.890.877,98

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp179.270.945.769,98 atau mencapai 99,91% dari anggaran sebesar Rp179.440.225.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp103.871.945.108,00 atau 36,69% dari TA 2023. Rincian Penerimaan Pembiayaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.44 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
SiLPA tahun sebelumnya	164.691.485.000,00	164.691.485.769,98	769,98	100,00	258.817.350.877,98
Pencairan Dana Cadangan	12.648.740.000,00	12.774.460.000,00	125.720.000,00	100,99	22.225.540.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	1.805.000.000,00	(295.000.000,00)	85,95	2.100.000.000,00
Jumlah	179.440.225.000,00	179.270.945.769,98	(169.279.230,02)	99,91	283.142.890.877,98

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
164.691.485.000,00	164.691.485.769,98	769,98	100,00%	258.817.350.877,98

SiLPA Tahun Sebelumnya merupakan penggunaan SiLPA TA 2023 yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2024 berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen TA 2024 sebesar Rp164.691.485.000,00.

Realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya TA 2024 sebesar Rp164.691.485.769,98 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp164.691.485.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.125.865.108,00 atau 36,37% dari TA 2023. Rincian SiLPA Tahun Sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.45 Anggaran dan Realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pelampauan Penerimaan PAD	5.788.744.000,00	5.788.744.000,00	-	100,00%	15.525.738.000,00
Penghematan Belanja	104.535.233.000,00	104.535.233.769,98	769,98	100,00%	132.511.670.877,98
Sisa Belanja Lainnya	49.367.508.000,00	49.367.508.000,00	-	100,00%	87.496.345.000,00
Penarikan SiLPA BLUD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00%	23.283.597.000,00
Jumlah	164.691.485.000,00	164.691.485.769,98	769,98	100,00%	258.817.350.877,98

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12.648.740.000,00	12.774.460.000,00	125.720.000,00	100,99%	22.225.540.000,00

Pada TA 2022 dan 2023 telah dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp35.000.000.000,00. Pencairan dilakukan pada TA 2023 sebesar Rp22.225.540.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp12.744.460.000,00.

Pencairan Dana Cadangan TA 2024 sebesar Rp12.744.460.000,00 berdasarkan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan NPHD antara Pemkab Kebumen dengan:

1. KPU Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2023 dan 551/KU07-50/3305/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
2. Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2023 dan 1179/HK.02.00/K.JT-12/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar 40% disalurkan ke KPU sebesar Rp18.157.708.000,00 dan Bawaslu sebesar Rp4.067.832.000,00.

5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.100.000.000,00	1.805.000.000,00	(295.000.000,00)	85,95%	2.100.000.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan pengembalian atas pemberian pinjaman dari:

1. 27 Gapoktan atau Poktan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 500.6.1/106 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen TA 2024 sebesar Rp1.205.000.000,00;
2. Empat Rukun Nelayan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 500.5.1/84 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen TA 2024 sebesar Rp600.000.000,00.

Pemkab Kebumen menyediakan Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan dalam APBD TA 2024 dan diatur dalam Perbup Kebumen Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada saat musim ikan.

Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.600.000.000,00	4.305.000.000,00	(295.000.000,00)	93,59%	42.331.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp4.305.000.000,00 atau mencapai 93,59% dari anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp38.026.000.000,00 atau 89,83% dari TA 2023. Rincian Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.1.46 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00%	20.231.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	1.805.000.000,00	(295.000.000,00)	85,95%	2.100.000.000,00
Jumlah	4.600.000.000,00	4.305.000.000,00	(295.000.000,00)	93,59%	42.331.000.000,00

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000.000.000,00

Berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, dana yang disisihkan sebesar Rp35.000.000.000,00 dalam dua tahun anggaran, yaitu TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pada TA 2022 dan 2023 telah dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp35.000.000.000,00. Pencairan dilakukan pada TA 2023 sebesar Rp22.225.540.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp12.744.460.000,00.

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00%	20.231.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen.

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda TA 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.731.000.000,00 atau 87,64% dari TA 2023. Rincian Penyertaan Modal (Investasi) Pemda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.47 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PT BPD Jateng	-	-	-	-	10.731.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	-	-	-	-	1.500.000.000,00
PT BPR BKK Kebumen	-	-	-	-	-
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	-	-	-	-	500.000.000,00
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	-	-	-	-	4.000.000.000,00
PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	-	-	-	-	1.000.000.000,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00%	2.500.000.000,00
Jumlah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00%	20.231.000.000,00

5.1.4.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah

TA 2024				TA 2023
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.100.000.000,00	1.805.000.000,00	(295.000.000,00)	85,95%	2.100.000.000,00

Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Kebumen Nomor 79 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen.

Pinjaman Daerah yang diberikan berbentuk dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Tani (Poktan) untuk modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau dari petani dan harus dikembalikan ke RKUD dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 terdiri dari:

1. Dana talangan pangan sebesar Rp1.205.000.000,00 diberikan kepada 27 Gapoktan atau Poktan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 500.6.1/106 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen TA 2024. Pemberian pinjaman dicairkan dengan SP2D Nomor 33.05/04.0/000003/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 tanggal 31 Mei 2024.
2. Dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp600.000.000,00 kepada empat Rukun Nelayan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 500.5.1/84 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen TA 2024. Pemberian pinjaman



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

dicairkan dengan SP2D Nomor
33.05/04.0/000002/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 tanggal 25 April
2024.

Rincian Gapoktan/Poktan Penerima Pinjaman Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

5.1.5 SiLPA

TA 2024				TA 2023	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
-	185.965.691.946,98	185.965.691.946,98	-	164.691.485.769,98	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp185.965.691.946,98 jika dibandingkan TA 2023, SiLPA TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp21.274.206.177,00 atau 12,92%. Perhitungan SiLPA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.48 Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024				Realisasi TA 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan	3.062.696.919.000,00	3.137.694.279.634,00	74.997.360.634,00	102,45	2.901.021.509.721,00
Belanja	2.531.202.567.000,00	2.424.845.424.995,00	(106.357.142.005,00)	95,80	2.300.167.371.210,00
Transfer	706.334.577.000,00	701.849.108.462,00	(4.485.468.538,00)	99,36	676.974.543.619,00
Jumlah Belanja dan Transfer	3.237.537.144.000,00	3.126.694.533.457,00	(110.842.610.543,00)	96,58	2.977.141.914.829,00
Surplus/(Defisit)	(174.840.225.000,00)	10.999.746.177,00	185.839.971.177,00	-6,29	(76.120.405.108,00)
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	179.440.225.000,00	179.270.945.769,98	(169.279.230,02)	99,91	283.142.890.877,98
Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000,00	4.305.000.000,00	(295.000.000,00)	93,59	42.331.000.000,00
Pembiayaan Netto	174.840.225.000,00	174.965.945.769,98	125.720.769,98	100,07	240.811.890.877,98
SiLPA	-	185.965.691.946,98	185.965.691.946,98	-	164.691.485.769,98

Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.49 Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024			SiLPA TA 2023 (Rp)
	Saldo Kas (Rp)	Saldo Utang PFK (Rp)	SiLPA (Rp)	
Kas di Kas Daerah	150.457.185.590,00	-	150.457.185.590,00	113.015.912.113,00
Kas di Bendahara Penerimaan	200,00	-	200,00	212.936.280,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.264.100,00	-	5.264.100,00	-
Kas di BLUD	32.804.386.756,98	-	32.804.386.756,98	49.367.509.581,98
Kas Dana BOS	605.545.364,00	-	605.545.364,00	886.724.909,00
Kas Lainnya	2.093.309.936,00	-	2.093.309.936,00	1.208.402.886,00
Jumlah	185.965.691.946,98	-	185.965.691.946,98	164.691.485.769,98

SiLPA TA 2024 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp150.457.185.590,00 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1.50 Rincian SiLPA di Kas Daerah TA 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Dana Transfer dan Mandatory	
	DAU Earmarked	
	- Bidang Kelurahan	25.366.072,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah
	- Bidang Kesehatan	250.873.125,00
	- Bidang Pendidikan	1.077.705.935,00
	- Bidang Pekerjaan Umum	515.970.500,00
	DAU Tambahan untuk Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	40.001.861.000,00
	DAK FISIK	390.510.689,00
	DAK NON FISIK	
	- Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara (TPG ASN)	4.591.375.574,00
	- Tamsil Guru PNSD	878.020.906,00
	- BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	276.681.613,00
	- BOKB-KB	1.207.677.649,00
	- Fasilitas Penanaman Modal	38.023.410,00
	- PK2UKM	6.262.269,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.244.000,00
	INSENTIF FISKAL	331.268.970,00
	DBHCHT	288.692.052,00
	HIBAH	
	- Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	3.309.187.000,00
	- Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	15.253.822.000,00
	Sub Jumlah	68.474.542.764,00
2	Pelampauan Pendapatan	
	- Pendapatan Pajak Daerah	104.779.056,00
	- Lain-lain PAD yang Sah	378.428.247,00
	Sub Jumlah	483.207.303,00
3	Belanja Tidak Terserap	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	66.136.116.815,00
	- Belanja Subsidi	2.002.250,00
	- Belanja Hibah	3.492.128.971,00
	- Belanja Bantuan Sosial	245.991.500,00
	- Belanja Tak Terduga	1.677.000.000,00
	- Belanja Bantuan Keuangan	4.417.597.463,00
	- Belanja Bagi Hasil	67.871.075,00
	Sub Jumlah	76.038.708.074,00
4	Sisa Tender	4.825.439.616,00
5	Penghematan Belanja	635.287.833,00
	Jumlah SiLPA di Kas Daerah	150.457.185.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

5.2. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

SAL Awal per 31 Desember 2024 sebesar Rp164.691.485.769,98 mengalami penurunan sebesar Rp94.125.865.108,00 atau 36,37% dari SAL Awal per 31 Desember 2023. SAL Awal per 31 Desember 2024 merupakan SiLPA tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit anggaran pada Perubahan APBD TA 2024.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp164.691.485.769,98 mengalami penurunan sebesar Rp94.125.865.108,00 atau 36,37% dari Penggunaan SAL per 31 Desember 2023.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.965.691.946,98 mengalami kenaikan sebesar Rp21.274.206.177,00 atau 12,92% dari SiLPA per 31 Desember 2023.

SiLPA per 31 Desember 2024 merupakan hasil penjumlahan dari realisasi Surplus/(Defisit) Anggaran sebesar Rp10.999.746.177,00 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp174.965.945.769,98 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp185.965.691.946,98.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.965.691.946,98 mengalami kenaikan sebesar Rp21.274.206.177,00 atau 12,92% dari SAL Akhir per 31 Desember 2023.

Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023 sebagaimana disajikan pada catatan nomor 5.1.5 akun SiLPA pada Tabel 5.1.48 dan Tabel 5.1.49.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.3. Neraca

5.3.1 Aset

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp4.840.268.373.982,34	Rp4.516.881.288.095,62

Saldo Aset terdiri dari:

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Aset Lancar	274.682.452.175,49	246.271.477.311,60	28.410.974.863,89	11,54
Investasi Jangka Panjang	213.074.780.907,39	204.963.341.996,07	8.111.438.911,32	3,96
Aset Tetap	4.233.904.853.988,46	3.936.149.530.596,51	297.755.323.391,95	7,56
Dana Cadangan	0,00	12.774.460.000,00	(12.774.460.000,00)	(100,00)
Aset Lainnya	118.606.286.911,00	116.722.478.191,44	1.883.808.719,56	1,61
Jumlah	4.840.268.373.982,34	4.516.881.288.095,62	323.387.085.886,72	7,16

Saldo Aset tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp323.387.085.886,72 atau 7,16% dibandingkan dengan tahun 2023 antara lain karena penghapusan BMD.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp274.682.452.175,49	Rp246.271.477.311,60

Aset Lancar merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pemkab Kebumen mengklasifikasikan Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

Saldo Aset Lancar terdiri dari:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Kas di Kas Daerah	150.457.185.590,00	113.015.912.113,00	37.441.273.477,00	33,13
Kas di Bendahara Penerimaan	5.264.100,00	212.936.280,00	(207.672.180,00)	(97,53)
Kas di Bendahara Pengeluaran	200,00	0,00	200,00	
Kas di BLUD	32.804.386.756,98	49.367.509.581,98	(16.563.122.825,00)	(33,55)
Kas Lainnya	0,00	1.208.402.886,00	0,00	0,00
Kas Dana BOS	605.545.364,00	893.163.639,00	(287.618.275,00)	(32,20)
Kas Dana BOK Puskesmas	2.093.309.936,00	0,00	2.093.309.936,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Pajak	12.513.421.142,00	9.358.194.241,00	3.155.226.901,00	33,72
Piutang Retribusi	4.733.374.161,00	4.359.106.740,00	374.267.421,00	8,59
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	25.109.228.673,44	21.073.792.846,36	4.035.435.827,08	19,15
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0	0,00	
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	6.047.212.575,00	(6.047.212.575,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang	(12.849,15)	(10.866.464.784,45)	(1.982.865.162,70)	18,25
Beban Dibayar Dimuka	17.535.470,04	33.705.587,11	(16.170.117,07)	(47,97)
Persediaan	59.192.407.479,18	51.568.005.606,60	7.624.401.872,58	14,79
Jumlah	274.682.328.925,49	246.271.477.311,60	29.619.254.499,89	12,03

Saldo Aset Lancar tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp98.905.8 atau 28,65% dibandingkan dengan tahun 2022 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp150.457.185.590,00	Rp113.015.912.113,00

Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp150.457.185.590,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9. Nomor rekening tersebut merupakan RKUD Kabupaten Kebumen TA 2023 yang ditetapkan dengan SK Bupati Kebumen Nomor 900/4 Tahun 2023 tentang Penunjukkan PT Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan RKUD Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Sedangkan Kas di Kas Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, hal ini sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Deposito dan/atau Investasi Jangka Pendek harus disetor ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023	31 Desember 2023
Rp5.264.100,00	Rp212.936.280,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Kas di Bendahara Penerimaan pada Disparbud sebesar Rp5.264.100,00 merupakan pendapatan atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2025.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp200,00	Rp,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2024 sebesar Rp200,00 merupakan sisa dana UP/GU yang kurang setor ke Rekening Kas Umum Daerah atas SKPD Kecamatan Karanggayam. Sisa Kas UP/GU Kecamatan Karanggayam senilai Rp1.722.020,00 namun



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

pada baru disetorkan senilai Rp1.721.820,00 pada tanggal 31 Desember 2024, dan senilai Rp200,00 disetorkan tanggal 19 Februari 2025.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp32.804.386.756,00	Rp49.367.509.581,98

Saldo Kas di BLUD terdiri dari:

Tabel 5.3.3 Rincian Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
RSUD Dr. Soedirman	11.634.473.923,00	23.408.760.440,00	(11.774.286.517,00)	(50,30)
RSUD Prembun	13.399.343.157,00	19.504.619.530,00	(6.105.276.373,00)	(31,30)
Puskesmas	7.770.569.676,00	6.454.129.611,98	1.316.440.064,02	20,40
Jumlah	32.804.386.756,00	49.367.509.581,98	(16.563.122.825,98)	(33,55)

Pada tahun 2023 terdapat setoran SiLPA BLUD ke RKUD berdasarkan SK Bupati Kebumen Nomor 900.1.13.3 / 789 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Perintah Penyetoran Dana SiLPA pada BLUD Kabupaten Kebumen TA 2024, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.4 Perhitungan Kas di BLUD Tahun 2023

Uraian	Saldo SP2BP (Rp)	Setoran SiLPA ke RKUD		Saldo Kas di BLUD (Rp)
		(Rp)	Tanggal	
RSUD Dr. Soedirman	14.010.836.923,00	2.376.363.000,00	1 Nov 2024	11.634.473.923,00
RSUD Prembun	16.022.980.157,00	2.623.637.000,00	1 Nov 2024	13.399.343.157,00
Puskesmas	7.770.569.676,00	0,00	-	7.770.569.676,00
Jumlah	37.804.386.756,00	5.000.000.000,00		32.804.386.756,00

Mutasi Kas di BLUD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024: Rp49.367.509.581,98

Mutasi tambah:

Penerimaan Rp279.006.253.370,00

Mutasi kurang:

Pengeluaran/Belanja (Rp290.569.376.195,00)

Setoran SiLPA ke RKUD (Rp5.000.000.000,00)

Saldo akhir 31 Des 2024: Rp32.804.386.756,00

Rincian saldo Kas di BLUD dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Kas di BLUD RSUD dr Soedirman per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.634.473.923,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.5 Rincian Kas di BLUD RSUD dr. Soedirman Tahun 2024

Uraian	Nama Bank & Nomor Rekening	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
Tunai (Kas di Bendahara Penerimaan BLUD atas pendapatan tanggal 31 Desember 2024 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 2 Januari 2025.		11.165.808,00
Rekening Pengeluaran BLUD (Kas Bendahara Pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD)	Bank Jateng 1-008-00288-2	0
Rekening Operasional Penerimaan BLUD	BRI 0032-01002104-30-8	0
	Bank Jateng 1-008-00850-3	0
	BNi 112-004-3155	30.621,00
Rekening Operasional BLUD	Bank Jateng 1.008.00287.4	11.623.277.494,00
Jumlah		11.634.473.923,00

2. Saldo Kas di BLUD RSUD Prembun per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.399.343.1,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.6 Rincian Kas di BLUD RSUD Prembun Tahun 2023

Uraian	Nama Bank & Nomor Rekening	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
Tunai (Kas di Bendahara Penerimaan BLUD atas pendapatan tanggal 31 Desember 2024 , yang baru disetorkan ke rekening BLUD tanggal 2 Januari 2025)		19.056.421,00
Rekening Pengeluaran BLUD (merupakan Kas Bendahara Pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD)	Bank Jateng 1-008-00977-1	0,00
Rekening Operasional Penerimaan BLUD	Bank Jateng 1-008-00838-4	0,00
Rekening Operasional BLUD	Bank Jateng 1.008.00729.9	13.380.286.736,00
Jumlah		13.399.343.157,00

3. Saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.770.569.676,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.7 Rincian Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2024

No	Puskesmas	Kas di Bank Jateng		Kas Tunai (Rp)	Utang PFK (Rp)	Saldo Kas di BLUD (Rp)
		Nomor Rekening	Nilai (Rp)			
1	Puskesmas Adimulyo	1100001264	200.703.664,00	-		200.703.664,00
2	Puskesmas Alian	1008006241	314.277.172,00	-		314.277.172,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Puskesmas	Kas di Bank Jateng		Kas Tunai (Rp)	Utang PFK (Rp)	Saldo Kas di BLUD (Rp)
		Nomor Rekening	Nilai (Rp)			
3	Puskesmas Ambal I	1115000906	182.339.609,00	-		182.339.609,00
4	Puskesmas Ambal II	1115000914	217.365.388,00	-		217.365.388,00
5	Puskesmas Ayah I	1066001217	236.646.435,00	-		236.646.435,00
6	Puskesmas Ayah II	1066001209	153.917.354,00	-		153.917.354,00
7	Puskesmas Bonorowo	1071001373	225.390.947,00	-		225.390.947,00
8	Puskesmas Buayan	1066001241	111.303.079,00	-		111.303.079,00
9	Puskesmas Buluspesantren I	1115000922	224.428.839,00	-		224.428.839,00
10	Puskesmas Buluspesantren II	1008006225	166.115.227,00	-		166.115.227,00
11	Puskesmas Gombang I	1066001250	140.652.570,00	-		140.652.570,00
12	Puskesmas Gombang II	1066001268	113.721.287,00	-		113.721.287,00
13	Puskesmas Karanganyar	1100001230	285.409.753,00	-		285.409.753,00
14	Puskesmas Karanggayam I	1100001248	173.263.655,00	-		173.263.655,00
15	Puskesmas Karanggayam II	1100001256	143.870.361,00	-		143.870.361,00
16	Puskesmas Karangsambung	1008006250	153.906.691,00	-		153.906.691,00
17	Puskesmas Kebumen I	1008006233	278.609.673,00	-		278.609.673,00
18	Puskesmas Kebumen II	1008006195	85.386.722,00	-		85.386.722,00
19	Puskesmas Kebumen III	1008006217	125.064.323,00	-		125.064.323,00
20	Puskesmas Klirong I	1008006268	339.065.975,00	-		339.065.975,00
21	Puskesmas Klirong II	1008006284	276.189.150,00	-		276.189.150,00
22	Puskesmas Kutowinangun	1115000931	308.785.076,00	90.000,00		308.875.076,00
23	Puskesmas Kuwarasan	1066001225	114.646.338,00	-		114.646.338,00
24	Puskesmas Mirit	1071001365	350.997.529,00	-		350.997.529,00
25	Puskesmas Padureso	1071001349	292.125.793,00	-		292.125.793,00
26	Puskesmas Pejagoan	1008006179	311.387.885,00	-		311.387.885,00
27	Puskesmas Petanahan	1008006187	436.011.762,00	-		436.011.762,00
28	Puskesmas Poncowarno	1115000949	169.988.350,00	1.757.237,00		171.745.587,00
29	Puskesmas Prembun	1071001357	160.078.522,00	-		160.078.522,00
30	Puskesmas Puring	1066001152	537.403.439,00	-		537.403.439,00
31	Puskesmas Rowokele	1066001233	64.365.152,00	-		64.365.152,00
32	Puskesmas Sadang	1008006276	250.420.783,00	-		250.420.783,00
33	Puskesmas Sempor I	1066001187	266.242.746,00	-		266.242.746,00
34	Puskesmas Sempor II	1066001195	68.827.151,00	-		68.827.151,00
35	Puskesmas Sruweng	1008006209	289.814.039,00	-		289.814.039,00
Jumlah			7.768.722.439,00	1.847.237,00	-	7.770.569.676,00

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp605.545.364,00

Rp893.163.639,00

Dana BOSP merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp605.545.364,00 merupakan sisa dana BOS pada 720 Bendahara BOS SD Negeri dan 59 Bendahara BOS SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen, dengan mutasi Kas Dana BOS Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp893.163.639,00
Mutasi tambah:	
Penerimaan DAK Non Fisik - BOS	Rp127.763.974.158,00
Penerimaan atas Temuan LHP Inspektorat	Rp115.745.928,00
Mutasi kurang:	
Pengeluaran/Belanja (SP2B)	(Rp128.081.735.742,00)
Pengembalian lebih salur ke RKUN	(Rp79.163.889,00)
Penyetoran potongan PFK TA 2023	(Rp6.438.730,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp605.545.364,00</u>

Rincian saldo Kas Dana BOS per satuan pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	Rp1.208.402.886,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.208.402.886,00 merupakan sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada 35 Bendahara BOK Puskesmas se-Kabupaten Kebumen yang pada tahun 2024 sudah masuk ke kode rekening tersendiri yaitu Kas Dana BOK Puskesmas.

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.093.309.936,00	Rp0,00

Dana BOK Puskesmas merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BLUD Puskesmas dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja serta disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.093.309.936,00 merupakan sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada 35 Bendahara BOK Puskesmas se-Kabupaten Kebumen, dengan mutasi Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 sebagai berikut

Mutasi Kas BOK Puskesmas. Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp1.208.402.886,00
Mutasi tambah:	
Penerimaan	Rp29.823.080.114,00
Mutasi kurang:	
Pengeluaran/Belanja	(Rp28.938.173.064,00)
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp2.093.309.936,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rincian saldo Kas Lainnya di masing masing Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.8 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024

No	Puskesmas	Kas di BNI	
		Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1	UPTD Puskesmas Adimulyo	1590032043	35.167.191,00
2	UPTD Puskesmas Alian	1590032214	60.215.639,00
3	UPTD Puskesmas Ambal I	1590031979	51.558.447,00
4	UPTD Puskesmas Ambal II	1590032010	72.133.146,00
5	UPTD Puskesmas Ayah I	1590031968	24.222.369,00
6	UPTD Puskesmas Ayah II	1590031935	97.204.296,00
7	UPTD Puskesmas Bonorowo	1590032009	35.946.248,00
8	UPTD Puskesmas Buayan	1590032203	56.478.289,00
9	UPTD Puskesmas Buluspesantren I	1590031957	58.260.979,00
10	UPTD Puskesmas Buluspesantren II	1590031946	69.700.563,00
11	UPTD Puskesmas Gombang I	1590031855	68.030.724,00
12	UPTD Puskesmas Gombang II	1590031980	54.717.742,00
13	UPTD Puskesmas Karanganyar	1590032065	46.474.304,00
14	UPTD Puskesmas Karanggayam I	1590031866	61.134.990,00
15	UPTD Puskesmas Karanggayam II	1590031913	47.536.380,00
16	UPTD Puskesmas Karangsambung	1590032101	76.092.539,00
17	UPTD Puskesmas Kebumen I	1590032112	58.920.548,00
18	UPTD Puskesmas Kebumen II	1590032145	116.055.491,00
19	UPTD Puskesmas Kebumen III	1590031924	45.709.006,00
20	UPTD Puskesmas Klirong I	1590032021	57.988.432,00
21	UPTD Puskesmas Klirong II	1590031991	51.074.078,00
22	UPTD Puskesmas Kutowinangun	1590032123	70.805.630,00
23	UPTD Puskesmas Kuwarasan	1590032098	62.218.607,00
24	UPTD Puskesmas Mirit	1590032156	59.673.863,00
25	UPTD Puskesmas Padureso	1590031902	37.640.774,00
26	UPTD Puskesmas Pejagoan	1590032167	54.752.686,00
27	UPTD Puskesmas Petanahan	1590032190	80.139.829,00
28	UPTD Puskesmas Poncowarno	1590031899	40.492.104,00
29	UPTD Puskesmas Prembun	1590032076	49.131.101,00
30	UPTD Puskesmas Puring	1590032178	45.990.583,00
31	UPTD Puskesmas Rowokele	1590032087	41.268.464,00
32	UPTD Puskesmas Sadang	1590032054	35.296.989,00
33	UPTD Puskesmas Sempor I	1590032032	62.944.699,00
34	UPTD Puskesmas Sempor II	1590031888	133.271.289,00
35	UPTD Puskesmas Sruweng	1590032189	75.061.917,00
Jumlah			2.093.309.936,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.3.1.1.7 Piutang Pajak

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp12.513.421.142,00

Rp9.358.194.241,00

Piutang Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang s.d. 31 Desember 2024 belum dibayarkan oleh wajib pajak.

Piutang Pajak per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.155.226.901,00 atau 33,72% dari tahun 2023. Piutang Pajak seluruhnya dikelola oleh BPKPD dengan rincian saldo pada tabel berikut.

Tabel 5.3.9 Rincian Piutang Pajak Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Pajak Hotel	2.790.000,00	100.000,00	2.690.000,00	2.690,00
Piutang Pajak Restoran	13.017.215,00	11.203.485,00	1.813.730,00	16,19
Piutang Pajak Hiburan	1.670.000,00	7.185.929,00	-5.515.929,00	-76,76
Piutang Pajak Reklame	167.438.941,00	69.630.797,00	97.808.144,00	140,47
Piutang Pajak Parkir	880.000,00	2.347.200,00	-1.467.200,00	-62,51
Piutang Pajak Air Tanah	9.005.922,00	9.425.122,00	-419.200,00	-4,45
Piutang Pajak MBLB	49.108.750,00	2.187.500,00	46.921.250,00	2.144,97
Piutang PBBP2	12.229.729.814,00	9.232.614.208,00	2.997.115.606,00	32,46
Piutang BPHTB	39.780.500,00	23.500.000,00	16.280.500,00	69,28
Jumlah	12.513.421.142,00	9.358.194.241,00	3.155.226.901,00	33,72

Rincian saldo Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.790.000,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp100.000,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp2.730.772.330,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2024	(Rp2.727.982.330,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024	(Rp100.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2024 :	Rp2.790.000,00

2. Piutang Pajak Restoran

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.017.215,00,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp11.203.485,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp14.110.711.522,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2024	(Rp14.103.687.322,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024	(Rp5.210.470,00)
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp13.017.215,00</u>

3. Piutang Pajak Hiburan

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan hiburan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.670.000,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp7.185.929,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp1.091.136.905,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2024	(Rp1.089.466.905,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024	(Rp7.185.929,00)
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp1.670.000,00</u>

4. Piutang Pajak Reklame

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan reklame, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp167.438.941,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Jan 2024 :	Rp69.630.797,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp1.890.528.072,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2024	(Rp1.783.352.458,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024	(Rp9.367.470,00)
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp167.438.941,00</u>

5. Piutang Pajak Parkir

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 sebesar Rp880.000,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp2.347.200,00
------------------------	----------------



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp535.352.241,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2024	(Rp535.352.241,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024	(Rp 1.497.200,00)
Saldo akhir 31 Des 2024 :	<u>Rp880.000,00</u>
6. Piutang Pajak Air Tanah	
Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.	
Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.005.922,00 dengan mutasi sebagai berikut:	
Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp9.425.122,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp397.116.178,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2024	(Rp 391.172.480,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024	(Rp 7.171.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2024 :	<u>Rp9.005.922,00</u>
7. Piutang Pajak MBLB	
Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.	
Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.108.750,00 dengan mutasi sebagai berikut:	
Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp2.187.500,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp672.083.012,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2024	(Rp 622.974.262,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024	(Rp 2.187.500,00)
Saldo akhir 31 Des 2024 :	<u>Rp49.108.750,00</u>
8. Piutang PBBP2	
Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.	
Saldo Piutang PBBP2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.229.729.814,00 dengan mutasi sebagai berikut :	
Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp9.232.614.208,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2024	Rp 61.136.109.091,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Mutasi kurang:

Pelunasan atas SKPD Tahun 2024 (Rp 57.113.231.536,00)

Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024 (Rp 1.025.761.949,00)

Saldo akhir 31 Des 2024 : Rp12.229.729.814,00

9. Piutang BPHTB

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk pemanfaatan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2024 sebesar Rp 39.780.500,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2024: Rp23.500.000,00

Mutasi tambah:

Penetapan SKPD Tahun 2024 Rp 13.119.526.420,00

Mutasi kurang:

Pelunasan atas SKPD Tahun 2024 (Rp 13.084.245.920,00)

Pelunasan atas SKPD < Tahun 2024 (Rp19.000.000,00)

Saldo akhir 31 Des 2024: Rp39.780.500,00

Rincian Piutang Pajak per jenis per Wajib Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 42**.

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp4.714.604.505,75	Rp4.359.106.740,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemkab Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayarkan per 31 Desember 2023 oleh Wajib Retribusi.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp279.451.340,00 atau 6,85% dari tahun 2023. Rincian saldo Piutang Retribusi pada tabel berikut.

Tabel 5.3.10 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Dinkes PPKB	0,00	24.650.000,00	(24.650.000,00)	(100)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
Disperkimhub	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00	0,00	0
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar				
Disperindag KUKM	1.876.959.612,00	1.405.403.636,00	471.555.976,00	33,55
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Disparbud	1.169.679.700,00	1.219.296.750,00	(49.617.050,00)	(4,07)
Kec. Kebumen	8.100.193,75	49.891.354,00	(41.791.160,25)	(83,76)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disperkimhub	587.500.000,00	587.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.714.604.505,75	4.359.106.740,00	355.497.765,75	8,16

Rincian saldo Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
Merupakan tunggakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu KSU Jalan Persaudaraan berdasarkan Perjanjian Nomor 551.2/0614/II/2019.
Piutang tersebut merupakan tunggakan tahun 2019 sebesar Rp348.735.000,00 dan tunggakan tahun 2020 sebesar Rp723.630.000,00 yang s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum dibayarkan.
Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.072.365.000,00 dengan mutasi sebagai berikut.
Saldo awal 1 Jan 2024: Rp1.072.365.000,00
Mutasi tambah:
 Penetapan SKRD Tahun 2024 Rp0,00
Mutasi kurang:
 Pelunasan atas SRPD Tahun 2024 (Rp0,00)
 Pelunasan atas SKRD < Tahun 2024 (Rp0,00)
Saldo akhir 31 Des 2024: Rp1.072.365.000,00
- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**
Merupakan tunggakan atas pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Disperindag KUKM, yang s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum dibayarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.11 Rincian Piutang Pelayanan Pasar Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
UPTD Pasar I				
Tahun 2021	129.934.400,00	138.718.650,00	(8.784.250,00)	(6,33)
Tahun 2022	108.242.750,00	121.715.750,00	(13.473.000,00)	(11,07)
Tahun 2023	163.186.500,00	195.477.750,00	(32.291.250,00)	(16,52)
Tahun 2024	238.272.600,00	-		-
UPTD Pasar II				
Tahun 2021	18.458.600,00	20.676.600,00	(2.218.000,00)	(10,73)
Tahun 2022	50.266.600,00	54.964.200,00	(4.697.600,00)	(8,55)
Tahun 2023	55.090.600,00	97.102.850,00	(42.012.250,00)	(43,27)
Tahun 2024	181.489.300,00	-	181.489.300,00	-
UPTD Pasar III				
Tahun 2021	253.060.500,00	253.060.500,00	-	-
Tahun 2022	225.344.600,00	225.344.600,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Tahun 2023	222.422.500,00	252.582.500,00	(30.160.000,00)	(11,94)
Tahun 2024	175.776.000,00	-	175.776.000,00	-
UPTD Pasar IV				
Tahun 2021	-	-	-	-
Tahun 2022	-	-	-	-
Tahun 2023	5.870.266,00	45.760.236,00	(39.889.970,00)	(87,17)
Tahun 2024	49.544.396,00	-	-	-
Jumlah	1.876.959.612,00	1.405.403.636,00	183.738.980,00	13,07

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.876.959.612,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp1.405.403.636,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKRD Tahun 2024	Rp645.082.296,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SRPD Tahun 2024	(Rp0,00)
Pelunasan atas SKRD < Tahun 2024	(Rp173.526.320,00)
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp1.876.959.612,00</u>

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per Wajib Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 43**.

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Merupakan tunggakan atas pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tiga SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Disparbud
Merupakan tunggakan retribusi atas sewa kios pada tujuh obyek wisata yang s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum terbayarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.12 Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Disparbud
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Goa Jatijajar	112.146.740,00	142.063.790,00	(29.917.050,00)	(21,06)
Pantai Logending	110.880.000,00	104.544.000,00	6.336.000,00	6,06
Pantai Karangbolong	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00
Pantai Petanahan	187.944.000,00	211.718.000,00	(23.774.000,00)	(11,23)
Pantai Suwuk	742.650.960,00	749.870.960,00	(7.220.000,00)	(0,96)
PAP Krakal	2.160.000,00	3.510.000,00	(1.350.000,00)	(38,46)
Waduk Sempor	8.578.000,00	2.270.000,00	6.308.000,00	277,89
Jumlah	1.169.679.700,00	1.219.296.750,00	(49.617.050,00)	(4,07)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Disparbud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.169.679.700,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp1.219.296.750,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKRD Tahun 2024	Rp220.806.480,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SRPD Tahun 2024	(Rp174.739080,00)
Pelunasan atas SKRD < Tahun 2023	(Rp95.684.450,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp1.169.679.700,00</u>

Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Disparbud per Wajib Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

- b. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Kec. Kebumen
 Merupakan tunggakan retribusi atas sewa tanah eks bengkok kelurahan yang berada di wilayah Kec. Kebumen yang s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum terbayarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Kec. Kebumen Tahun 2024 dan 2023

No	Kelurahan	Nilai Sewa	Pembayaran Tahun 2024	Piutang
		(Rp)	Nilai (Rp)	(Rp)
1	Bumirejo	32.669.000,00	30.651.500,00	2.017.500,00
2	Selang	35.834.704,00	11.100.000,00	24.734.704,00
	Jumlah	68.503.704,00	41.751.500,00	26.752.204,00

- c. Retribusi Penyewaan Bangunan pada Disperkimhub
 Merupakan tunggakan retribusi atas sewa Kios Terminal Tipe A yang s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum terbayarkan dengan mutasi sebagai berikut.
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Saldo awal 1 Jan 2024: | Rp587.500.000,00 |
| Mutasi tambah: | |
| Penetapan SKRD Tahun 2024 | Rp0,00 |
| Mutasi kurang: | |
| Pelunasan atas SRPD Tahun 2024 | (Rp0,00) |
| Pelunasan atas SKRD < Tahun 2024 | (Rp0,00) |
| Saldo akhir 31 Des 2024: | <u>Rp587.500.000,00</u> |

Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan pada Disperkimhub per Wajib Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

5.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp25.109.228.673,44	Rp21.073.792.846,36

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan hak Pemkab Kebumen yang belum diterima karena telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya namun s.d akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.035.435.827,08 atau 19,15% dari tahun 2023. Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.14 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	554.258.401,00	598.750.401,00	(44.492.000,00)	(7,43)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.950.050.014,44	3.300.708.525,36	649.341.489,08	19,67
Piutang Pendapatan BLUD	20.604.920.258,00	17.174.333.920,00	3.430.586.338,00	19,98
Jumlah	25.109.228.673,44	21.073.792.846,36	4.035.435.827,08	19,15

Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
Merupakan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008)	24.178.000,00	24.178.000,00	0,00	0
Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop	530.080.401,00	574.572.401,00	(44.492.000,00)	(7,74)
Jumlah	554.258.401,00	598.750.401,00	(44.492.000,00)	(7,43)

- a. Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) sebesar Rp24.178.000,00 dikelola oleh Distapang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.16 Rincian Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir Tahun 2024

No	Tahun Penguliran	Sisa Pinjaman per 31 Desember 2023		
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2005	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
2	2006	94.487.000,00	7.278.000,00	101.765.000,00
3	2007	70.500.000,00	3.000.000,00	73.500.000,00
4	2008	161.945.000,00	12.300.000,00	174.245.000,00
	Jumlah	327.932.000,00	24.178.000,00	352.110.000,00

Atas piutang pokok disajikan pada catatan nomor 5.3.1.2.1 akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen yaitu sebesar Rp327.932.000,00 dan telah disisihkan sebesar 100% sehingga disajikan sebesar nilai bersih (NRV) yaitu Rp0,00.

- b. Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop sebesar Rp530.080.401,00 merupakan piutang yang pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto. Perkembangan per 31 Desember 2024, dari 112 debitur terdapat 71 debitur dinyatakan tidak aktif dan 41 debitur aktif. Pada Tahun 2024 terdapat pelunasan dari delapan debitur yang difasilitasi oleh KPKNL dengan kegiatan *Crash Program* Keringanan Utang Tahun 2023 sebesar Rp44.492.000,00 yang terdiri dari pokok pembayaran sebesar Rp612.246.399,20,00 dan keringanan sebesar Rp32.245.600,80, dengan rincian pelunasan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.17 Rncian Pelunasan Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop Tahun 2024

No	Nama Debitur	SP3N	Pelunasan (Rp)		
		(Rp)	Pembayaran	Keringanan	Jumlah
1	Suwandi	10.040.000,00	2.876.800,00	7.163.200,00	10.040.000,00
2	Rasdi	2.330.000,00	416.000,00	1.914.000,00	2.330.000,00
3	Darman	3.750.000,00	700.000,00	3.050.000,00	3.750.000,00
4	Sri Suryaningsih (Ketua Kelompok Industri Kecil Rengginang)	4.400.000,00	880.000,00	3.520.000,00	4.400.000,00
5	Kelompok Usaha Tempe Tahu (Ketua: Waris Sehafudin)	11.836.000,00	2.730.000,00	9.106.000,00	11.836.000,00
6	Kelompok Usaha Anyaman Pandan (Ketua: Partini)	3.625.000,00	550.000,00	3.075.000,00	3.625.000,00
7	Ued Sp Poncowarno (Ketua : Supriyanto)	4.935.000,00	3.490.999,20	1.444.000,80	4.935.000,00
8	Ued Sp Margotomo (Ketua : Supriyono, Sh)	3.576.000,00	602.600,00	2.973.400,00	3.576.000,00
		44.492.000,00	12.246.399,20	32.245.600,80	44.492.000,00

Berdasarkan pelunasan atas delapan debitur tersebut maka nilai Piutang Dana Bergulir eks. Disperindagkop per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp530.080.401,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.114 Rincian Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop per 31 Desember 2024

No.	Tahun Pengguliran	Saldo (Rp)			
		Pokok	Jasa Pinjaman	Pelunasan	Jumlah
I	Perguliran				
1	Tahun 2000	91.194.500,00	11.711.500,00	-	102.906.000,00
2	Tahun 2002	45.434.500,00	4.719.500,00	-	50.154.000,00
3	Tahun 2003	120.474.700,00	13.730.000,00	2.330.000,00	131.874.700,00
5	Tahun 2005	41.313.455,00	7.179.000,00	26.701.000,00	21.791.455,00
6	Tahun 2006	37.263.409,00	6.993.700,00	15.461.000,00	28.796.109,00
7	Tahun 2007	60.633.137,00	7.950.000,00	-	68.583.137,00
	Sub Jumlah I	396.313.701,00	52.283.700,00	44.492.000,00	404.105.401,00
II	Digulirkan Kembali				
1	Tahun 2001	34.005.000,00	3.345.000,00	-	37.350.000,00
2	Tahun 2002	33.481.000,00	3.350.000,00	-	36.831.000,00
3	Tahun 2005	8.990.000,00	1.050.000,00	-	10.040.000,00
5	Tahun 2006	11.435.000,00	1.129.000,00	-	12.564.000,00
6	Tahun 2007	7.450.000,00	1.840.000,00	-	9.290.000,00
7	Tahun 2008	16.100.000,00	3.800.000,00	-	19.900.000,00
	Sub Jumlah II	111.461.000,00	14.514.000,00	-	125.975.000,00
	Jumlah	507.774.701,00	66.797.700,00	44.492.000,00	530.080.401,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

2. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
Merupakan piutang yang dikelola oleh BPKPD, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	29.500,00	2.000,00	27.500,00	1375,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.704.608,20	2.256.159,00	448.449,20	19,88
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	21.500,00	1.269.467,22	(1.247.967,22)	(98,31)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	22.752.769,86	10.502.548,86	12.250.221,00	116,64
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	384.200,00	386.888,00	(2.688,00)	(0,69)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.081.015,88	1.304.219,00	(223.203,12)	(17,11)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.516.187,50	43.750,00	1.472.437,50	3365,57
Piutang Pendapatan Denda PBBP2	3.919.118.708,00	3.282.313.493,28	636.805.214,72	19,40
Piutang Pendapatan Denda BPHTB	2.441.525,00	2.630.000,00	(188.475,00)	(7,17)
Jumlah	3.950.050.014,44	3.300.708.525,36	649.341.489,08	19,67

Rincian perhitungan Denda Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 42**.

3. Piutang Pendapatan BLUD
Piutang Pendapatan BLUD merupakan tagihan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien yang telah mendapatkan pelayanan yang dapat dijadikan kas namun sampai dengan tanggal neraca belum diterima dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Tabel 5.3.16 Rincian Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
RSUD Dr. Soedirman	14.061.507.382,00	11.091.782.647,00	2.969.724.735,00	26,77
RSUD Prembun	5.543.967.876,00	5.420.489.548,00	123.478.328,00	2,28
Puskesmas	999.445.000,00	662.061.725,00	337.383.275,00	50,96
Jumlah	20.604.920.258,00	17.174.333.920,00	3.430.586.338,00	19,98

Rincian saldo Piutang Pendapatan BLUD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman
Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.17 Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman Tahun 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Umum	2.026.535.161,00	2.121.748.456,00	(95.213.295,00)	(4,49)
BPJS	11.459.240.530,00	8.565.774.946,00	2.893.465.584,00	33,78
KEMENKES	99.160.200,00	99.160.200,00	0,00	0,00
Piutang Jasa Raharja	68.168.842,00	12.945.620,00	55.223.222,00	426,58
Piutang Radiologi dan Laboratorium	176.337.025,00	102.816.000,00	73.521.025,00	71,51
Piutang Jampersal	65.559.900,00	65.559.900,00	0,00	0,00
Piutang Sewa	13.273.778,00	20.178.781,00	(6.905.003,00)	(34,22)
Piutang TCM	17.075.000,00	11.200.000,00	5.875.000,00	52,46
Piutang Obat	1.964.435,00	1.964.435,00	0,00	0,00
Piutang JKK	120.467.511,00	90.434.309,00	30.033.202,00	33,21
Piutang Diklat	13.725.000,00	0,00	13.725.000,00	0,00
Jumlah	14.061.507.382,00	11.091.782.647,00	2.969.724.735,00	26,77

Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan merupakan piutang atas data/klaim yang sudah terverifikasi.

b. Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun

Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.12 Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Klaim Covid / Kemenkes	102.338.000	47.169.000,00	55.169.000,00	116,96
Piutang BPJS	4.904.776.902,00	5.154.947.127,00	-250.170.225,00	-4,85
Piutang Jasa Raharja	291.546.029	5.329.599,00	286.216.430,00	5370,32
Piutang KB Implan	0,00	500000	-500.000,00	-100,00
Piutang Umum	228.546.796	186.118.822,00	42.427.974,00	22,80
Piutang TCM Laboratorium	13.875.000	26.425.000,00	-12.550.000,00	-47,49
Piutang Obat Antar RS	2.885.149		2.885.148,96	0,00
Jumlah	5.543.967.875,96	5.420.489.548,00	120.593.179,00	2,22

Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan merupakan piutang atas data/klaim yang sudah terverifikasi.

c. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas

Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas yang disajikan merupakan Piutang BPJS yang sudah terverifikasi, dengan rincian per Puskesmas pada tabel berikut.

Tabel 5.3.19 Rincian Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Puskesmas Adimulyo	17.025.000,00	9.865.000,00	7.160.000,00	72,58
Puskesmas Alian	82.400.000,00	42.854.900,00	39.545.100,00	92,28
Puskesmas Ambal I	63.905.000,00	52.000.875,00	11.904.125,00	22,89



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Puskesmas Ambal II	21.355.000,00	6.410.000,00	14.945.000,00	233,15
Puskesmas Ayah I	86.080.000,00	58.270.000,00	27.810.000,00	47,73
Puskesmas Ayah II	9.230.000,00	9.030.000,00	200.000,00	2,21
Puskesmas Bonorowo	7.065.000,00	8.110.000,00	-1.045.000,00	-12,89
Puskesmas Buayan	9.450.000,00	13.725.000,00	-4.275.000,00	-31,15
Puskesmas Buluspesantren I	9.070.000,00	5.482.100,00	3.587.900,00	65,45
Puskesmas Buluspesantren II	11.775.000,00	11.230.000,00	545.000,00	4,85
Puskesmas Gombang I	34.485.000,00	14.340.000,00	20.145.000,00	140,48
Puskesmas Gombang II	1.120.000,00	1.785.000,00	-665.000,00	-37,25
Puskesmas Karanganyar	102.825.000,00	64.140.000,00	38.685.000,00	60,31
Puskesmas Karanggayam I	20.640.000,00	12.080.000,00	8.560.000,00	70,86
Puskesmas Karanggayam II	13.330.000,00	14.020.000,00	-690.000,00	-4,92
Puskesmas Karangsambung	82.600.000,00	63.750.000,00	18.850.000,00	29,57
Puskesmas Kebumen I	6.690.000,00	8.315.000,00	-1.625.000,00	-19,54
Puskesmas Kebumen II	25.045.000,00	18.630.000,00	6.415.000,00	34,43
Puskesmas Kebumen III	11.570.000,00	11.000.000,00	570.000,00	5,18
Puskesmas Klirong I	14.910.000,00	9.509.000,00	5.401.000,00	56,80
Puskesmas Klirong II	14.630.000,00	12.081.000,00	2.549.000,00	21,10
Puskesmas Kutowinangun	61.350.000,00	44.160.000,00	17.190.000,00	38,93
Puskesmas Kuwarasan	4.985.000,00	4.695.000,00	290.000,00	6,18
Puskesmas Mirit	75.685.000,00	35.863.850,00	39.821.150,00	111,03
Puskesmas Padureso	26.590.000,00	10.800.000,00	15.790.000,00	146,20
Puskesmas Pejagoan	49.765.000,00	35.525.000,00	14.240.000,00	40,08
Puskesmas Petanahan	52.790.000,00	34.410.000,00	18.380.000,00	53,41
Puskesmas Poncowarno	8.310.000,00	4.445.000,00	3.865.000,00	86,95
Puskesmas Prembun	14.970.000,00	2.875.000,00	12.095.000,00	420,70
Puskesmas Puring	17.825.000,00	8.870.000,00	8.955.000,00	100,96
Puskesmas Rowokele	6.595.000,00	9.945.000,00	-3.350.000,00	-33,69
Puskesmas Sadang	8.290.000,00	5.355.000,00	2.935.000,00	54,81
Puskesmas Sempor I	11.115.000,00	7.500.000,00	3.615.000,00	48,20
Puskesmas Sempor II	5.680.000,00	4.290.000,00	1.390.000,00	32,40
Puskesmas Sruweng	10.295.000,00	6.880.000,00	3.415.000,00	49,64
Jumlah	999.445.000,00	662.241.725,00	337.203.275,00	50,92

5.3.1.1.10

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen terdapat Kurang Bayar dan Lebih bayar DBH dengan rincian sebagai berikut:

1. Kurang Bayar DBH sebesar Rp1.705.716.000,00 yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp1.466.189.000,00 dan DBH SDA sebesar Rp239.527.000,00;
2. Lebih Bayar DBH sebesar Rp5.986.628.000,00 yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp4.315.566.000,00 dan DBH SDA sebesar Rp1.671.062.000,00;

Namun, nilai tersebut tidak dicantumkan dalam perhitungan pada Laporan Keuangan Pemkab Kebumen.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp,00

Rp6.047.212.575,00

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/619 tanggal 12 Februari 2025 perihal Pemberitahuan kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen terdapat Kurang Bayar Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah senilai Rp10.733.334.896.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp4.441.339.793,00
2. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp2.118.452.094,00
3. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) senilai Rp4.148.714.139,00
4. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp24.828.870,00

Namun, nilai tersebut tidak dicantumkan dalam perhitungan pada Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Kebumen.

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp12.849.329.947,15)

(Rp10.866.464.784,45)

Penyisihan Piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*). Besarnya Penyisihan Piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar (Rp1.982.865.162,70) atau 18,25% dari tahun 2023. Rincian saldo Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.20 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	(4.230.785.170,70)	(3.156.357.708,57)	(1.074.427.462,13)	34,04
Penyisihan Piutang Retribusi	(4.360.071.678,82)	(3.930.759.507,88)	(429.312.170,94)	10,92



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(4.258.473.097,63)	(3.779.347.568,00)	(479.125.529,63)	12,68
Jumlah	(12.849.329.947,15)	(10.866.464.784,45)	(1.982.865.162,70)	18,25

Rincian saldo Penyisihan Piutang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak

Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah diatur dalam Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen yaitu:

- Kualitas Lancar: umur piutang kurang dari 1 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari nilai piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas Kurang Lancar: umur piutang 1 s.d. 2 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas Diragukan: umur piutang 2 s.d. 5 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- Kualitas Macet: umur piutang lebih dari 5 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet.

Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per jenis Piutang Pajak disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.21 Rincian Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang
per Jenis Piutang Pajak Tahun 2024**

Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Pajak Hotel	2.790.000,00	13.950,00	2.776.050,00
Piutang Pajak Restoran	13.017.215,00	2.834.968,50	10.182.246,50
Piutang Pajak Hiburan	1.670.000,00	8.350,00	1.661.650,00
Piutang Pajak Reklame	167.438.941,00	18.591.828,27	148.847.112,73
Piutang Pajak Parkir	880.000,00	625.150,00	254.850,00
Piutang Pajak Air Tanah	9.005.922,00	1.299.541,20	7.706.380,80
Piutang Pajak MBLB	49.108.750,00	245.543,75	48.863.206,25
Piutang PBBP2	12.229.729.814,00	4.206.539.436,48	8.023.190.377,52
Piutang BPHTB	39.780.500,00	626.402,50	39.154.097,50
Jumlah	12.513.421.142,00	4.230.785.170,70	8.282.635.971,30

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Saldo Piutang	Kualitas Piutang			
	Tahun 2024				
	(Rp)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Pajak Hotel	2.790.000,00	2.790.000,00			
Piutang Pajak Restoran	13.017.215,00	7.024.200,00	2.429.150,00	2.013.865,00	1.550.000,00
Piutang Pajak Hiburan	1.670.000,00	1.670.000,00			
Piutang Pajak Reklame	167.438.941,00	107.175.614,00	38.887.877,00	14.416.575,00	6.958.875,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Saldo Piutang	Kualitas Piutang			
	Tahun 2024				
	(Rp)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Pajak Parkir	880.000,00	30.000,00	250000	0	600.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	9.005.922,00	6.751.800,00	349322	1.347.900,00	556.900
Piutang Pajak MBLB	49.108.750,00	49.108.750,00			
Piutang PBBP2	12.229.729.814,00	4.022.877.555,00	1.844.303.862,00	4.721.107.469,00	1.641.440.928,00
Piutang BPHTB	39.780.500,00	35.280.500,00	4.500.000		
Jumlah	12.513.421.142,00	4.232.708.419,00	1.890.720.211,00	4.738.885.809,00	1.651.106.703,00
% Penyisihan Piutang		0,50%	10%	50%	100%
Nilai Penyisihan Piutang	4.230.785.170,70	21.163.542,10	189.072.021,10	2.369.442.904,50	1.651.106.703,00
Net Realizable Value (NRV)	8.282.635.971,31	4.211.544.876,91	1.701.648.189,90	2.369.442.904,50	0,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Besaran Penyisihan Piutang Retribusi berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen, yaitu:

- Kualitas Lancar: umur piutang kurang dari 0 s.d. 1 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas Kurang Lancar: umur piutang 1 s.d. 3 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas Diragukan: umur piutang 3 s.d. 12 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- Kualitas Macet: umur piutang lebih dari 12 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet.

Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per jenis Piutang Retribusi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.22 Rincian Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per Jenis Piutang Retribusi Tahun 2024

Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
Disperkimhub	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00	0
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar			
Disperindag KUKM	1.876.959.612,00	1.549.114.130,00	327.845.482,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
Disparbud	1.169.679.700,00	1.146.646.060,00	23.033.640,00
Kec. Kebumen	26.869.849,00	4.323.238,82	22.546.610,18
Disperkimhub	587.500.000,00	587.500.000,00	0



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Jumlah	4.733.374.161,00	4.359.948.428,82	373.425.732,18

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.23 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
Disperkimhub	1.072.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.365.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Disperindag KUKM					
UPTD Pasar I	639.636.250,00	2.298.000,00	4.333.000,00	231.641.600,00	401363650
UPTD Pasar II	304.279.100,00	2.102.000,00	3.381.500,00	176.005.800,00	122789800
UPTD Pasar III	876.603.600,00	0,00	0,00	175.776.000,00	700.827.600,00
UPTD Pasar IV	55.414.662,00	11.100,00	87.600,00	49.445.696,00	5870266
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
Disparbud					
- Goa Jatijajar	112.146.740,00	0,00	0,00	9.803.280,00	102.343.460,00
- Pantai Logending	110.880.000,00	0,00	0,00	10.620.000,00	100.260.000,00
- Pantai Karangbolong	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00
- Pantai Petanahan	187.944.000,00	0,00	0,00	0,00	187.944.000,00
- Pantai Suwuk	742.650.960,00	0,00	0,00	18.960.000,00	723.690.960,00
- PAP Krakal	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
- Waduk Sempor	8.578.000,00	0,00	0,00	6.684.000,00	1.894.000,00
Kec. Kebumen					
- Kel. Bumirejo	2.017.500,00	0,00		2.017.500,00	
- Kel. Panjer	24.734.704,00	12.330.000,00		12.404.704,00	
Disperkimhub	587.500.000,00	0	0	0	587.500.000,00
Jumlah	4.732.230.516,00	16.741.100,00	7.802.100,00	693.358.580,00	4.014.328.736,00
% Penyisihan Piutang		0,50%	10%	50%	100%
Nilai Penyisihan Piutang	4.361.871.941,50	83.705,50	780.210,00	346.679.290,00	4.014.328.736,00
Net Realizable Value (NRV)	370.358.574,50	16.657.394,50	7.021.890,00	346.679.290,00	0

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

**Tabel 5.3.24 Rincian Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang
per Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024**

Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	554.258.401,00	554.258.401,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.950.050.014,44	1.998.725.002,72	1.951.325.011,72
Piutang Pendapatan BLUD	20.604.920.258,00	1.705.489.693,91	18.899.430.564,09
Jumlah	25.109.228.673,44	4.258.473.097,63	20.850.755.575,81

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.25 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008)					
-2005	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
-2006	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00
-2007	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
-2008	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop					
- Perguliran 2000	102.906.000,00	0,00	0,00	0,00	102.906.000,00
- Perguliran 2002	50.154.000,00	0,00	0,00	0,00	50.154.000,00
- Perguliran 2003	131.874.700,00	0,00	0,00	0,00	131.874.700,00
- Perguliran 2005	21.791.455,00	0,00	0,00	0,00	21.791.455,00
- Perguliran 2006	28.796.109,00	0,00	0,00	0,00	28.796.109,00
- Perguliran 2007	68.583.137,00	0,00	0,00	0,00	68.583.137,00
- Digulirkan Kembali 2001	37.350.000,00	0,00	0,00	0,00	37.350.000,00
- Digulirkan Kembali 2002	36.831.000,00	0,00	0,00	0,00	36.831.000,00
- Digulirkan Kembali 2005	10.040.000,00	0,00	0,00	0,00	10.040.000,00
- Digulirkan Kembali 2006	12.564.000,00	0,00	0,00	0,00	12.564.000,00
- Digulirkan Kembali 2007	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00
- Digulirkan Kembali 2008	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00
Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	554.258.401,00	-	-	-	554.258.401,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah					
Piutang Denda Pajak Hotel	29.500,00	29.500,00	0,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Denda Pajak Restoran	2.704.608,20	51.600,00	942.353,00	966.655,20	744.000,00
Piutang Denda Pajak Hiburan	21.500,00	21.500,00	0,00		
Piutang Denda Pajak Reklame	22.752.769,86	754.574,04	11.737.979,82	6.919.956,00	3.340.260,00
Piutang Denda Pajak Parkir	384.200,00	1.200,00	95.000,00		288.000,00
Piutang Denda Pajak Air Tanah	1.081.015,88	33.568,00	133.143,88	646.992,00	267.312,00
Piutang Denda Pajak MBLB	1.516.187,50	1.516.187,50	0,00	0,00	-
Piutang Denda PBBP2	3.919.118.708,00	201.145.949,00	663.949.459,00	2.266.131.585,00	787.891.715,00
Piutang Denda BPHTB	2.441.525,00	911.525,00	1.530.000,00	0	0
Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.950.050.014,44	204.465.603,54	678.387.935,70	2.274.665.188,20	792.531.287,00
Piutang Pendapatan BLUD					
Piutang Umum RSUD dr. Soedirman	14.061.507.382,00	7.176.062,00	58.952.266,00	92.838.266,00	69.580.202,00
Piutang Umum RSUD Prembun	5.543.967.876,00	1.789.000,00	156.759.201,00	600.225.147,00	1.267.761.813,00
Puskesmas	999.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan BLUD	20.604.920.258,00	8.965.062,00	215.711.467,00	693.063.413,00	1.337.342.015,00
Jumlah	25.109.228.673,44	213.430.665,54	894.099.402,70	2.967.728.601,20	2.684.131.703,00
% Penyisihan Piutang		0,50%	10%	50%	100%
Nilai Penyisihan Piutang		1.067.153,33	89.409.940,27	1.483.864.300,60	2.684.131.703,00
Net Realizable Value (NRV)		212.363.512,21	804.689.462,43	1.483.864.300,60	0,00

Piutang Pendapatan BLUD yang diperhitungkan penyisihan piutangnya hanya piutang umum.

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp17.535,470,04

Rp33.705.587,11

Beban Dibayar DiMuka adalah biaya yang dibayar sebelum aset tersebut digunakan di masa mendatang atau sebelum jatuh tempo. Biaya tersebut tidak dibebankan secara langsung pada periode bersangkutan karena belum menjadi beban untuk periode tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Beban Dibayar DiMuka per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.170.117,07 atau 47,97% dari tahun 2023. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.535.470,04 seluruhnya atas asuransi kendaraan dinas pada BPKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.26 Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2024

Uraian Beban	No. & Tanggal Dokumen Bukti Pengeluaran	Nilai Beban (Rp)	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Nilai Beban Dibayar Dimuka (Rp)
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (2 unit - AA 2 D dan AA 47 D)	12.200.006.355.461 25/08/2022	29.837.640,00	23/08/2022 s.d 23/08/2025	36	8	6.630.586,67
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (1 unit) AA 11 D)	12.400.000.521.853 29/02/2024	7.924.600,00	23/02/02024 s.d 23/02/2025	12	2	1.320.766,67
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (1 unit) - AA 1 D	12.400.000.500.959 26/02/2024	14.187.342,93	23/02/2024 s.d 23/02/2026	24	14	8.275.950,04
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (1 unit) - AA 8 D	12.400.000.525.180 27/02/2024	7.849.000,00	23/02/02024 s.d 23/02/2025	12	2	1.308.166,67
Jumlah		59.798.582,93				17.535.470,04

5.3.1.1.14 Persediaan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp59.192.407.479,18

Rp51.568.005.606,60

Saldo Persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemda. Saldo Persediaan terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD.

Sesuai Perbup Kebumen Nomor 60 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen, Persediaan dicatat dengan metode periodik, yang artinya akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.624.401.872,58 atau 14,79% dari tahun 2023. Seluruh saldo Persediaan merupakan Persediaan Bahan Pakai Habis dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.13 Rincian Persediaan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bahan				
Bahan Bangunan dan Konstruksi	831.823.367,22	1.222.980.552,41	-391.157.185,19	-32,0
Bahan Kimia	2.359.258.379,20	3.287.271.282,00	-928.012.902,80	-28,2
Bahan Bakar dan Pelumas	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	
Bahan Baku	292.471.076,00	293.644.000,00	-1.172.924,00	-0,4
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	
Isi Tabung Gas	65.291.000,00	60.996.000,00	4.295.000,00	7,0
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	900.000,00	-900.000,00	-100,0
Bahan Lainnya	13.470.909.979,25	1.754.085.534,51	11.716.824.444,74	668,0
Suku Cadang				
Suku Cadang Alat Kedokteran	286.583.519,00	2.208.583.993,52	-1.922.000.474,52	-87,02
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Alat Tulis Kantor	1.310.524.606,00	976.751.592,01	333.773.013,99	34,17
Kertas dan Cover	548.374.356,00	451.373.887,49	97.000.468,51	21,49
Bahan Cetak	1.301.797.149,09	1.153.779.366,22	148.017.782,87	12,83
Benda Pos	42.274.456,00	38.988.140,00	3.286.316,00	8,43
Bahan Komputer	481.885.166,00	314.800.842,72	167.084.323,28	53,08
Perabot Kantor	503.638.603,00	265.214.170,00	238.424.433,00	89,90
Alat Listrik	489.414.066,00	758.478.524,52	-269.064.458,52	-35,47
Suvenir/Cendera Mata	28.165.000,00			
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	213.807.213,00	159.626.391,66	54.180.821,34	33,94
Obat-obatan				
Obat	27.839.120.268,13	35.547.000.768,99	-7.707.880.500,86	-21,68
Obat-obatan Lainnya	8.528.913.626,29	2.637.218.861,55	5.891.694.764,74	223,41
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00	
Natura dan Pakan				
Natura	477.332.649,00	436.311.699,00	41.020.950,00	9,40
Pipa				
Pipa Lainnya	63.000,00	0,00	63.000,00	
Jumlah	59.192.407.479,18	51.568.005.606,60	7.596.236.872,58	14,73

Rincian saldo Persediaan per SKPD tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 45**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp213.074.780.907,39

Rp204.963.341.996,07

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.111.438.911,32 atau 3,96% dari tahun 2023. Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.28 Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	213.074.780.907,39	204.963.341.996,07	8.111.438.911,32	3,96
Jumlah	213.074.780.907,39	204.963.341.996,07	8.111.438.911,32	3,96

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemkab Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Distapang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* (NRV) setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.29 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	213.074.780.907,39	204.963.341.996,07	8.111.438.911,32	3,96
Jumlah	213.074.780.907,39	204.963.341.996,07	8.111.438.911,32	3,96

- Dana Bergulir pada Distapang (perguliran 2006-2008) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan mutasi sebagai berikut.
 Saldo awal 1 Jan 2024: Rp327.932.000,00
 Mutasi tambah:
 - Rp0,00
 Mutasi kurang:
 Penerimaan kembali pokok pinjaman pada Tahun 2024 (Rp0,00)
 Saldo akhir 31 Des 2024: Rp327.932.000,00
 Penyisihan 100% (tahun ke-10) (Rp327.932.000,00)
 NRV per 31 Des 2024 Rp0,00
- Dana Talangan Pembiayaan TA 2024 merupakan dana talangan pengadaan pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani dan pemberian pinjaman kepada Rukun Nelayan sebesar Rp1.805.000.000,00 yang s.d. akhir TA 2024 seluruhnya telah dikembalikan oleh kelompok penerima sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan mutasi sebagai berikut.
 Saldo awal 1 Jan 2024: Rp0,00
 Mutasi tambah:
 Pemberian Pinjaman melalui Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 Rp1.805.000.000,00
 Mutasi kurang:
 Penerimaan kembali pinjaman atas Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 (Rp1.805.000.000,00)
 Saldo akhir 31 Des 2024: Rp0,00

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp213.074.780.907,39	Rp204.963.341.996,07

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

dan non permanen. Investasi permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen menjelaskan bahwa:

1. Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%;
2. Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.111.438.912,32 atau 3,96% dari tahun 2023 seluruhnya merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tujuh BUMD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.14 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bidang Perbankan				
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	34.184.980.841,39	35.818.622.143,07	(1.633.641.301,68)	(4,56)
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	3.020.000.000,00	3.020.000.000,00	0,00	0,00
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	24.026.436.210,00	23.413.201.515,00	613.234.695,00	2,62
PT BPD Jateng	66.710.000.000,00	66.710.000.000,00	0,00	0,00
Bidang Pelayanan Air Minum				
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	75.344.473.709,00	69.371.895.535,00	5.972.578.174,00	8,61
Bidang Aneka Usaha				
PT LUK ULO FARMA (Perseroda)	3.954.104.148,00	3.837.769.500,00	116.334.648,00	3,03
PT PRPP Jateng (Perseroda)	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	5.683.786.000,00	2.640.853.303,00	3.042.932.697,00	115,23
Jumlah	213.074.780.908,39	204.963.341.996,07	8.111.438.912,32	3,96

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemkab Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu:

1. Metode Biaya diterapkan pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPD Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng (Perseroda) karena kepemilikan saham Pemkab Kebumen < 20%,;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

2. Metode Ekuitas diterapkan pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda), PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), PDAM Tirta Bumi Sentosa, dan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

Nilai Investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sehingga penyajian Penyertaan Modal Pemkab Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD dengan rincian pada **Lampiran 47**.

Ikhtisar delapan Laporan Keuangan BUMD (*audited*) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.31 Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD (*audited*)

Nama BUMD Nama KAP	Opini	Basis Opini	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
Bidang Perbankan					
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) KAP Arnestesa	WTP	-	545.016.450.842,00	480.259.904.448,00	64.756.546.394,00
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	2.510.426.555.980,00	2.047.481.782.361,00	462.944.773.621,00
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	141.187.309.826,00	117.160.873.616,00	24.026.436.210,00
PT BPD Jateng KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	WTP	-	94.401.425.748.000,00	83.454.816.105.000,00	10.946.609.643.000,00
Bidang Pelayanan Air Minum					
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	76.798.232.629,00	1.453.758.921,00	75.344.473.709,00
Bidang Aneka Usaha					
PT Luk Ulo Farma (Perseroda) KAP Drs. Henry dan Sugeng	WTP	-	5.189.483.058,00	1.235.378.909,00	3.954.104.148,00
PT PRPP Jateng (Perseroda) KAP Arnestesa	WTP	-	57.141.899.838,00	1.008.463.334,00	53.832.903.292,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	5.814.260.938,00	0,00	5.683.786.000,00

Nilai perolehan investasi menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp213.074.780.908,39 dijelaskan secara rinci per BUMD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

1. Metode Biaya

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemkab Kebumen kurang dari 20% pada tiga BUMD yaitu PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPD Jateng, dan PT PRPP Jateng (Perseroda).

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemkab Kebumen per 31 Desember 2024 yang disajikan dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp69.881.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.15 Investasi Permanen Menggunakan Metode Biaya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) – 0,73%	3.020.000.000,00	3.020.000.000,00	0,00	19,84
PT BPD Jateng – 1,27%	66.710.000.000,00	66.710.000.000,00	0,00	19,17
PT PRPP Jateng (Perseroda) – 0,20%	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0
Jumlah	69.881.000.000,00	69.881.000.000,00	0,00	19,15

Sesuai dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2024 tidak terdapat penambahan modal pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda); PT BPD Jateng; dan PT PRPP Jateng (Perseroda).

Nilai perolehan investasi menggunakan metode biaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.881.000.000,00 rinci per BUMD sebagai berikut:

- PT BPR BKK Jateng (Perseroda)**
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab Kebumen pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar 0,73% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan metode biaya karena kepemilikan modalnya kurang dari 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemkab Kebumen tahun 2024 untuk PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar Rp3.020.000.000,00.
- PT BPD Jateng**
PT BPD Jateng dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 12 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab ke PT BPD Jateng sebesar 1,27% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan metode biaya karena kepemilikan modalnya kurang dari 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemkab Kebumen Tahun 2024 pada PT BPD Jateng sebesar Rp66.710.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- c. PT PRPP Jateng (Perseroda)
PT PRPP Jateng (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar 0,20% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan metode biaya karena kepemilikan modalnya kurang dari 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemkab Kebumen tahun 2024 untuk PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar Rp151.000.000,00.

2. Metode Ekuitas

- a. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar 52,79% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.
Nilai Investasi pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp34 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp35.818.622.143,07
Mutasi tahun berjalan:	
Penambahan Investasi	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp10.305.292.845,00
Setoran Deviden Tahun 2023	-
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	Rp13.401.006.562,00
Koreksi	Rp1.462.072.415,32
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp34.184.980.841,39</u>

- b. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen.
Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.
Nilai Investasi pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp24.026.436.210,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp23.413.201.515,00
------------------------	---------------------



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Mutasi tahun berjalan:

Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp1.720.695.760,00
Setoran Deviden Tahun 203	-Rp553.730.533,00
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	-Rp553.730.533,00
Koreksi	Rp1,00
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp24.026.436.210,00</u>

Mutasi pengurang ekuitas tahun berjalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp553.730.533,00 merupakan penggunaan laba untuk Tantiem sebesar Rp88.596.885,00, CSR sebesar Rp66.447.664,00, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp221.492.213,00, dan Jasa Produksi sebesar Rp177.193.771,00.

c. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa

Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.

Nilai Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang tersaji sebesar Rp75.344.473.709,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp69.371.895.535,00
Mutasi tahun berjalan:	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp6.862.597.492,00
Setoran Deviden Tahun 2023	-Rp3.254.461.610,00
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	-Rp2.662.741.316,00
Koreksi	Rp5.027.183.608,00
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp75.344.473.709,00</u>

Mutasi pengurang ekuitas tahun berjalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp975.642.238,00 merupakan penggunaan laba untuk cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar Rp1.183.440.585,00, CSR sebesar Rp295.860.146,00, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp473.376.234,00, Jasa Tantiem sebesar Rp236.688.117,00 dan Jasa Produksi sebesar Rp473.376.234,00.

d. PT Luk Ulo Farma (Perseroda)

PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

Kepemilikan Modal Pemkab Kebumen ke PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.

Nilai Investasi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp3.954.104.149,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp3.837.769.500,00
Mutasi tahun berjalan:	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp389.328.051,00
Setoran Deviden Tahun 2023	0
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	-Rp3.207.535,00
Koreksi	-Rp269.785.867,00
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp3.954.104.149,00</u>

Mutasi pengurang ekuitas tahun berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.207.535,00 merupakan penggunaan laba untuk CSR.

- e. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya.
Kepemilikan Modal Pemkab Kebumen ke PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.

Nilai Investasi pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp5.683.786.000,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2024:	Rp2.640.853.303,00
Mutasi tahun berjalan:	
Penambahan Investasi	Rp2.500.000.000,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp542.932.697,00
Setoran Deviden Tahun 2023	Rp0,00
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Saldo akhir 31 Des 2024:	<u>Rp5.683.786.000,00</u>

Penyertaan Modal Pemkab Kebumen pada Tahun 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan nilai investasi pada 31 Desember 2024 sebesar Rp5.683.786.000,00 dengan penambahan dari laba tahun berjalan sebesar Rp542.932.697,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	<u>Rp4.236.824.607.190,46</u>	<u>Rp3.936.149.530.596,51</u>

Perincian masing-masing aset tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.33 Rincian Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1.	Tanah	923.762.056.233,55	811.434.718.585,55	112.327.337.648,00	13,84
2.	Peralatan dan Mesin	1.245.620.629.948,00	1.136.839.523.231,00	108.781.106.717,00	9,57



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
3.	Gedung dan Bangunan	1.782.429.730.544,00	1.741.811.783.185,00	40.617.947.359,00	2,33
4.	Jalan Jaringan dan Irigasi	3.225.563.088.219,25	2.917.657.832.729,25	307.905.255.490,00	10,55
5.	Aset Tetap Lainnya	122.753.768.897,00	111.986.224.096,00	10.767.544.801,00	9,62
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	9.107.918.708,00	9.455.386.708,00	(347.468.000,00)	(3,67)
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.072.412.585.359,34)	(2.793.035.937.938,29)	(279.376.647.421,05)	10,00
	Jumlah	4.236.824.607.190,46	3.936.149.530.596,51	300.675.076.593,96	52,24

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap selama Tahun 2024 disajikan sebagaimana **Lampiran 48**. Selain itu terdapat saldo aset tetap ekstra komptabel tahun 2024 sebesar Rp52.481.728.635,00 yang tidak disajikan sebagai saldo aset tetap. Penjelasan masing-masing jenis aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024
Rp923.762.056.233,55

31 Desember 2023
Rp811.434.718.585,55

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp	811.434.718.585,55
Mutasi tambah			
Belanja Modal	:	Rp	5.547.762.848,00
Mutasi antar SKPD	:	Rp	12.630.766.900,00
Hasil Inventarisasi	:	Rp	109.574.713.800,00
Koreksi	:	Rp	16.510.728.865,00
Mutasi kurang			
Reklas ke Aset Lain-lain	:	-Rp	2.774.799.000,00
Mutasi antar SKPD	:	-Rp	12.630.766.900,00
Hibah	:	-Rp	20.340.000,00
Koreksi	:	-Rp	16.510.728.865,00
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp	923.762.056.233,55

Penjelasan mutasi Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp5.547.762.848,00 merupakan belanja modal tanah pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengadaan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Tamanwinangun seluas 1.918 m² senilai Rp2.417.863.185,00 dan di Desa Muktisari seluas 4.196 m² senilai Rp3.129.899.663,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 2) Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3.34 Penambahan Aset Tetap Tanah Karena Mutasi antar SKPD TA 2024

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.684.206.000,00	Tanah Bangunan Terminal Darat
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		615.000.000,00	Tanah Bangunan Terminal Darat
3	Dinas Kesehatan	Laboratorium Kesehatan	68.400.000,00	Tanah Bangunan Laboratorium
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	631.504.000,00	Tanah Jalan (utara stadion)
5	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	SMP Negeri 2 Karangsambung	42.500.000,00	Regrup
6	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	SMP Negeri 2 Sempor	14.500.000,00	Regrup
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	1.245.300.000,00	Tanah Kebun Induk/Kebun Dinas
8	Kelurahan Kebumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.262.000.000,00	Tanah Jalan (jalan mangga)
9	Kelurahan Tamanwinangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.356.900,00	Tanah jalan (Jalan Tamansari)
	Jumlah		12.630.766.900,00	

- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah karena baru dicatat hasil inventarisasi senilai Rp109.574.713.800,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanah jalan kabupaten merupakan penambahan ruas jalan baru sebagaimana SK Nomor 600.1.1/544 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Penambahan tanah jalan tersebut berasal dari tanah jalan non status, tanah jalan nasional dan tanah jalan desa. Tanah hasil inventarisasi dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.35 Daftar Tanah Hasil Inventarisasi

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	298.617.300,00	Jalan Wonoharjo-Giyanti perubahan trase berasal dari tanah jalan non status
2	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	168.300.000,00	Jalan Prembun-Wonocolo perubahan trase berasal dari jalan non status
3	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	65.625.000,00	Jalan Sarwogadung-Bonorowo perubahan trase dari jalan desa



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.117.280.000,00	Jalan Suprpto Timur Gombong (penambahan jalan dari jalan non status)
5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.587.264.000,00	Jalan Pantai Suwuk (penambahan jalan dari jalan non status)
6	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.292.290.000,00	Jalan Wonosari-Jatisari (penambahan jalan dari jalan desa)
7	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	821.085.000,00	Jalan Kaligending-Karangrejo(penambahan jalan dari jalan non status)
8	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.654.500.000,00	Jalan Tegalretno-Pandan Kuning (penambahan jalan dari jalan non status)
9	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	37.836.800.000,00	Jalan K.H. Hasyim Asy'ari (penambahan jalan dari jalan nasional)
10	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	46.971.000.000,00	Jalan Ahmad Yani (penambahan jalan dari jalan nasional)
11	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	926.720.000,00	Jalan Lingkar Wisata Jembangan(penambahan jalan dari jalan desa)
12	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.076.475.000,00	Jalan Sarwogadung - Mrentul (Penambahan ruas jalan baru dari jalan desa)
13	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.757.720.000,00	Jalan Mrentul - Pujodadi(penambahan jalan dari jalan non status)
14	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.001.037.500,00	Jalan Wiromartan - TPI Rowo (Penambahan ruas jalan baru dari jalan non status)
	Jumlah	109.574.713.800,00	

- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah karena baru koreksi senilai Rp16.510.728.865,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa perubahan trase (ruas) tanah jalan kabupaten sebagaimana SK Nomor 600.1.1/544 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Penambahan tanah karena koreksi dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.36 Daftar Koreksi Aset Tetap Tanah

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	691.751.427,00	Jalan Karangsambung - Giritirto
2	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	332.447.663,00	Bocor – Kejayan
3	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	420.923.077,00	Jalan Kejayan
4	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	335.489.362,00	Jalan Raya Soka
5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.127.710.912,00	Perubahan trase Ruas Jalan HM. Sarbini Kebumen
6	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	185.400.000,00	Jalan Karanganyar-Kemujan (Penggabungan dengan Jalan Kaleng Karanganyar)
7	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	317.537.827,00	Mangli - Karang Sari
8	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	993.931.149,00	Jl.R.Bodronolo
9	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.864.457.960,00	Jalan Soekarno Hatta (Baru)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
10	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.870.865.368,00	Jalan Merdeka (Baru)
11	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	370.214.120,00	Jalan Kenanga (Baru)
	Jumlah	16.510.728.865,00	

- 5) Pengurangan aset tetap tanah karena direklas ke aset lain-lain (barang akan diserahkan ke pihak lain) senilai Rp2.774.799.000,00 ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara rinci sebagai berikut:
- Jalan Wonoharjo-Giyanti akan diserahkan ke desa sepanjang 7.400 m dengan nilai Rp430.754.000,00
 - Jalan Semondo-Selokerto akan diserahkan ke desa senilai Rp169.920.000,00
 - Jalan Inspeksi Kalipucang dilepas dari Jalan Kabupaten karena masih kesatuan dengan tanggul kali pucang (BBWSSO) senilai Rp288.000.000,00
 - Jalan Prembun-Mrentul karena perubahan trase menjadi ruas Jalan Prembun-Wonocolo, akan diserahkan ke desa sepanjang 1.700 m dengan nilai Rp520.200.000,00
 - Jalan Sidomukti - Bonjok karena perubahan menjadi ruas Sidomukti-Sembir, akan diserahkan ke desa sepanjang 1.590 m, dengan nilai Rp469.050.000,00
 - Jalan Tersobo-Bonorowo karena perubahan trase menjadi ruas Jalan Sarwogadung-Bonorowo, akan diserahkan ke desa sepanjang 1.900 m dengan nilai Rp896.875.000,00
- 6) Pengurangan Aset tetap tanah karena hibah senilai Rp20.340.000,00 merupakan hibah satu bidang tanah kepada Kementerian Agama Kebumen seluas 565m² yang terletak di Kelurahan Karanganyar sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 23 september 2024.
- 7) Pengurangan aset tetap tanah karena koreksi senilai Rp16.510.728.865,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanah jalan kabupaten karena perubahan ruas jalan sebagaimana SK Nomor 600.1.1/544 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Adapun rincian koreksi sebagai berikut:

Tabel 5.3.37 Daftar Pengurangan Koreksi Aset Tetap Tanah

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	295.999.361,00	Jalan Karangsambung-Sadangwetan (Pemotongan ruas menjadi ruas Jalan Totogasn-Sadangwetan)
2	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	332.447.663,00	Jalan Jatisari - Kejayan (pemotongan ruas menjadi jalan Jatisari - Bocor)
3	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	420.923.077,00	Jalan Tamanwinangun - Bocor (pemotongan menjadi Muktisari - Bocor)
4	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	395.752.066,00	Jalan Kebakalan-Giritirto (pemotongan menjadi ruas Jalan Kebakalan Mangir)
5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	335.489.362,00	Pemotongan Ruas Jalan Soka - Klirong (Menjadi Soka - Klirong)
6	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	185.400.000,00	Jalan Kaleng Karanganyar (Penggabungan dengan Karanganyar-Kemujaan)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
7	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	317.537.827,00	Jalan Kemujan - Karang Sari (pemotongan menjadi jalan Kemujan - Mangli)
8	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.150.176.923,00	Jalan Veteran Berkurang: depan Setda masuk Jalan Merdeka
9	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	505.226.549,00	Jalan Sutoyo Kebumen Berkurang: depan Pendopo masuk Jalan Merdeka
10	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	993.931.149,00	Pemotongan ruas Jalan Giwangretno-Mertokondo dan perubahan nama menjadi Jl.K.H. Ahmad Dahlan
11	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.207.630.768,00	Jalan Pahlawan menjadi Ruas Jalan Soetta, Ruas Jalan Merdeka, Ruas Jalan HM. Sarbini
12	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	370.214.120,00	Jalan Gombang - Purwodadi (pemotongan menjadi Jalan Kemukus - Purwodadi)
	Jumlah	16.510.728.865,00	

Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki aset tetap tanah yang menghasilkan pendapatan sewa di mana menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, termasuk kategori properti investasi. Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi, tanah dimaksud berupa tanah eks bengkok yang ada pada 11 kelurahan dan tanah yang disewa oleh PT. JJ Spotecindo sebanyak 350 bidang dengan luas tanah 1.045.373 m². Rincian tanah yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi disajikan sebagaimana **Lampiran 49**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.245.620.629.945,00	Rp1.136.839.523.231,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp 1.136.839.523.231,00
Mutasi tambah		
Belanja Modal	:	Rp 86.561.283.223,00
Belanja Modal BOS/BLUD	:	Rp 31.385.915.686,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 1.182.701.879,00
Mutasi antar SKPD	:	Rp 32.402.544.210,00
Perolehan dari Hibah	:	Rp 1.701.435.266,00
Hasil inventarisasi	:	Rp 16.286.000,00
Koreksi	:	Rp 1.600.000,00
Reklasifikasi	:	Rp 1.013.780.624,00
Mutasi kurang		



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Kondisi Rusak Berat/Usul Penghapusan	:	-Rp	10.177.452.782,00
Mutasi antar SKPD	:	-Rp	32.402.544.210,00
Hibah	:	-Rp	627.323.500,00
Koreksi	:	-Rp	1.184.811.799,00
Reklasifikasi	:	-Rp	1.092.307.880,00
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp	1.245.620.629.948,00

Penjelasan Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp86.561.283.223,00 per SKPD disajikan sebagaimana **Lampiran 50**.
- 2) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD sebesar Rp31.385.915.686,00 berasal dari Belanja Modal Dana BOS dan belanja BLUD dengan rincian tercantum dalam tabel.

**Tabel 5.3.38 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
dari Belanja Modal BOS/BLUD TA 2024**

No	SKPD	Nilai (Rp)	BOS/BLUD
1	SD Negeri	16.594.158.538,00	BOS
2	SMP Negeri	5.330.990.618,00	BOS
3	Puskesmas	3.736.645.666,00	BLUD
4	RSUD dr. Soedirman	4.002.374.332,00	BLUD
5	RSUD Prembun	1.721.746.532,00	BLUD
JUMLAH		31.385.915.686,00	

- 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.182.701.879,00 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa ada pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.39 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
dari Belanja Barang dan Jasa**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bagian Umum	206.183.400,00	Belanja pemeliharaan gedung
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.221.000,00	Belanja perabot kantor
3	RSUD dr. Soedirman	650.209.004,00	Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan belanja alat kedokteran
4	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	156.643.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	119.443.500,00	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.000.000,00	Belanja pemeliharaan gedung



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.240.000,00	Belanja komponen komputer
8	Kecamatan Kuwarasan	27.882.875,00	Belanja pemeliharaan gedung
9	Kelurahan Wonokriyo	1.878.500,00	Belanja Alat/Bahan kegiatan kantor
	Jumlah	1.182.701.879,00	

- 4) Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD senilai Rp32.402.544.210,00 disajikan dalam **Lampiran 51**.
- 5) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan dari Hibah senilai Rp1.701.435.266,00 ada pada SKPD sebagai berikut

Tabel 5.3.40 Daftar Penerimaan Hibah Barang Tahun 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	652.444.000,00	Hibah BNPB BAST No.16/BNPB/SU/RS.03.03/07/2022 tanggal 20 Juli 2022
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	339.116.266,00	Hibah Kemenkes BAST No.BJ.01.04/PPK4.2/452/2023 dan BAST No.KN.01.05/BIII.I/441/2024
3	RSUD dr. Soedirman	579.100.000,00	CSR dari BRI dan Bank Jateng
4	RSUD Prembun	8.350.000,00	Hibah dari PT Dian Langgeng Pratama BAST No.DLP-PURCHASING/2024/XII/124
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	122.425.000,00	Hibah dari komite sekolah
	Jumlah	1.701.435.266,00	

- 6) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan hasil inventarisasi senilai Rp12.286.000,00 ada pada Kecamatan Klirong berupa dua buah laptop.
- 7) Penambahan aset tetap peralatan mesin karena koreksi ada pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (SDN Tunjungseto Kecamatan Sempor) berupa koreksi perubahan kode barang senilai Rp1.600.000,00.
- 8) Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi senilai Rp1.013.780.624,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.41 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	481.159.824,00	Reklas dari IJ
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	332.819.300,00	Reklas dari Belanja Aset Tetap Lainnya BOS



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	190.725.000,00	Reklas dari belanja Gedung dan Bangunan
4	Kecamatan Poncowarno	9.076.500,00	Reklas dari aset lainnya rusak berat
	Jumlah	1.013.780.624,00	-

- 9) Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.177.452.782,00 yang di reklasifikasi ke Aset Lainnya merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat dengan rincian setiap SKPD sebagaimana tabel **Lampiran 52**.
- 10) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp627.323.500,00 merupakan hibah kepada Kepolisian Resort Kebumen berupa dua unit Kendaraan Roda 4 sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
- 11) Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan senilai Rp1.184.811.799,00 disebabkan karena pengadaan belanja modal yang tidak memenuhi kategori aset tetap senilai Rp1.153.364.299,00, koreksi ubah kode barang senilai Rp1.600.000,00 dan koreksi bukan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen senilai Rp29.847.500,00 dan dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagaimana **Lampiran 53**.
- 12) Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi senilai Rp1.092.307.880,00 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 5.3.42 Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	74.901.600,00	Aset Tetap Lain
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	996.326.380,00	ekstrakompatable
3	Puskesmas Klirong 1	436.000,00	ekstrakompatable
4	Puskesmas Ambal 1	4.425.000,00	ekstrakompatable
5	Puskesmas Ambal 2	170.000,00	ekstrakompatable
6	Puskesmas Padureso	439.500,00	ekstrakompatable
7	Puskesmas Kuwarasan	9.000.000,00	ekstrakompatable
8	Puskesmas Sempor 1	2.000.000,00	ekstrakompatable
9	Puskesmas Karanggayam 1	951.900,00	ekstrakompatable
10	Puskesmas Karanggayam 2	250.000,00	ekstrakompatable
11	Kelurahan Kebumen	210.000,00	ekstrakompatable
12	Kelurahan Selang	460.000,00	ekstrakompatable
13	Kecamatan Alian	1.443.000,00	ekstrakompatable
14	Kecamatan Prembun	696.500,00	ekstrakompatable
15	Kecamatan Ayah	400.000,00	ekstrakompatable



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas ke
16	Kecamatan Bonorowo	198.000,00	ekstrakompatable
	Jumlah	1.092.307.880,00	

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024
Rp1.782.429.730.544,00

31 Desember 2023
Rp 1.741.811.783.185,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp 1.741.811.783.185,00
Mutasi tambah		
Belanja Modal	:	Rp 34.203.672.173,00
Belanja Modal BLUD	:	Rp 6.095.803.744,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 8.261.956.947,00
Mutasi antar SKPD	:	Rp 34.523.540.153,00
Hibah	:	Rp 160.000.000,00
Reklasifikasi	:	Rp 98.629.000,00
Mutasi kurang		
Kondisi Rusak Berat	:	-Rp 4.501.225.272,00
Mutasi antar SKPD	:	-Rp 34.523.540.153,00
Hibah	:	-Rp 2.747.435.250,00
Koreksi	:	-Rp 39.609.000,00
Reklasifikasi	:	-Rp 913.844.983,00
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp 1.782.429.730.544,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.43 Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
dari Belanja Modal TA 2024**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.072.986.959,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	103.307.900,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.705.425.230,00
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	14.172.647.030,00
5	Dinas Pertanian dan Pangan	2.006.772.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	501.755.054,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7.151.871.500,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.276.748.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
9	Kelurahan Panjatan	197.158.000,00
10	Kecamatan Rowokele	15.000.000,00
	JUMLAH	34.203.672.173,00

Penjelasan masing-masing penambahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pendopo Kabumian dan Pembangunan Gudang SPKT POLRES Kebumen
- Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan berupa Bangunan Shelter di Wilayah Pejagoan dan Wilayah Sruweng
- Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Bangunan Puskesmas Pembantu Panjangsari, Bangunan Puskesmas Pembantu Klopogodo, Bangunan Puskesmas Pembantu Semondo, Bangunan BP Kec. Buluspesantren, dan Bangunan Cathlab RSDS
- Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berupa Rehab Calon Kampus UNS / RSUD Lama dan Gedung Sekolah pada SDN 1 Kebumen, SDN 1 Kalipuru Karangsambung, SDN Kaliputih Alian, SDN Plempukan Kembaran Ambal, SDN Grogolbeningsari Petanahan, SDN Ampelsari Petanahan, SDN 1 Giwangretno Sruweng, SDN 2 Kalirejo Karanggayam, SDN 3 Selogiri Karanggayam, SDN Ginandong Karanggayam, SDN 1 Binangun Karanggayam, SDN 1 Kuwarasan Kuwarasan, SDN 1 Sawangan Kuwarasan, SDN Madureso Kuwarasan, SDN 1 Kalitengah Gombang, SDN Patemon Gombang, SDN Somagede Sempor, SDN 2 Sampang Sempor, SDN 2 Bumiagung Rowokele, SDN Kalipoh Ayah, SDN 1 Banjararjo, SDN 1 Ayah, SDN 1 Ngoraji Buayan, SDN Karangbolong Buayan, SDN Klaigesing Sadang, SDN 1 Jembatan Poncowarno, SDN Balerejo Bonorowo, SMPN 7 Kebumen, SMPN 1 Karangsambung, SMPN 2 Adimulyo, SMPN 2 Sempor, SMPN 1 Ayah, SMPN 2 Ayah, SMPN 3 Satu Atap Ayah, SMPN 1 Buayan, dan SMPN 1 Bonorowo.
- Pada Dinas Pertanian dan Pangan, belanja modal Gedung dan Bangunan berupa bangunan gedung RPH Gombang dan Bangunan Pagar Kantor Dinas Pertanian dan Pangan.
- Pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan berupa bangunan TPI Perintis (Puring) dan Tempat paker perahu TPI Argopeni Ayah
- Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan KUKM belanja modal gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung SIHT, Bangunan pusat kuliner alun-alun, Pasar hewan gombang dan DED Perencanaan Pasar Pagi
- Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa pembangunan gedung Pusat Informasi Geopark Kebumen dan rumah Genset Goa Jatijajar
- Pada Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar, belanja modal bangunan gedung berupa pembangunan gedung TK
- Pada Kecamatan Rowokele berupa bangunan kamar mandi pada Kecamatan Rowokele



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD senilai Rp6.095.803.744,00 secara rinci disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.44 Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
dari Belanja Modal BLUD TA 2024**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	1.378.830.194,00	revitalisasi ruang onkologi dan pagar
2	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	4.644.473.550,00	Bangunan Bangsal rawat jiwa
3	Puskesmas Sruweng	72.500.000,00	Bangunan Mushola
	JUMLAH	6.095.803.744,00	

- 3) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp8.261.956.947,00 ada pada SKPD sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berupa kapitalisasi belanja pemeliharaan pada pemeliharaan Gedung Olahraga Gombang senilai Rp212.076.195,00, Stadion Candradimuka senilai Rp212.076.195,00 dan Revitalisasi Alun-alun Pancasila senilai Rp7.693.293.657,00
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa kapitalisasi belanja pemeliharaan pada rehab ruang rapat dan teras bangunan gedung kantor BPKPD Jalan Pahlawan No. 2 Kebumen senilai Rp144.510.900,00
- 4) Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD senilai Rp34.523.540.153,00 disajikan dalam **Lampiran 54**.
- 5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp160.000.000,00 ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa bangunan mushola hibah dari masyarakat sesuai BA Hibah tanggal 26 Agustus 2022.
- 6) Sedangkan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi senilai Rp98.629.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED Perencanaan Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pendopo Kabumian.
- 7) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas barang kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.45 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Banguna
karena Diusulkan Hapus TA 2024**

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	551.413.000,00	Bangunan Rumah Dinas Bupati
2	Puskesmas Puring	40.905.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
3	Puskesmas Padureso	2.296.868.532,00	Bangunan Klinik/Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Puskesmas Poncowarno	48.400.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
5	Puskesmas Rowokele	24.240.000,00	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen
6	Puskesmas Sempor 2	47.470.000,00	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)
7	Puskesmas Gombang 2	96.920.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
8	Puskesmas Karangsambung	69.000.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
9	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	210.342.000,00	SD Nampudadi Kecamatan Petanahan dan SDN 2 Sruweng Kecamatan Sruweng
10	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.115.666.740,00	Bangunan Terminal non Bus, Jalan Sutoyo Kebumen
	Jumlah	4.501.225.272,00	

8) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena hibah senilai Rp2.747.435.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia berupa gedung Polsek Poncowarno senilai Rp1.920.115.600,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 28 Tahun 2024,
- Pada Dinas Pendidikan berupa Bangunan Tempat Pendidikan eks SD *Regrouping* yang diserahkan ke desa berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada SD Negeri 1 Sawangan Kecamatan Alian senilai Rp403.723.650,00 sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 6 Tahun 2024,
- Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ada pada SD Negeri 3 Karanganyar yang dihibahkan ke Kementerian Agama senilai Rp423.596.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 26 Tahun 2024.

9) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp39.609.000,00 merupakan koreksi pencatatan pada SKPD sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa koreksi pencatatan ganda atribusi berupa jasa konsultan perencanaan senilai Rp29.415.000,00
- Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp10.194.000,00 merupakan koreksi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi pada BB Srimadono dan BPP Prembun

10) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi senilai Rp913.844.983,00 dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

**Tabel 5.3.46 Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
karena Reklasifikasi TA 2024**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas Ke
1	RSU Prembun	576.921.250,00	Jalan Jaringan dan Irigasi (Jalan Masuk Bangsal Jiwa)
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (SDN 1 Kalipuru Kecamatan	120.935.083,00	Jalan Jaringan dan Irigasi (Talud)
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	14.208.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Jasa Konsultansi Pengawas Bangunan Pasar Pagi)
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	201.780.650,00	Peralatan dan Mesin
	JUMLAH	913.844.983,00	

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2024
Rp3.225.563.088.219,25

31 Desember 2023
Rp2.917.657.832.729,25

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp	2.917.657.832.729,25
Mutasi tambah			
Belanja Modal	:	Rp	101.856.275.612,00
Belanja BLUD	:	Rp	1.000.759.640,00
Mutasi dari Dinas Lain	:	Rp	8.370.880.156,00
Hibah	:	Rp	27.044.692.900,00
Hasil inventarisasi	:	Rp	186.838.783.774,00
Koreksi	:	Rp	50.827.707.504,00
Reklasifikasi	:	Rp	960.903.333,00
Mutasi kurang			
Kondisi Rusak Berat / Reklas Aset			
Lainnya	:	-Rp	9.045.716.851,00
Mutasi antar SKPD	:	-Rp	8.370.880.156,00
Koreksi	:	-Rp	50.827.707.504,00
Reklasifikasi	:	-Rp	750.442.918,00
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp	3.225.563.088.219,25

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari Belanja Modal tahun 2024 disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.47 Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Modal TA 2024

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.867.333.514,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	19.416.523.098,00
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	572.419.000,00
	JUMLAH	101.856.275.612,00

- 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari Belanja BLUD senilai Rp1.000.759.640,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.48 Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Modal BLUD TA 2024

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Sempor 2	20.000.000,00
2	Puskesmas Karangsembung	29.750.000,00
3	RSUD dr. Soedirman	951.009.640,00
	JUMLAH	1.000.759.640,00

- 3) Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Mutasi antar SKPD tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.49 Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Mutasi antar SKPD TA 2024

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.210.260.455,00	Instalasi listrik
		Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	4.934.419.539,00	Jalan Khusus Pejalan Kaki
		Kelurahan Kebumen	331.265.529,00	Saluran Drainase
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas	1.894.934.633,00	LPJU
Jumlah			8.370.880.156,00	

- 4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari hibah senilai Rp27.044.692.900,00 merupakan hibah Jalan Tegalretno-Pandan Kuning, dari Satuan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Nomor : 111/BAST/Bb7.7/2024 dan Nomor : 000.2.3.2/168/2024 Tanggal 24-01-2024.

- 5) Penambahan aset tetap Jalan Jaringan Irigasi karena hasil inventarisasi merupakan penambahan ruas jalan sebagaimana SK Bupati Kebumen Nomor : 600.1.1/544 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Jalan Kabupaten. Nilai konstruksi jalan tersebut berdasarkan nilai NJOP tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.50 Daftar Penambahan Hasil Inventarisasi Jalan

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	222.949.858,00	Ruas Jalan Prembun-Mrentul menjadi Ruas Jalan Prembun-Wonocolo
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	25.562.011,00	Ruas Jalan Tersobo-Bonorowo menjadi Ruas Jalan Sarwogadung-Bonorowo, Perubahan nama dan trase
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.039.602.991,00	Ruas Jalan Wonoharjo-Giyanti
4	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.764.400.000,00	Jalan Suprpto Timur Gombang
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	17.699.425.714,00	Jalan Munggu - Tambakmulyo/ex Daendels
6	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.192.864.000,00	Jalan Pantai Suwuk
7	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.875.510.000,00	Jalan Wonosari - Jatisari Tahun 2024
8	Jalan Kabupaten Lain-lain	720.585.000,00	Jalan Kaligending - Karangrejo
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	13.194.456.000,00	Jalan Munggu -Pandan/Ex Daendels
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.128.943.200,00	Jalan Workshop
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	7.569.420.000,00	Jalan dr. R. Moehiman Kromoatmodjo
12	Jalan Kabupaten Lain-lain	4.474.190.000,00	Jalan Jaksa Agung R. Soeprpto
13	Jalan Kabupaten Lain-lain	37.836.800.000,00	Jalan K.H. Hasyim Asy'ari
14	Jalan Kabupaten Lain-lain	46.971.000.000,00	Jalan Ahmad Yani
15	Jalan Kabupaten Lain-lain	824.320.000,00	Jalan Lingkar Wisata Jembatan
16	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.076.475.000,00	Jalan Sarwogadung - Mrentul
17	Jalan Kabupaten Lain-lain	6.471.900.000,00	Jalan Kejayan-Truntung/Ex Daendels
18	Jalan Kabupaten Lain-lain	12.120.960.000,00	Jalan Kejayan-Ambal/Ex Daendels
19	Jalan Kabupaten Lain-lain	15.159.720.000,00	Jalan Ambal-Miritpetikusan/Ex Daendels
20	Jalan Kabupaten Lain-lain	13.469.700.000,00	Jalan Miritpetikusan-Wawar/Ex Daendels
		186.838.783.774,00	

- 6) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena koreksi senilai Rp50.827.707.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.51 Daftar Penambahan Aset Jalan Irigasi Jaringan karena Koreksi

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	12.371.579.148,00	Karangsambung-Giritirto
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	4.689.661.977,00	Jalan Bocor - Kejayan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	5.137.291.884,00	Jalan Kejayan
4	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.596.661.799,00	Jalan Raya Soka
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	60.746.422,00	Jalan Karanganyar-Kemujan
6	Jalan Kabupaten Lain-lain	6.965.721.876,00	Jalan Mangli - Karangsari
7	Jalan Kabupaten Lain-lain	831.161.978,00	Jalan H.M. Sarbini Kebumen
8	Jalan Kabupaten Lain-lain	751.206.811,00	Jalan Kenanga
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.558.428.708,00	Jalan Soekarno Hatta (Baru)
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.735.544.036,00	Jalan Merdeka (Baru)
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	119.126.203,00	Ruas Jalan R.Bodronolo
12	Jalan Khusus lainnya	502.808.548,00	Koreksi pencatatan dari Jalan Pahlawan dan Jalan Sutoyo
13	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	11.681.400.502,00	Koreksi pencatatan dari Jalan Pahlawan dan Jalan Sutoyo
14	Saluran Drainage	361.262.562,00	Koreksi pencatatan dari Jalan Pahlawan dan Jalan Sutoyo
15	Instalasi gardu listrik lainnya	1.465.106.050,00	Koreksi pencatatan dari Jalan Pahlawan dan Jalan Sutoyo
	JUMLAH	50.827.708.504,00	

- 7) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklasifikasi senilai Rp960.903.333,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.3.52 Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Reklasifikasi TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas dari
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	263.047.000,00	Konstruksi dalam Pengerjaan (DED)
2	RSUD Prembun	576.921.250,00	Gedung dan Bangunan (jalan menuju bangsal jiwa)
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	120.935.083,00	Gedung dan Bangunan (pembangunan talud pada SDN Kalipuru Karangsambung dan SMPN 2 Sruweng)
	Jumlah	960.903.333,00	

- 8) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp9.045.716.851,00 ada pada SKPD sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp5.000.000,00 berupa jaringan transmisi lain-lain (jaringan listrik) barang rusak berat dan akan diusulkan penghapusan,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp461.151.687,00 berupa Bangunan Penguat Tebing pada obwis pantai karangbolong dalam kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan.
- Selain itu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jalan kabupaten yang akan diserahkan ke desa karena perubahan ruas jalan Kabupaten sebagaimana SK Bupati Kebumen Nomor 600.1.1/544 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.53 Daftar Aset Jalan yang akan diserahkan ke Desa

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	3.364.941.602,00	Jalan Inspeksi Kalipucang diserahkan ke BBWSO
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	689.117.742,00	Jalan Prembun-Mrentul diserahkan ke desa
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.010.117.515,00	Jalan Sidomukti - Bonjok diserahkan ke desa
4	Jalan Kabupaten Lain-lain	349.347.480,00	Jalan Tersobo-Bonorowo diserahkan ke desa
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	223.923.450,00	Jalan Semondo-Selokerto diserahkan ke desa
6	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.942.117.375,00	Jalan Wonoharjo-Giyanti diserahkan ke desa
	JUMLAH	8.579.565.164,00	

- 9) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena koreksi sebesar Rp50.827.707.504,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa penggabungan sebagian ruas jalan ke ruas jalan yang lain secara rinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.54 Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Karena Koreksi TA 2024

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	5.689.428.923,00	Jalan Totogan – Sadangwetan
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	4.689.661.977,00	Pemotongan ruas Jatisari - Kejayan Menjadi Jatisari – Bocor
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	5.137.291.884,00	Pemotongan Ruas Tamanwinangun - Bocor Jalan Muktisari – Bocor
4	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.596.661.799,00	Pemotongan Ruas Soka - Klirong menjadi Jalan raya soka, dan ruas Soka-Klirong
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	6.965.721.876,00	Pemotongan Ruas Kemujan - Karang Sari menjadi Kemujan – Mangli
6	Jalan Kabupaten Lain-lain	6.682.150.225,00	Ruas Jalan Kebakalan -Giritirto menjadi Ruas Kebakalan-Mangir
7	Jalan Kabupaten Lain-lain	452.161.322,00	Jalan Sutoyo berkurang depan Pendopo masuk Jalan Merdeka
8	Jalan Kabupaten Lain-lain	694.642.980,00	Ruas Jalan Veteran Berkurang: depan Setda masuk Jalan Merdeka
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	60.746.422,00	Ruas Jalan Kaleng (Penggabungan dengan Ruas Jalan Karanganyar-Kemujan)
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	751.206.811,00	Pemotongan Ruas Gombang - Purwodadi (Menjadi Kemukus - Purwodadi)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	16.988.907.082,00	Pengurangan koreksi Jalan Pahlawan menjadi Jalan Soetta, Jalan Merdeka dan Jalan Sarbini
12	Jalan Kabupaten Lain-lain	119.126.203,00	Ruas Jalan Giwangretno-Mertokondo menjadi Ruas Jalan K.H.Ahmad Dahlan
JUMLAH		50.827.707.504,00	

10) Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp750.442.918,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa reklasifikasi sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin berupa bangku taman pada ruas jalan Soekarno Hatta dan Jalan Sutoyo senilai Rp481.159.824,00 dan
- Reklasifikasi ke aset tetap lainnya berupa tanaman hias senilai Rp151.946.094,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) senilai Rp117.337.000,00 berupa jasa konsultan e-Paksi Jaringan Irigasi dan Updating PAI wilayah Sempor Kedungsamak dan Kaligending Bedegolan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp122.753.768.897,00	Rp111.986.224.096,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp	111.986.224.096,00
Mutasi tambah			
Belanja Modal	:	Rp	87.698.000,00
Belanja Modal BOS	:	Rp	11.957.274.327,00
Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	:	Rp	12.236.800,00
Mutasi dari SKPD lain	:	Rp	882.169.778,00
Hibah	:	Rp	64.601.790,00
Reklasifikasi	:	Rp	226.847.694,00
Mutasi kurang			
Kondisi Rusak Berat/Usul Hapus	:	-Rp	318.062.907,00
Mutasi antar SKPD	:	-Rp	882.169.778,00
Koreksi	:	-Rp	911.833.103,00
Reklasifikasi	:	-Rp	351.217.800,00
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp	122.753.768.897,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

- 1) Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp87.698.000,00 berasal dari belanja modal SKPD berikut.

Tabel 5.3.55 Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal TA 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bagian Umum	4.998.000,00	belanja buku



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
2	Inspektorat	3.500.000,00	belanja buku
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79.200.000,00	belanja buku
	Jumlah	87.698.000,00	

- 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS/BLUD senilai Rp11.957.274.327 terdiri dari Belanja Modal BLUD pada RSUD Prembun dengan nilai Rp600.000,00 dan Belanja BOS ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari 718 Sekolah Dasar Negeri dan 57 Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan total belanja sebagai berikut.

Tabel 5.3.56 Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS TA 2024

No.	SKPD	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar Negeri	7.750.243.516,00	
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri	4.206.430.811,00	
	JUMLAH	11.956.674.327,00	

- 3) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang Jasa menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp12.236.800,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa buku dengan rincian pada Sekolah Negeri sebagai berikut:

Tabel 5.3.57 Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang Jasa menjadi Aset

No.	Nama Sekolah	Nilai (Rp)	Ket
1	TK Pembina Kebumen	6.675.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS
2	SD.N 2 Triwarno Kecamatan Kutowinangun	4.717.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS
3	UPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	844.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS
	JUMLAH	12.236.800,00	

- 4) Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya karena mutasi antar SKPD senilai Rp882.169.778,00 ada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.58 Mutasi antar SKPD Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Bagian Umum	Bagian Hukum	4.998.000,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup Kalautan dan Perikanan	341.515.361,00	
3	SD.N 3 Jatisari Kecamatan Kebumen	SD.N 1 Jatisari Kecamatan Kebumen	58.843.174,00	regrouping
4	SD.N 3 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	SD.N 1 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	49.082.572,00	regrouping
5	SMP Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	SMP Negeri 1 Poncowarno	52.465.069,00	regrouping



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
6	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	SMP Negeri 2 Karangsambung	229.174.315,00	regrouping
7	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	SMP Negeri 2 Sempor	146.091.287,00	regrouping
Jumlah			882.169.778,00	

- 5) Penambahan karena hibah senilai Rp64.601.790,00 merupakan hibah buku dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana Surat Nomor: Manual0394/3/B5.01.00/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- 6) Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari reklasifikasi senilai Rp226.847.694,00 ada pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri senilai Rp74.901.600,00 dan reklas dari Jalan Jaringan Irigasi ke Aset Tetap Lainnya (tanaman) ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp151.946.094,00
- 7) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa barang kondisi rusak berat ada pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.3.59 Pengurangan Aset Tetap Lainnya
karena Barang Rusak Berat/Diusulkan hapus TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (SD Negeri)	251.686.007,00
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (SMP Negeri)	66.376.900,00
	Jumlah	318.062.907,00

- 8) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp911.833.103,00 karena koreksi ada pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berupa koreksi buku karena tidak memenuhi kriteria aset tetap sebagaimana **Lampiran 55**.
- 9) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi tahun 2024 senilai Rp351.217.800,00 ada pada:
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan reklasifikasi dari belanja aset tetap lainnya ke aset tak berwujud berupa software senilai Rp19.700.000,00.
 - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan reklasifikasi dari belanja aset tetap lainnya BOS ke pencatatan peralatan dan mesin sebagaimana **Lampiran 56**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024
Rp9.107.918.708,00

31 Desember 2023
Rp9.455.386.708,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp9.107.918.708,00 secara rinci kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.60 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.605.479.147,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72.594.000,00
3	RSUD dr. Soedirman	415.646.000,00
4	RSUD Prembun	5.809.294.500,00
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	88.023.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	98.829.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	707.100.011,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	310.953.050,00
	Jumlah	9.107.918.708,00

Bertambah dan berkurangnya Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp	9.455.386.708,00
Mutasi tambah			
Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	:	Rp	14.208.000,00
Mutasi kurang			
Reklasifikasi	:	(Rp	<u>361.676.000,00)</u>
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp	9.107.918.708,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp14.208.000,00 ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan reklas dari belanja modal gedung dan bangunan berupa DED Pasar Pagi Kebumen.
- 2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp361.676.000,00 merupakan pengurangan karena reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.61 Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.629.000,00	Reklas ke Gedung dan Bangunan (Rumah Dinas Bupati)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.900.000,00	Reklas ke Jalan Jaringan Irigasi (Jalan Giritirto-Plipitan)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.855.000,00	Reklas ke Jalan Jaringan Irigasi (Jalan Donorojo-Kedungwringin)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.799.000,00	Reklas ke Jalan Jaringan Irigasi (Jalan Wonosari-Kembaran)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.290.000,00	Reklas ke Jalan Jaringan Irigasi (DI Caruban)
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.650.000,00	Reklas ke Jalan Jaringan Irigasi (SPAM Desa Soka Poncowarno)
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.553.000,00	Reklas ke Jalan Jaringan Irigasi (SPAM Desa Semali Sempor)
Jumlah		361.676.000,00	

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp3.072.412.585.359,34)	(Rp 2.793.035.937.938,29)

Bertambah dan berkurangnya Akumulasi Penyusutan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.62 Bertambah dan Berkurang Akumulasi Penyusutan TA 2024

Uraian	Saldo Awal	Beban	Penambahan	Pengurangan	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Peralatan Mesin	(888.026.934.255,00)	(98.139.929.553,00)	(6.264.904.486,00)	(16.287.265.732,00)	(976.144.502.562,00)
Gedung dan Bangunan	(416.458.140.208,00)	(34.327.884.473,00)	(4.930.270.879,00)	(6.481.649.716,00)	(449.234.645.844,00)
Jalan Irigasi dan Jaringan	(1.488.550.863.475,29)	(166.124.834.106,92)	(123.221.536.443,13)	(130.863.797.072,00)	(1.647.033.436.953,34)
JUMLAH	(2.793.035.937.938,29)	(298.592.648.132,92)	(134.416.711.808,13)	(153.632.712.520,00)	(3.072.412.585.359,34)

Penambahan Akumulasi Penyusutan terjadi karena hal- hal sebagai berikut.

Tabel 5.3.63 Penambahan Akumulasi Penyusutan TA 2024

No	Uraian	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Koreksi Perhitungan Ulang	(828,00)	(206,00)	(393,13)
2	Mutasi Masuk	(6.229.404.984,00)	(4.923.870.673,00)	(1.076.164.276,00)
3	Mutasi Masuk Karena Kapitalisasi	-	-	-
4	Hibah	-	(6.400.000,00)	-
5	Hasil Inventarisasi	(16.286.000,00)	-	-
6	Koreksi Nilai	(673.196,00)	-	(121.607.422.577,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	Reklasifikasi antar KIB	-	-	-
8	Batal Hapus	-	-	-
9	Update Masa Manfaat	(11.395.291,00)	-	-
10	Koreksi Tahun	(1.641.521,00)	-	-
11	Ubah Kode	(5.502.666,00)	-	(537.949.197,00)
	JUMLAH	(6.264.904.486,00)	(4.930.270.879,00)	(123.221.536.443,13)

Pengurangan Akumulasi Penyusutan terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

Tabel 5.3.64 Pengurangan Akumulasi Penyusutan TA 2024

No	Uraian	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (RB)	(9.758.035.187,00)	(1.499.656.991,00)	(231.700.844,00)
2	Koreksi Perhitungan Ulang	(1.300,00)	(188,00)	(151,00)
3	Mutasi Keluar	(5.811.404.480,00)	(4.834.196.639,00)	(160.155.586,00)
4	Mutasi Keluar Karena Kapitalisasi	-	(3.787.640,00)	-
5	Hibah	(228.880.000,00)	(143.959.233,00)	-
6	Pencatatan Ganda			
7	Hasil Inventarisasi			
8	Tidak Memenuhi Kategori Aset Tetap			
9	Koreksi Nilai	(2.260.000,00)	(49.025,00)	(129.933.991.294,00)
10	Reklasifikasi antar KIB			
11	Update Masa Manfaat	(480.948.622,00)	-	-
12	Koreksi Tahun	(56.143,00)	-	-
13	Ubah Kode	(5.680.000,00)	-	(537.949.197,00)
	JUMLAH	(16.287.265.732,00)	(6.481.649.716,00)	(130.863.797.072,00)

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2024

Rp0,00

31 Desember 2023

Rp12.774.460.000,00

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka dibentuklah Dana Cadangan. Ketentuan Dana Cadangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024. Penyisihan atas penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

Daerah untuk Dana Cadangan dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 dengan rincian anggaran yang disisihkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Penganggaran belanja Dana Cadangan pada rekening Pengeluaran Pembiayaan dan telah dicairkan pada Tahun 2022 dengan SP2D nomor 01789/LS-PEMBY/DAU/2022 tanggal 13 Desember 2022 senilai Rp.15.000.000.000,00 dan SP2D Nomor 00107/LS-PEMBY/DAU/2023 Tanggal 1 Maret 2023 senilai Rp20.000.000.000,00. Atas dana Cadangan tersebut pada Tahun 2023 telah dilakukan pencairan Dana Cadangan sebesar Rp22.225.540.000,00 berdasarkan Surat Edaran Mneteri Dalam Neneri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ Tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota , dan Naskah Perjanjian Hibah Dearah antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2023 dan 551/KU07-50/3305/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Badab Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2023 dan 1179/HK.02.00/K.JT-12/11/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024. Besaran pencairan Dana Cadangan sebesar 40% pada Tahun Anggaran 2023 yaitu terdiri dari Komisi Pemilhan Umum sebesar Rp18.157.708.000,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp4.067.832.000,00. Sehingga sisa Dana Cadangan yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1.008.01018.4 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.774.460.000,00. Berdasarkan NPHD dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, pada Tahun 2024 telah dilakukan pencairan pada Bawaslu dengan No SP2D 33.05/04.0/000022/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp6.101.748.000,00 dan Komisi Pemilihan Umum dengan No SP2D 33.05/04.0/000020/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp27.236.564.000,00. Sehingga Nilai Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp118.606.286.911,00	Rp116.722.478.191,44

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan secara neto setelah diperhitungkan akumulasi amortisasi, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.65 Aset Lainnya TA 2024 dan TA 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Kemitraaan dengan Pihak Ketiga	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	-	-
Aset Tidak berwujud	6.190.026.670,00	5.922.595.030,00	267.431.640,00	4,52
Aset Lain-lain	111.827.035.490,00	132.099.376.769,44	(20.272.341.279,44)	(15,35)
Akumulasi Amortisasi ATB	(3.810.076.646,00)	(3.301.923.144,00)	(508.153.502,00)	15,39
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(11.625.399.291,00)	(34.132.133.152,00)	22.506.733.861,00	100,00
Jumlah	118.716.148.911,00	116.722.478.191,44	1.993.670.719,56	104,56

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2024
Rp16.134.562.688,00

31 Desember 2023
Rp16.134.562.688,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau *Built Operate Transfer (BOT)*. Aktiva lain-lain BOT adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2024 dan perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.66 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo	15.379.170.688,00
Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo	755.392.000,00
Jumlah	16.134.562.688,00

Nilai BOT di atas merupakan nilai pembangunan pasar Wonokriyo Gombang pada Tahun 1995, sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Dalam pembangunan pasar Wonokriyo Gombang, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805m² (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombang. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang dimitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00.

Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928m² atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklasifikasikan ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024
Rp6.190.026.670,00

31 Desember 2023
Rp5.922.595.030,00

Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.67 Aset Tidak Berwujud TA 2024 dan TA 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
DED	1.714.784.400,00	1.560.440.000,00	154.344.400,00	9,89
Software	4.475.242.270,00	4.362.155.030,00	113.087.240,00	2,59
Jumlah Nilai Perolehan	6.190.026.670,00	5.922.595.030,00	267.431.640,00	4,52

Rincian aset tidak berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.68 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2024

No	OPD	DED/ Kajian (Rp)	Software (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		69.025.600,00	69.025.600,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		15.690.000,00	15.690.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman		1.713.943.000,00	1.713.943.000,00
4	Puskesmas Karanggayam II		4.000.000,00	4.000.000,00
5	Puskesmas Petanahan		79.600.000,00	79.600.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.452.843.000,00	7.900.000,00	1.460.743.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	261.941.400,00	214.945.900,00	476.887.300,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		173.998.000,00	173.998.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika		350.317.150,00	350.317.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	OPD	DED/ Kajian (Rp)	Software (Rp)	Jumlah (Rp)
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		298.535.420,00	298.535.420,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		121.110.000,00	121.110.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		213.958.100,00	213.958.100,00
13	Dinas Tenaga Kerja		96.765.000,00	96.765.000,00
14	Bagian Hukum		80.473.300,00	80.473.300,00
15	Bagian Pembangunan		82.809.000,00	82.809.000,00
16	Bagian Organisasi		54.340.000,00	54.340.000,00
17	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		122.658.800,00	122.658.800,00
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		159.862.000,00	159.862.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		575.311.000,00	575.311.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		35.000.000,00	35.000.000,00
21	Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH	1.714.784.400,00	4.475.242.270,00	6.190.026.670,00

Rincian *software* masing-masing SKPD sebagaimana **Lampiran 57**

Bertambah dan berkurangnya Aset Tak Berwujud selama tahun 2024 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp	5.922.595.030,00
Mutasi tambah			
Belanja Modal	:	Rp	39.387.240,00
Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	:	Rp	37.007.400,00
Mutasi dari Dinas Lain	:	Rp	33.000.000,00
Belum tercatat	:	Rp	54.000.000,00
Reklas	:	Rp	137.037.000,00
Mutasi kurang			
Mutasi ke dinas lain	:	(Rp	33.000.000,00)
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp	6.190.026.670,00

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud selama tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Tak Berwujud berasal dari belanja modal software senilai Rp39.387.240,00 berupa aplikasi PKL pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM.
- 2) Penambahan Aset Tak Berwujud karena belanja barang dan jasa menjadi aset ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan berupa DED perumahan korban bencana senilai Rp37.007.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 3) Penambahan dan pengurangan mutasi antar SKPD berupa software senilai Rp33.000.000,00 dari RSUD Dr. Soedirman ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan berupa aplikasi parkir.
- 4) Penambahan karena hasil inventarisasi ada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa software aplikasi jurnal kebumen senilai Rp54.000.000,00
- 5) Penambahan Aset Tak Berwujud selama Tahun 2024 senilai Rp137.073.000,00 karena reklas ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa software buku digital senilai Rp19.700.000,00 merupakan reklas dari belanja aset tetap lainnya dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa konsultan penyusunan e-paksi senilai Rp117.337.000,00.

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp111.717.173.490,00	Rp132.099.376.769,44

Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.69 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Aset Rusak Berat/ Usang	16.238.876.903,00	43.601.148.271,00	(27.362.271.368,00)	(62,76)
Aset Tetap yang tidak digunakan operasional pemerintah	95.478.296.587,00	84.268.931.423,00	11.209.365.164,00	13,30
TDF		4.229.297.075,44	(4.229.297.075,44)	(100)
Jumlah Nilai Perolehan	111.717.173.490,00	132.099.376.769,44	(20.382.203.279,44)	(15,43)

Aset Lain-lain per SKPD disajikan sebagaimana **Lampiran 58** yang terdiri dari:

- 1) Aset Rusak Berat/usang, mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp43.601.148.271,00
Mutasi tambah		
Penambahan RB	:	Rp15.607.891.648,00
Mutasi dari SKPD lain	:	Rp29.597.500,00
Hasil inventarisasi	:	Rp11.821.000,00
Mutasi kurang		
Penghapusan SK	:	(Rp42.911.434.516,00)
Reklasifikasi	:	(Rp9.076.500,00)
Koreksi	:	(Rp61.473.000,00)
Mutasi ke SKPD lain	:	(Rp29.597.500,00)
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp16.238.876.903,00

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan barang rusak berat sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- Penambahan berupa barang-barang dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagaimana **Lampiran 59**
- Penambahan dan Pengurangan mutasi antar SKPD barang rusak berat senilai Rp29.579.500,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dan pada Puskesmas Sempor 2 yang dimutasikan ke PPKD.
- Penambahan aset rusak berat karena hasil inventarisasi senilai Rp11.821.000,00 ada pada PPKD.
- Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp42.911.434.516,00 merupakan aset rusak berat yang telah ditetapkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Tahun 2024 telah ditetapkan SK Penghapusan sebagai berikut:
 - a. SK Nomor 000.2.4/1518.2 tanggal 15 Juli 2024
 - b. SK Nomor 000.2.4/3079 tanggal 26 September 2024Selain itu, terdapat SK Penghapusan yang terbit sebelum tahun 2024 yang mengurangi Aset lain-lain Rusak Berat yaitu SK Nomor 028/050 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022.
Pengurangan Aset lain-lain Rusak Berat sesuai SK dimaksud secara rinci sesuai **Lampiran 60**
- Pengurangan aset lain-lain karena reklasifikasi senilai Rp9.076.500,00 merupakan reklasifikasi barang rusak berat/usang menjadi aset tetap ada pada Kecamatan Poncowarno
- Pengurangan aset lain-lain rusak berat karena koreksi senilai Rp61.473.000,00 merupakan koreksi pencatatan DED pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2) Aset Tetap yang tidak digunakan operasional pemerintah terdiri dari

- a. Aset lainnya berupa tanah pada Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Desa senilai Rp95.159.146.087,00
Mutasi Penambahan dan pengurangan Aset Lainnya sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2024	:	Rp83.804.781.923,00
Mutasi tambah		
Penambahan	:	Rp11.354.364.164,00
Mutasi kurang		
Koreksi	:	
Saldo akhir 31 Desember 2024	:	Rp95.159.146.087,00

Penambahan Aset lainnya senilai Rp11.354.364.164,00 merupakan penambahan aset Jalan Kabupaten yang berubah menjadi jalan desa dan belum diserahkan ke desa.

- b. Aset lainnya berupa DED (*Detail Engineering Design*) milik pihak lain yang belum diserahkan senilai Rp402.676.500,00 terdiri dari:
 - DED desa wisata Seboro, Karangsambung, Desa Pasir, Desa Tirtomoyo pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata senilai Rp83.526.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024

- DED GOR Desa Ambalresmi, Jembatan Ambalkliwonan, Gedung Mapolres Kebumen, Jaringan Irigasi pedesaan, Jalan Desa Gemeksekti, dan DED perbaikan tebing tanggul sungai serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp319.150.500,00.

3) Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang ke bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pada tahun 2023, Pemkab Kebumen telah mendapatkan salur atas TDF dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp4.229.297.075,44 sesuai surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-802/WPB.14/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan Surat Edaran dari Direktur Bina Keuangan Daerah nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF. Pada Tahun 2023 atas dana TDF tersebut telah di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar RpRp4.228.271.591,00 pada bulan Bulan April 2023. Sedangkan untuk Remunerasi Treasury Deposit Facility telah salur berdasarkan PMK No 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility , dana tersebut telah pada tanggal 26 April 2023 telah masuk rekening kas umum Daerah atas dana remunerasi sebesar Rp48.388.623,00 yang merupakan remunerasi bulan Desember 2022 dan Triwulan pertama 2024.

Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah No S-98/KPN.1412/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang penyampian informasi saldo rekening TDF pada 12 Jnauari 2024 sebesar Rp3.261.159.000,00. Atas dana TDF tersebut telah ditransfer ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp3.261.159.000,00 pada tanggal 25 Maret 2024, sedangkan untuk dana remunerasi masuk ke kas umum daerah sebesar Rp36.851.598,00 pada tanggal 12 Juni 2024.

Sehingga per tanggal 31 Desember 2024 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) dan Remunerasi Treasury Deposit Facility sebesar Rp0,00.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp3.810.076.646,00)	(Rp3.301.923.144,00)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud masing-masing SKPD disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.3.70 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	69.025.600,00	(42.964.500,00)	26.061.100,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.690.000,00	(7.326.000,00)	8.364.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	1.713.943.000,00	(1.069.300.500,00)	644.642.500,00
4	Puskesmas Karanggayam II	4.000.000,00	(2.400.000,00)	1.600.000,00
5	Puskesmas Petanahan	79.600.000,00	(31.840.000,00)	47.760.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.460.743.000,00	(659.777.100,00)	800.965.900,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	476.887.300,00	(213.415.870,00)	263.471.430,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.998.000,00	(52.199.400,00)	121.798.600,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.317.150,00	(273.592.150,00)	76.725.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	298.535.420,00	(218.472.686,00)	80.062.734,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	121.110.000,00	(104.049.000,00)	17.061.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	213.958.100,00	(131.959.410,00)	81.998.690,00
13	Dinas Tenaga Kerja	96.765.000,00	(70.931.500,00)	25.833.500,00
14	Bagian Hukum	80.473.300,00	(72.425.970,00)	8.047.330,00
15	Bagian Pembangunan	82.809.000,00	(48.906.000,00)	33.903.000,00
16	Bagian Organisasi	54.340.000,00	(82.809.000,00)	- 28.469.000,00
17	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	122.658.800,00	(85.861.160,00)	36.797.640,00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	159.862.000,00	(104.440.400,00)	55.421.600,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	575.311.000,00	(498.906.000,00)	76.405.000,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.000.000,00	(35.000.000,00)	-
22	Kecamatan Kutowinangun	5.000.000,00	(3.500.000,00)	1.500.000,00
	Jumlah	6.190.026.670,00	(3.810.076.646,00)	2.379.950.024,00

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp34.655.691.688,00)	(Rp34.655.691.688,00)

Rincian Akumulasi Aset Lainnya Tidak berwujud masing-masing SKPD disajikan sebagaimana **Lampiran 61**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp91.007.025.839,80	Rp58.789.647.975,97

Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.71 Rincian Kewajiban Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Kewajiban Jangka Pendek	91.007.025.839,80	58.789.647.975,97	32.217.377.863,83	54,80
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Jumlah	91.007.025.839,80	58.789.647.975,97	32.217.377.863,83	54,80

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp91.007.025.839,80	Rp58.789.647.975,97

Kewajiban Jangka Pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp32.217.377.863,83 atau 54,80% dari tahun 2023 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	6.438.730,00	-6.438.730,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	979.377.424,80	2.002.249.183,97	-1.022.871.759,17	-51,09
Utang Belanja	90.027.648.415,00	56.780.960.062,00	33.246.688.353,00	58,55
Jumlah	91.007.025.839,80	58.789.647.975,97	32.217.377.863,83	54,80

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	Rp6.438.730,00

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per SKPD per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Sedangkan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.438.730,00 merupakan utang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Dana BOS namun s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke RKUN.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp979.377.424,80

Rp2.002.249.183,97

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya.

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.022.871.759,17 atau 51,09% dari tahun 2023. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.73 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	347.612.617,00	406.482.862,83	(58.870.245,83)	(14,48)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	176.350.000,00	972.165.639,17	(795.815.639,17)	(81,86)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	14.104.270,83	0,00	14.104.270,83	-
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.140.800,00	53.326.800,00	(13.186.000,00)	(24,73)
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	331.352.458,83	529.519.849,83	(198.167.391,00)	(37,42)
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain	69.817.278,14	40.754.032,14	29.063.246,00	71,31
Jumlah	979.377.424,80	2.002.249.183,97	1.022.871.759,17	(51,09)

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp347.612.617,00 dikelola oleh Kecamatan Kebumen sebesar Rp82.520.370,00, Kecamatan Karanganyar sebesar Rp194.117.825,00 dan Kecamatan Gombang sebesar Rp70.974.422,00 yang berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan, dengan rincian pada **Lampiran 62**.
2. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp176.350.000,00 dikelola oleh BPKPD yang berasal dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dalam bentuk sewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.74 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Pihak Ketiga	No Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat	Sisa Masa Manfaat	Nilai Sewa	Jumlah Pendapatan Diterima Di muka
1	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk	028/1673.13	30/09/2022 s/d 29/09/2027	60	33	137.970.000,00	75.883.500,00
2	Yayasan Al Muutaqien (Drs.H. Sholeh Said)	000.2.3.2/3232/Tahun 2024 dan 03/YAM/XI/Tahun 2024	02/06/2024 sd 01/06/2029	60	50	16.475.000,00	13.729.166,67
3	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Sempor	000.2.3.2/4469 Tahun 2023 dan 2293/SDU.07/008/2023	15/06/2023 sd 14/06/2025	24	6	8.000.000,00	2.000.000,00
4	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Buayan		15/06/2023 sd 14/06/2025	24	6	8.000.000,00	2.000.000,00
5	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Ambal		15/06/2023 sd 14/06/2025	24	6	8.000.000,00	2.000.000,00
6	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Mirit		15/06/2023 sd 14/06/2025	24	6	8.000.000,00	2.000.000,00
7	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Poncowarno		15/06/2023 sd 14/06/2025	24	6	8.000.000,00	2.000.000,00
8	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Padureso		15/06/2023 sd 14/06/2025	24	6	8.000.000,00	2.000.000,00
9	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec.Puring	326/03 Tahun 2024 dan 0226/SDU.07/008/2024	01/03/2024 s.d 28/02/2027	36	26	12.000.000,00	8.666.666,67
10	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec.Sruweng			36	26	12.000.000,00	8.666.666,67
11	Mundiri	028/137 Tahun 2022	05/05/2022 s.d 05/04/2025	36	4	2.736.000,00	304.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Pihak Ketiga	No Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat	Sisa Masa Manfaat	Nilai Sewa	Jumlah Pendapatan Diterima Di muka
12	Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Adimulyo, Buluspesantren, Karanggayam, Kuwarasan dan Pejagoan.	031/941.1 Tahun 2022 dan 0485/SDU.07/008/2022	18/05/2022 s.d 17/05/2025	36	5	60.000.000,00	8.333.333,33
13	PT. Aneka Usaha	000.2.3.2/3230/Tahun 2024 dan D.AUKJ/2353/XI/2024	01/09/2024 s.d 31/08/2024	12	8	71.500.000,00	47.666.666,67
14	RSU Wijayakuusma (dr. Ad'ha Yukina Nurtika Sari)	437/05/2024 dan 039/PKS/RSU.WK/IV/2024	09/01/2024 s.d 08/01/2025	12	1	13.200.000,00	1.100.000,00
Jumlah							176.350.000,00

3. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp14.104.270,83 dikelola oleh RSUD dr Soedirman yang berasal dari pendapatan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.75 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka RSUD dr Soedirman Tahun 2024

Nomor & Nama Subyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Jumlah Pendapatan diterima dimuka
026/MSD/ADD-RSUDDSK/XII/2015 PT MAC SARANA DJAYA	275.000.000,00	1 Apr 2015 s.d. 01-Apr-25	120	3	6.875.000,00
007/B/MoU/UAA/II/2020 UNIVERSITAS ALMA ATA	7.500.000,00	21 Feb 2020 s.d. 20-Feb-25	60	2	250.000,00
KBM/SEWA/003 BNI CABANG KEBUMEN	50.000.000,00	1 Apr 2020 s.d. 31-Mar-25	60	3	2.500.000,00
011/1574.23/PKS/IV/2023 KOPERASI SEHAT RSUD Dr.SOEDIRMAN	16.333.750,00	1 Apr 2023 s.d. 31-Mar-28	12	3	4.083.437,50
445/3110/PKS/VII/2023 POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA I	750.000,00	17 Jul 2023 s.d. 16-Jul-26	36	19	395.833,33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Nomor & Nama Subyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Jumlah Pendapatan diterima dimuka
Jumlah	356.833.750,00				14.104.270,83

4. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp40.140.800,00 dikelola oleh Bagian Umum Setda berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.76 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Tahun 2024

Nomor & Nama Subyek Perjanjian	Nilai Perjanjian (Rp)	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
23/402/ORG/X/2024 Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen	5.940.000,00	17 Sept 2024 s.d. 16 Sept 2024	12	9	4.455.000,00
24/402/ORG/X/2024 Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen	4.428.000,00		12	9	3.321.000,00
000.2.3.2/3040.3/2024 Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab Kebumen	5.184.000,00		12	9	3.888.000,00
000.2.3.2/3040.6 Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Kebumen	3.780.000,00		12	9	2.835.000,00
030/3900 Sewa lahan rumah ATM	32.670.000,00	30 Juni 2023 s.d. 30 Juni 2028	60	42	22.869.000,00
030/1192.1 PT.Bank Jateng Cabang Kebumen	33.264.000,00	1 April 2020 s.d. 31 Mei 2025	60	5	2.772.000,00
Jumlah	85.266.000,00				40.140.000,00

5. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp331.352.458,83 dikelola oleh BPKPD dengan rincian pada **Lampiran 63**.
6. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain sebesar Rp40.754.032,14 dikelola oleh BPKPD dengan rincian pada **Lampiran 63**.

5.3.2.1.3

Utang Belanja

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp90.027.648.415,00

Rp56.780.960.062,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Utang Belanja merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang s.d. 31 Desember 2024 belum dibayar oleh SKPD.

Saldo Utang Belanja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp21.314.908.970,00 atau 60,10% dari tahun 2022 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.77 Rincian Utang Pemda Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Utang Belanja Pegawai	49.903.923.793,00	27.280.364.956,00	22.623.558.837,00	82,93
Utang Belanja Barang	11.614.066.158,00	-	11.614.066.158,00	
Utang Belanja Jasa	28.505.362.464,00	1.229.300.676,00	27.276.061.788,00	2218,83
Utang Belanja Perjalanan Dinas	4.296.000,00		4.296.000,00	
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	28.271.294.430,00	-28.271.294.430,00	-100,00
Jumlah	90.027.648.415,00	56.780.960.062,00	33.246.688.353,00	58,55

Rincian Utang Belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai

Merupakan Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2024 sebesar Rp7.911.811.193,00 , Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp35.427.557.000,00 , Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp145.500.000,00 , Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp5.058.555.600,00 , Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp1.360.500.000,00 yang belum dibayarkan.

2. Utang Belanja Barang

Merupakan beban atas persediaan belanja pakai sebesar Rp11.614.066.158,00 yaitu pada RSDS sebesar Rp2.223.572.285,00 , RSU Prembun sebesar Rp9.380.939.223,00 , Puskesmas Ayah 1 sebesar Rp1.500.000,00 , Puskesmas Ayah 2 sebesar Rp702.900,00 , Puskesmas Karanganyar Rp2.256.900,00 , Puskesmas Kebumen 2 sebesar Rp400.000,00, Puskesmas Mirit sebesar Rp3.924.850,00 dan Puskesmas Padureso sebesar Rp770.000,00. Rincian Belanja barang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.17 Rincian Utang Belanja Barang Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	2.711.465.284,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.171.000,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	566.503.946,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	3.966.159.387,00
5	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.477.750,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	4.132.180.066,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	215.108.725,00
Jumlah		11.614.066.158,00

3. Utang Belanja Jasa

Merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor/jasa lainnya pada SKPD dan jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas dan RSUD yang belum dibayarkan, dengan rincian :

Tabel 5.3.79 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	26.411.568.521,00	-	26.411.568.521,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	8.542.400,00	-	8.542.400,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	6.697.600,00	-6.697.600,00	-100,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi	240.267.000,00	-	240.267.000,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	17.632.440,00	0,00	17.632.440,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	36.179.658,00	20.560.524,00	15.619.134,00	75,97
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	76.824.050,00	31.104.800,00	45.719.250,00	146,98
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.521.119.168,00	1.140.625.026,00	380.494.142,00	33,36
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	87.382.074,00	30.312.726,00	57.069.348,00	188,27
Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.559.800,00	-	9.559.800,00	-
Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	96.287.353,00	-	96.287.353,00	-
Jumlah	28.505.362.464,00	1.229.300.676,00	27.276.061.788,00	2.218,83

4. Utang Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan beban perjalanan dinas biasa tahun 2024 yang belum dibayarkan senilai Rp4.296.000,00 pada RSUD Dr. Soedirman

Rincian Utang Belanja per jenis per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 64** dan Rincian Utang Belanja per Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 65**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp4.752.181.101.344,54	Rp4.458.091.640.119,65

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp294.089.461.224,89 atau 6,60% dari tahun 2023 yang berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

1. Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Kegiatan Non Operasional menyajikan surplus dan defisit kegiatan non operasional;
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan; dan
5. Surplus/Defisit-LO.

Berikut Laporan Operasional Pemkab Kebumen pada Tahun 2024:

Tabel 5.4.1 Penjelasan Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan - LO	2.712.131.824.867,90	2.443.408.168.436,75	268.723.656.431,15	11,00
Beban - LO	2.707.694.239.280,11	2.514.165.363.863,43	193.528.875.416,68	7,69
Surplus/Defisit dari Operasi	4.437.585.587,79	(70.757.195.426,68)	75.194.781.014,47	(106,27)
Kegiatan Non Operasional	(3.564.719.993,00)	(61.892.277.453,00)	(56.871.989.460,00)	91,89
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	872.865.594,79	(132.649.472.879,68)	133.522.338.474,47	(100,66)
Pos Luar Biasa	323.000.000,00	(409.940.801,00)	(86.940.801,00)	21,21
Surplus/Defisit - LO	549.865.594,79	(133.059.413.680,68)	133.609.279.275,47	(100,41)

Penjelasan atas Laporan Operasional Pemkab Kebumen disajikan sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp2.712.131.824.867,90	Rp2.443.408.168.436,75

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemkab Kebumen Tahun 2024 dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.2 Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Asli Daerah - LO	497.063.535.790,90	481.542.295.383,31	15.521.240.407,59	3,22
Pendapatan Transfer - LO	2.167.534.550.121,00	1.946.750.067.311,44	220.784.482.809,56	11,34
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	47.533.738.956,00	15.115.805.742,00	32.417.933.214,00	214,46
Jumlah	2.712.131.824.867,90	2.443.408.168.436,75	268.723.656.431,15	11,00

Pendapatan – LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp268.723.656.431,15 atau 11,00% dari Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp497.063.535.790,90	Rp481.542.295.383,31

PAD - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp15.521.240.407,59 atau 3,22% dari Tahun 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.3 Rincian PAD - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pajak Daerah - LO	142.759.120.525,00	138.433.022.893,88	4.326.097.631,12	3,13
Retribusi Daerah - LO	33.674.694.327,50	28.398.881.530,25	5.275.812.797,25	18,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO	27.467.837.967,32	35.664.544.215,92	(8.196.706.248,60)	(22,98)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	293.161.882.971,08	279.045.846.743,26	14.116.036.227,82	5,06
Jumlah	497.063.535.790,90	481.542.295.383,31	15.521.240.407,59	3,22

5.4.1.1.1 Pajak Daerah – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp142.759.120.525,00	Rp138.433.022.893,88

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp4.326.097.631,12 atau 3,13% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.4 Rincian Pajak Daerah - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pajak Hotel-LO	2.730.772.330,00	2.910.983.634,00	(180.211.304,00)	(6,19)
Pajak Restoran - LO	14.040.619.522,00	13.238.021.599,00	802.597.923,00	6,06
Pajak Hiburan-LO	1.091.136.905,00	1.134.676.744,00	(43.539.839,00)	(3,84)
Pajak Reklame-LO	2.059.632.217,00	2.180.273.224,88	(120.641.007,88)	(5,53)
PPJ-LO	46.640.474.661,00	42.269.699.527,00	4.370.775.134,00	10,34
Pajak Parkir-LO	535.352.241,00	741.916.899,00	(206.564.658,00)	(27,84)
Pajak Air Tanah-LO	397.924.280,00	404.636.500,00	(6.712.220,00)	(1,66)
Pajak MBLB-LO	672.083.012,00	582.341.674,00	89.741.338,00	15,41
PBBP2-LO	61.133.530.268,00	58.347.321.046,00	2.786.209.222,00	4,78
BPHTB-LO	13.119.526.420,00	16.623.152.046,00	(3.503.625.626,00)	(21,08)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	338.068.669,00	0,00	338.068.669,00	100,00
Jumlah	142.759.120.525,00	138.433.022.893,88	4.326.097.631,12	3,13

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Hotel	2.730.772.330,00	2.728.082.330,00	2.690.000,00
Pajak Restoran	14.040.619.522,00	14.038.805.792,00	1.813.730,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Hiburan	1.091.136.905,00	1.096.652.834,00	(5.515.929,00)
Pajak Reklame	2.059.632.217,00	1.792.719.928,00	266.912.289,00
PPJ	46.640.474.661,00	46.640.474.661,00	0,00
Pajak Parkir	535.352.241,00	536.819.441,00	(1.467.200,00)
Pajak Air Tanah	397.924.280,00	398.343.480,00	(419.200,00)
Pajak MBLB	672.083.012,00	625.161.762,00	46.921.250,00
PBBP2	61.133.530.268,00	58.136.414.662,00	2.997.115.606,00
BPHTB	13.119.526.420,00	13.103.245.920,00	16.280.500,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	338.068.669,00	338.068.669,00	0,00
Jumlah	142.759.120.525,00	139.434.789.479,00	3.324.331.046,00

Selisih atas Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp24.690.000,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.790.000,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.000,00;
2. Selisih Pajak Restoran sebesar Rp1.813.730,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.017.215,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.203.485,00;
3. Selisih Pajak Hiburan sebesar Rp5.515.929,00 merupakan selisih antara saldo Piutang pajak hiburan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.185.929,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.670.000,00;
4. Selisih Pajak Reklame sebesar Rp266.912.289,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp167.438.941,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.630.797,00 dikurangi selisih antara saldo Pendapatan Diterima DiMuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp401.169.736,97 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp570.273.881,97;
5. Selisih Pajak Parkir sebesar Rp1.467.200,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 sebesar Rp880.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.347.200,00
6. Selisih Pajak Air Tanah sebesar Rp419.20000 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.005.922,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.425.122,00;
7. Selisih Pajak MBLB sebesar Rp46.921.250,00 merupakan selisih antara saldo Piutang MBLB per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.108.750,00 dan per 31 Desember sebesar 2023 sebesar Rp2.187.500,00;
8. Selisih PBB-P2 sebesar Rp2.997.115.606,00 merupakan selisih antara saldo Piutang PBBP2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.229.729.814,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.232.614.208,00
9. Selisih BPHTB sebesar Rp16.280.500,00 merupakan selisih antara saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.780.500,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.500.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah – LO

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp 33.674.694.327,50

Rp28.398.881.530,25

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.275.812.797,25 atau 18,58% dari tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.6 Rincian Retribusi Daerah - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	847.514.250,00	820.166.300,00	27.347.950,00	3,33
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.359.660.826,00	1.441.471.300,00	(81.810.474,00)	(5,68)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.654.817.000,00	1.170.762.700,00	484.054.300,00	41,35
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	7.704.424.158,00	6.568.171.801,00	1.136.252.357,00	17,30
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	548.336.000,00	(548.336.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang - LO	0,00	140.955.500,00	(140.955.500,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	0,00	84.120.000,00	(84.120.000,00)	(100,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0,00	1.271.616.000,00	(1.271.616.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	8.554.057.705,50	4.746.141.674,92	3.807.916.030,58	80,23
Retribusi Tempat Pelelangan – LO	1.015.980.302,00	1.438.639.484,00	(422.659.182,00)	(29,38)
Retribusi Terminal – LO	0,00	94.461.000,00	(94.461.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	7.176.574.009,00	4.279.152.483,33	2.897.421.525,67	67,71
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	25.050.000,00	27.610.000,00	(2.560.000,00)	(9,27)
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	28.665.000,00	37.877.500,00	(9.212.500,00)	(24,32)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	3.319.842.700,00	4.720.282.500,00	(1.400.439.800,00)	(29,67)
Retribusi IMB – LO	0,00	997.687.287,00	(997.687.287,00)	(100,00)
Retribusi Izin Trayek – LO	0,00	11.430.000,00	(11.430.000,00)	(100,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.988.108.377,00	0,00	1.988.108.377,00	100,00
Jumlah	33.674.694.327,50	28.398.881.530,25	5.275.812.797,25	18,58

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.7 Rincian Retribusi Daerah – LO per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	227.345.500,00	220.117.000,00	7.228.500,00	3,28
Dinkes PPKB	847.514.250,00	820.166.300,00	27.347.950,00	3,33
DPUPR	2.702.673.273,00	1.623.837.287,00	1.078.835.986,00	66,44
Disperkimhub	9.123.293.884,00	2.206.555.200,00	6.916.738.684,00	313,46
DLHKP	2.968.208.418,00	2.843.396.494,00	124.811.924,00	4,39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Diskominfo	26.631.410,00	363.279.835,00	(336.648.425,00)	(92,67)
Disperindag KUKM	7.793.652.908,00	11.456.254.544,33	(3.662.601.636,33)	(31,97)
DPMPTSP	0,00	1.543.956.730,00	(1.543.956.730,00)	(100,00)
Disparbud	8.517.799.180,00	5.730.635.329,00	2.787.163.851,00	48,64
Distapang	108.155.000,00	117.557.500,00	(9.402.500,00)	(8,00)
Disnaker	11.040.000,00	84.120.000,00	(73.080.000,00)	(86,88)
Setda	176.083.000,00	135.929.000,00	40.154.000,00	29,54
BPKPD	341.868.310,50	294.236.377,67	47.631.932,83	16,19
Kecamatan dan Kelurahan	830.429.194,00	958.839.933,25	(128.410.739,25)	(13,39)
Jumlah	33.674.694.327,50	28.398.881.530,25	5.275.812.797,25	18,58

Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	847.514.250,00	872.041.000,00	(24.526.750,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.359.660.826,00	1.359.660.826,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.654.817.000,00	1.654.817.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	7.704.424.158,00	7.232.868.182,00	471.555.976,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.554.057.705,50	8.555.546.763,00	(1.489.057,50)
Retribusi Tempat Pelelangan	1.015.980.302,00	1.015.980.302,00	0,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.176.574.009,00	7.176.574.009,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	28.665.000,00	28.665.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-	3.319.842.700,00	3.319.842.700,00	0,00
Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.988.108.377,00	1.988.108.377,00	0,00
Jumlah	33.674.694.327,50	33.229.154.159,00	445.540.168,50

Selisih atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp24.650.000,00 merupakan selisih antara saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.650.000,00
2. Selisih Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp471.555.976,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.876.959.612,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.405.403.636,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp27.467.837.967,32	Rp35.664.544.215,92

Pendapatan merupakan pendapatan dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemkab Kebumen pada Perusahaan Daerah atau BUMD.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) – LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.196.706.248,60 atau 22,98% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.9 Rincian HPKDYD – LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO"				
PT BPD Jateng	13.968.406.966,00	12.782.353.955,00	1.186.053.011,00	9,28
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	2.256.270.500,32	8.836.576.694,92	-6.580.306.194,60	-74,47
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	1.166.965.227,00	4.937.866.743,00	-3.770.901.516,00	-76,37
Perumda Air Minum Tirta Santosa	9.227.039.784,00	8.521.865.660,00	705.174.124,00	8,27
PT Luk Ulo Farma (Perseoda)	849.155.490,00	585.881.163,00	263.274.327,00	44,94
Jumlah	27.467.837.967,32	35.664.544.215,92	-8.196.706.248,60	-22,98

Perbandingan Pendapatan HPKDYD - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10 Perbandingan Pendapatan HPKDYD - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD			
PT BPD Jateng	13.968.406.966,00	13.967.403.517,00	1.003.449,00
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	2.256.270.500,32	3.890.915.251,00	1.634.644.750,68
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	1.166.965.227,00	553.730.533,00	613.234.694,00
Perumda Air Minum Tirta Santosa	9.227.039.784,00	3.254.461.610,00	5.972.578.174,00
PT Luk Ulo Farma (Perseoda)	849.155.490,00	189.888.145,00	659.267.345,00
Jumlah	27.467.837.967,32	21.856.399.056,00	5.611.438.911,32

Selisih atas Pendapatan HPKDYD – LO dengan LRA tersebut merupakan selisih perhitungan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen tahun 2024.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah- LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp293.161.882.971,08	Rp279.045.846.743,26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.116.036.227,82 atau 5,06% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.11 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.037.265.000,00	1.695.109.747,00	(657.844.747,00)	(38,81)
Penerimaan Jasa Giro – LO	2.217.445.179,00	1.941.444.932,00	276.000.247,00	14,22
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	35.890.226,00	47.250.000,00	(11.359.774,00)	(24,04)
Pendapatan Bunga – LO	3.172.468.032,00	5.411.536.170,00	(2.239.068.138,00)	(41,38)
Pendapatan Denda Pajak – LO	919.136.670,08	1.038.876.278,42	(119.739.608,34)	(11,53)
Pendapatan Denda Retribusi – LO	0,00	22.317.520,00	(22.317.520,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian – LO	184.056.145,00	355.217.506,00	(171.161.361,00)	(48,18)
Pendapatan BLUD – LO	282.477.089.708,00	266.540.874.376,84	15.936.215.331,16	5,98
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>) – LO	3.118.532.011,00	1.993.220.213,00	1.125.311.798,00	56,46
Jumlah	293.161.882.971,08	279.045.846.743,26	14.116.036.227,82	5,06

Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.12 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Dinkes PPKB	282.477.089.708,00	266.540.874.376,84	15.936.215.331,16	5,98
Disperkimhub	0,00	22.317.520,00	(22.317.520,00)	(100,00)
Disdikpora	115.745.928,00	0,00	115.745.928,00	100,00
DLHKP	72.650.000,00	64.200.000,00	8.450.000,00	13,16
Disperindag KUKMK	0,00	121.716.438,50	(121.716.438,50)	(100,00)
Distapang	964.615.000,00	674.010.000,00	290.605.000,00	43,12
BPKPD	9.531.782.335,08	11.622.728.407,92	(2.090.946.072,84)	(17,99)
Jumlah	293.161.882.971,08	279.045.846.743,26	14.116.036.227,82	5,06

Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.13 Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.037.265.000,00	1.766.231.100,00	(728.966.100,00)
Penerimaan Jasa Giro	2.217.445.179,00	2.217.445.179,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	35.890.226,00	35.890.226,00	0,00
Pendapatan Bunga	3.172.468.032,00	3.172.468.032,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	919.136.670,08	269.795.181,00	649.341.489,08
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	184.056.145,00	184.056.145,00	0,00
Pendapatan BLUD	282.477.089.708,00	279.006.253.370,00	3.470.836.338,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	3.118.532.011,00	3.118.532.011,00	0,00
Jumlah	293.161.882.971,08	289.770.671.244,00	3.391.211.727,08



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Selisih atas Lain-lain PAD yang Sah – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp728.966.100,00 merupakan hasil penjualan aset rusak berat kendaraan Tahun 2024 dan gedung bangunan tahun 2024 yang telah diperhitungkan sebagai surplus/defisit penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Selisih Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp649.341.489,08 merupakan selisih antara saldo Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.950.050.014,44 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.300.708.525,36;
3. 3Selisih Pendapatan BLUD sebesar Rp3.470.836.338,00 merupakan selisih antara saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.604.920.258,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.174.333.920,00;

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp2.167.534.550.121,00	Rp1.946.750.067.311,44

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp220.784.482.809,56 atau 11,34% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14 Rincian Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	1.884.387.249.883,00	1.747.451.879.790,44	136.935.370.092,56	7,84
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	20.849.462.000,00	11.805.728.000,00	9.043.734.000,00	76,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	262.297.838.238,00	187.492.459.521,00	74.805.378.717,00	39,90
Jumlah	2.167.534.550.121,00	1.946.750.067.311,44	220.784.482.809,56	11,34

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.884.387.249.883,00	Rp1.747.451.879.790,44

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp136.935.370.092,56 atau 7,84% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil (DBH)	33.987.975.000,00	40.353.020.666,44	(6.365.045.666,44)	(15,77)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.306.369.023.000,00	1.239.930.914.430,00	66.438.108.570,00	5,36
Dana Alokasi Khusus (DAK)	544.030.251.883,00	467.167.944.694,00	76.862.307.189,00	16,45
Jumlah	1.884.387.249.883,00	1.747.451.879.790,44	136.935.370.092,56	7,84



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil – LO

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp33.987.975.000,00

Rp40.353.020.666,44

DBH - LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.365.045.666,44 atau 15,77% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.16 Rincian DBH - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DBH PBB - LO	3.246.950.850,00	3.585.351.950,00	(338.401.100,00)	(9,44)
DBH PPh Pasal 21-LO	14.985.904.000,00	14.486.092.027,00	499.811.973,00	3,45
DBH CHT-LO	13.983.303.000,00	19.526.228.927,44	(5.542.925.927,44)	(28,39)
DBH SDA Minyak Bumi-LO	119.737.400,00	408.856.946,00	(289.119.546,00)	(70,71)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	50.456.750,00	104.757.255,00	(54.300.505,00)	(51,83)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.941.000,00	1.010.933,00	2.930.067,00	289,84
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	170.982.000,00	389.207.417,00	(218.225.417,00)	(56,07)
DBH SDA Perikanan-LO	1.426.700.000,00	1.851.515.211,00	(424.815.211,00)	(22,94)
Jumlah	33.987.975.000,00	40.353.020.666,44	(6.365.045.666,44)	(15,77)

Perbandingan DBH - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17 Perbandingan DBH - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
DBH PBB - LO	3.246.950.850,00	3.246.950.850,00	0,00
DBH PPh Pasal 21-LO	14.985.904.000,00	14.985.904.000,00	0,00
DBH CHT-LO	13.983.303.000,00	13.983.303.000,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	119.737.400,00	119.737.400,00	0,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	50.456.750,00	50.456.750,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.941.000,00	3.941.000,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	170.982.000,00	170.982.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.426.700.000,00	1.426.700.000,00	0,00
Jumlah	33.987.975.000,00	33.987.975.000,00	0,00

5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum- LO

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp1.306.369.023.000,00

Rp1.239.930.914.430,00

DAU - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp66.438.108.570,00 atau 5,36% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.18 Rincian DAU - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DAU-LO	1.200.607.571.000,00	1.186.862.866.430,00	13.744.704.570,00	1,16
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	9.554.706.000,00	50.868.048.000,00	(41.313.342.000,00)	(81,22)
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	44.654.483.000,00	0,00	44.654.483.000,00	100,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	27.752.760.000,00	0,00	27.752.760.000,00	100,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	21.599.503.000,00	0,00	21.599.503.000,00	100,00
Jumlah	1.306.369.023.000,00	1.239.930.914.430,00	66.438.108.570,00	5,36

Perbandingan DAU - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19 Perbandingan DAU - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
DAU-LO	1.200.607.571.000,00	1.200.607.571.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	9.554.706.000,00	9.554.706.000,00	0,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	44.654.483.000,00	44.654.483.000,00	0,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	27.752.760.000,00	27.752.760.000,00	0,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	21.599.503.000,00	21.599.503.000,00	0,00
Jumlah	1.306.369.023.000,00	1.306.369.023.000,00	0,00

Tidak terdapat selisih atas DAU – LO dengan LRA pada Tahun 2024.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus – LO

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp544.030.251.883,00

Rp467.167.944.694,00

DAK - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp76.862.307.189,00 atau 16,45% dari Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.20 Rincian DAK - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DAK Fisik				
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	400.452.300,00	770.873.000,00	(370.420.700,00)	(48,05)
Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.110.775.000,00	5.998.942.000,00	(4.888.167.000,00)	(81,48)
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	7.681.939.225,00	1.851.669.000,00	5.830.270.225,00	314,87



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	1.094.070.000,00	0,00	1.094.070.000,00	100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	2.498.283.951,00	14.704.680.000,00	(12.206.396.049,00)	(83,01)
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	1.064.033.018,00	(1.064.033.018,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	299.708.050,00	1.862.092.415,00	(1.562.384.365,00)	(83,90)
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	11.973.505.000,00	0,00	11.973.505.000,00	100,00
Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	12.319.709.000,00	0,00	12.319.709.000,00	100,00
Bidang Air Minum-Reguler-LO	9.941.513.993,00	7.975.940.700,00	1.965.573.293,00	24,64
Bidang Sanitasi- Penugasan - LO	9.233.885.000,00	9.774.000.000,00	(540.115.000,00)	(5,53)
Bidang Irigasi-Penugasan-LO	5.013.064.000,00		5.013.064.000,00	100,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	0,00	5.507.843.857,00	(5.507.843.857,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	6.821.597.617,00	0,00	6.821.597.617,00	100,00
DAK Non Fisik				
BOS Reguler-LO	137.884.947.421,00	123.746.866.716,00	14.138.080.705,00	11,43
BOS Kinerja-LO	5.287.500.000,00	6.045.000.000,00	(757.500.000,00)	(12,53)
TPG PNSD-LO	228.760.252.000,00	231.955.661.000,00	(3.195.409.000,00)	(1,38)
Tamsil Guru PNSD-LO	6.840.432.000,00	5.785.588.906,00	1.054.843.094,00	18,23
BOKKB-BOK-LO	0,00	35.734.225.762,00	(35.734.225.762,00)	(100,00)
BOKKB-BOKB-LO	0,00	12.024.935.024,00	(12.024.935.024,00)	(100,00)
PK2UKM-LO	0,00	392.270.577,00	(392.270.577,00)	(100,00)
Fasilitasi Penanaman Modal-LO	598.484.020,00	351.746.159,00	246.737.861,00	70,15
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	15.426.909.768,00	0,00	15.426.909.768,00	100,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	2.179.205.900,00	1.621.576.560,00	557.629.340,00	34,39
Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	19.724.283.000,00	0,00	19.724.283.000,00	100,00
Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	100,00
Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.424.312.500,00	0,00	2.424.312.500,00	100,00
Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	100,00
Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	25.417.342.024,00	0,00	25.417.342.024,00	100,00
Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	29.823.080.114,00	0,00	29.823.080.114,00	100,00
Jumlah	544.030.251.883,00	467.167.944.694,00	76.862.307.189,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Perbandingan DAK - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.21 Perbandingan DAK - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
DAK Fisik			
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	400.452.300,00	400.452.300,00	0,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.110.775.000,00	1.110.775.000,00	0,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	7.681.939.225,00	7.681.939.225,00	0,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	1.094.070.000,00	1.094.070.000,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB-LO	2.498.283.951,00	2.498.283.951,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	299.708.050,00	299.708.050,00	0,00
Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	11.973.505.000,00	11.973.505.000,00	0,00
Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	12.319.709.000,00	12.319.709.000,00	0,00
Bidang Air Minum-Reguler-LO	9.941.513.993,00	9.941.513.993,00	0,00
Bidang Sanitasi- Penugasan -LO	9.233.885.000,00	9.233.885.000,00	0,00
Bidang Irigasi-Penugasan-LO	5.013.064.000,00	5.013.064.000,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan-LO	6.821.597.617,00	6.821.597.617,00	0,00
DAK Non Fisik			
BOS Reguler-LO	137.884.947.421,00	137.884.947.421,00	0,00
BOS Kinerja-LO	5.287.500.000,00	5.287.500.000,00	0,00
TPG PNSD-LO	228.760.252.000,00	228.760.252.000,00	0,00
Tamsil Guru PNSD-LO	6.840.432.000,00	6.840.432.000,00	0,00
BOKKB-BOK-LO	0,00	0,00	0,00
BOKKB-BOKB-LO	0,00	0,00	0,00
PK2UKM-LO	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penanaman Modal-LO	598.484.020,00	598.484.020,00	0,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	15.426.909.768,00	15.426.909.768,00	0,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	2.179.205.900,00	2.179.205.900,00	0,00
Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	19.724.283.000,00	19.724.283.000,00	0,00
Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00
Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.424.312.500,00	2.424.312.500,00	0,00
Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	25.417.342.024,00	25.417.342.024,00	0,00
Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	29.823.080.114,00	29.823.080.114,00	0,00
Jumlah	544.030.251.883,00	544.030.251.883,00	0,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp20.849.462.000,00	Rp11.805.728.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.043.734.000,00 atau 76,60% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.4.22 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Dana Insentif Daerah (DID)	20.849.462.000,00	11.805.728.000,00	9.043.734.000,00	76,60
Dana Desa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	20.849.462.000,00	11.805.728.000,00	9.043.734.000,00	76,60

5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp20.849.462.000,00	Rp11.805.728.000,00

DID - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.043.734.000,00 atau 76,60% dari Tahun 2023.

Realisasi DID - LO Tahun 2024 sama dengan nilai realisasi DID LRA TA 2024 yaitu sebesar Rp20.849.462.000,00 sehingga tidak terdapat selisih atas DID – LO dengan LRA pada Tahun 2024.

5.4.1.2.2.2 Dana Desa – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp0,00	Rp0,00

Dana Desa - LO Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan saldo dari Tahun 2023.

Realisasi Dana Desa - LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan nilai realisasi Dana Desa LRA TA 2024 sebesar Rp461.258.494.000,00 sehingga terdapat selisih atas Dana Desa – LO dengan LRA pada Tahun 2024 sebesar Rp461.258.494.000,00. Hal ini karena pendapatan transfer berupa Dana Desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional karena bukan merupakan beban operasional Pemkab Kebumen.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp262.297.838.238,00	Rp187.492.459.521,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp74.805.378.717,00 atau 39,90% dari Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.23 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	175.768.867.738,00	176.853.178.521,00	(1.084.310.783,00)	(0,61)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	86.528.970.500,00	10.639.281.000,00	75.889.689.500,00	713,30
Jumlah	262.297.838.238,00	187.492.459.521,00	74.805.378.717,00	39,90



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp175.768.867.738,00	Rp176.853.178.521,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.084.310.783,00 atau 0,61% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.24 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bagi Hasil dari PKB	59.808.086.883,00	65.534.131.004,00	(5.726.044.121,00)	(8,74)
Bagi Hasil dari BBNKB	(569.895.323,00)	47.929.936,00	(617.825.259,00)	(1.289,02)
Bagi Hasil dari PBBKB	44.663.640.281,00	47.142.092.645,00	(2.478.452.364,00)	(5,26)
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	298.480.745,00	348.662.105,00	(50.181.360,00)	(14,39)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	71.568.555.152,00	63.780.362.831,00	7.788.192.321,00	12,21
Jumlah	175.768.867.738,00	176.853.178.521,00	(1.084.310.783,00)	(0,61)

Perbandingan Bagi Hasil Pajak - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.25 Perbandingan Bagi Hasil Pajak - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagi Hasil dari PKB	59.808.086.883,00	61.359.596.236,00	(1.551.509.353,00)
Bagi Hasil dari Pajak BBNKB	(569.895.323,00)	0,00	(569.895.323,00)
Bagi Hasil dari PBBKB	44.663.640.281,00	48.566.524.970,00	(3.902.884.689,00)
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	298.480.745,00	321.403.955,00	(22.923.210,00)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	71.568.555.152,00	71.568.555.152,00	0,00
Jumlah	175.768.867.738,00	181.816.080.313,00	(6.047.212.575,00)

Selisih atas Bagi Hasil Pajak – LO dengan LRA sebesar Rp6.047.212.575,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.047.212.575,00 dan

5.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp86.528.970.500,00	Rp10.639.281.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp75.889.689.500,00 atau 65,28% dari Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO Tahun 2024 sama dengan nilai realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LRA TA 2024 yaitu sebesar Rp86.528.970.500,00 sehingga tidak terdapat selisih atas Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO dengan LRA pada Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp47.533.738.956,00,00	Rp15.115.805.742,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp32.417.933.214,00 atau 214,46% dari Tahun 2023 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp47.533.738.956,00	Rp15.115.805.742,00

Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp32.417.933.214,00 atau 214,46% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.26 Rincian Pendapatan Hibah - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Hibah Air Minum	3.309.187.000,00	1.396.312.500,00	1.912.874.500,00	136,99
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	15.253.822.000,00	0,00	15.253.822.000,00	100,00
Hibah IPDMIP	0,00	123.797.062,00	(123.797.062,00)	(100,00)
Hibah Lainnya	28.970.729.956,00	13.595.696.180,00	15.375.033.776,00	113,09
Jumlah	47.533.738.956,00	15.115.805.742,00	32.417.933.214,00	214,46

Perbandingan Pendapatan Hibah - LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.27 Perbandingan Pendapatan Hibah - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Hibah Air Minum	3.309.187.000,00	3.309.187.000,00	0,00
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	15.253.822.000,00	15.253.822.000,00	0,00
Hibah Lainnya	28.970.729.956,00	0,00	28.970.729.956,00
Jumlah	47.533.738.956,00	18.563.009.000,00	28.970.729.956,00

Selisih atas Pendapatan Hibah – LO dengan LRA sebesar Rp28.970.729.956,00 merupakan pendapatan atas hibah berupa Aset Tetap dari entitas di luar Pemkab Kebumen.

5.4.2 Beban – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp2.708.017.239.280,11	Rp2.514.165.363.863,43

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Beban - LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp193.441.934.615,68 atau 7,69% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Pegawai	1.211.050.566.075,00	1.170.781.732.921,00	40.268.833.154,00	3,44
Beban Persediaan	289.167.952.513,41	120.440.703.262,04	168.727.249.251,37	140,09
Beban Jasa	420.877.123.607,08	511.700.525.549,57	(90.823.401.942,49)	(17,75)
Beban Pemeliharaan	45.926.497.238,00	41.801.795.747,00	4.124.701.491,00	9,87
Beban Perjalanan Dinas	39.393.314.139,00	50.636.739.096,00	(11.243.424.957,00)	(22,20)
Beban Subsidi	1.447.997.750,00	675.656.402,00	772.341.348,00	114,31
Beban Hibah	148.245.174.198,00	88.719.045.255,00	59.526.128.943,00	67,10
Beban Bantuan Sosial	9.875.120.500,00	11.040.168.523,00	(1.165.048.023,00)	(10,55)
Beban Penyisihan Piutang	2.027.357.162,70	1.941.495.935,95	85.861.226,75	4,42
Beban Penyusutan dan Amortisasi	299.092.521.634,92	295.412.850.752,87	3.679.670.882,05	1,25
Beban Transfer	240.590.614.462,00	221.014.650.419,00	19.575.964.043,00	8,86
Jumlah	2.708.017.239.280,11	2.514.165.363.863,43	193.528.875.416,68	7,69

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp1.211.050.566.075,00

Rp1.170.781.732.921,00

Beban Pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.268.833.154,00 atau sebesar 3,44% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.29 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	784.721.336.254,00	750.484.534.791,00	34.236.801.463,00	4,56
Beban Tambahan Penghasilan ASN	119.299.010.180,00	107.729.794.251,00	11.569.215.929,00	10,74
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	272.180.074.059,00	261.788.061.175,00	10.392.012.884,00	3,97
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.373.298.862,00	33.256.897.740,00	116.401.122,00	0,35
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	519.084.720,00	539.554.364,00	(20.469.644,00)	(3,79)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	957.762.000,00	1.027.401.000,00	(69.639.000,00)	(6,78)
Beban Pegawai BOS	0,00	15.389.395.600,00	(15.389.395.600,00)	(100,00)
Beban Pegawai BLUD	0,00	566.094.000,00	(566.094.000,00)	(100,00)
Jumlah	1.211.050.566.075,00	1.170.781.732.921,00	40.268.833.154,00	3,44

Perbandingan Beban Pegawai LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.30 Perbandingan Beban Pegawai - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	784.721.336.254,00	784.721.336.254,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	119.299.010.180,00	103.094.506.943,00	16.204.503.237,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	272.180.074.059,00	265.437.207.459,00	6.742.866.600,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.373.298.862,00	33.373.298.862,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	519.084.720,00	519.084.720,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	957.762.000,00	957.762.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	0,00	323.811.000,00	(323.811.000,00)
Jumlah	1.211.050.566.075,00	1.188.427.007.238,00	22.623.558.837,00

Selisih atas Beban Pegawai – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp431.376.963,00 merupakan selisih antara Utang Pegawai - Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.911.811.193,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.343.188.156,00;
2. Selisih Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebesar Rp23.054.935.800,00 merupakan selisih antara Utang Pegawai – Tambahan Penghasilan berdasarkan Obyektif Lainnya ASN per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.992.112.600,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.937.176.800,00;
3. Selisih Beban Pegawai BLUD sebesar Rp323.811.000 merupakan Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 yang direklas ke masing-masing rekening beban.

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp289.167.952.513,41	Rp120.440.703.262,04

Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp168.727.249.251,37 atau 140,09% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31 Rincian Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Barang Pakai Habis	287.966.528.403,41	120.281.505.031,04	167.685.023.372,37	139,41
Beban Barang Tak Habis Pakai	34.736.400,00	159.198.231,00	(124.461.831,00)	(78,18)
Jumlah	289.167.952.513,41	120.440.703.262,04	168.727.249.251,37	140,09

Perbandingan Beban Persediaan LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.32 Perbandingan Beban Persediaan - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	287.966.528.403,41	137.642.068.716,00	150.324.459.687,41
Beban Barang Tak Habis Pakai	34.736.400,00	35.616.400,00	(880.000,00)
Jumlah	289.167.952.513,41	137.995.238.496,00	150.323.579.687,41

Selisih atas Beban Persediaan – LO dengan LRA sebesar Rp150.323.579.687,41 merupakan:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

1. Jurnal Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Persediaan senilai Rp89.727.552.137,99.
2. Jurnal Reklas Beban Barang dan Jasa BOS ke Beban Persediaan senilai Rp61.869.381.054,00.
3. Jurnal Reklas Belanja Persediaan menjadi Aset senilai Rp20.461.000,00.

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp420.877.123.607,08	Rp511.700.525.549,57

Beban Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.823.401.942,49 atau 17,75% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33 Rincian Beban Jasa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Jasa Kantor	318.218.770.398,01	98.008.762.251,00	220.210.008.147,01	224,68
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	44.222.521.760,07	34.407.664.038,89	9.814.857.721,18	28,53
Beban Sewa Tanah	7.680.000,00	3.250.000,00	4.430.000,00	136,31
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.991.642.437,00	4.848.941.300,00	1.142.701.137,00	23,57
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.402.149.710,00	1.903.406.655,00	(501.256.945,00)	(26,33)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	145.200.000,00	116.000.000,00	29.200.000,00	25,17
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.806.270.410,00	1.919.648.600,00	1.886.621.810,00	98,28
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.826.215.500,00	3.657.082.206,00	(830.866.706,00)	(22,72)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	483.592.500,00	299.328.150,00	184.264.350,00	61,56
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	35.045.000,00	0,00	35.045.000,00	100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.823.703.775,00	4.311.266.530,00	2.512.437.245,00	58,28
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.232.212.500,00	4.030.445.000,00	5.201.767.500,00	129,06
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.662.549,00	6.195.000,00	1.994.467.549,00	32194,79
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	84.974.216.209,00	(84.974.216.209,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.681.457.068,00	0,00	25.681.457.068,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	273.214.319.609,68	(273.214.319.609,68)	(100,00)
Jumlah	420.877.123.607,08	511.700.525.549,57	(90.823.401.942,49)	17,75

Perbandingan Beban Jasa LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34 Perbandingan Beban Jasa - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Jasa Kantor	318.218.770.398,01	120.696.991.282,00	197.521.779.116,01
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	44.222.521.760,07	42.731.761.479,00	1.490.760.281,07



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Sewa Tanah	7.680.000,00	7.680.000,00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.991.642.437,00	3.998.271.596,00	1.993.370.841,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.402.149.710,00	1.335.287.710,00	66.862.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	145.200.000,00	138.900.000,00	6.300.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.806.270.410,00	3.281.040.810,00	525.229.600,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.826.215.500,00	2.306.254.300,00	519.961.200,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	483.592.500,00	483.592.500,00	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	35.045.000,00	0,00	35.045.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.823.703.775,00	4.765.159.034,00	2.058.544.741,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.232.212.500,00	9.313.406.000,00	(81.193.500,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.662.549,00	1.676.400.000,00	324.262.549,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	94.610.212.259,00	(94.610.212.259,00)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.681.457.068,00	25.681.457.068,00	-
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	273.687.635.281,00	(273.687.635.281,00)
Jumlah	420.877.123.607,08	584.714.049.319,00	(163.836.925.711,92)

Selisih atas Beban Jasa – LO dengan LRA sebesar Rp163.836.925.711,92 merupakan:

1. Jurnal Reklas Beban Barang dan Jasa BOS ke Beban Jasa senilai Rp30.346.901.051,00.
2. Jurnal Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Jasa senilai Rp 169.909.120.281,01.
3. Jurnal Reklas Belanja Jasa Konsultan menjadi aset tetap Dinas Perkimhub senilai Rp37.007.400,00;

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp45.926.497.238,00	Rp41.801.795.747,00

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.124.701.491,00 atau 9,87% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.35 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	109.300.000,00	(109.300.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.100.483.953,00	4.150.857.032,00	9.949.626.921,00	239,70
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.354.759.855,00	7.834.322.762,00	3.520.437.093,00	44,94
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.387.770.530,00	29.703.915.953,00	(9.316.145.423,00)	(31,36)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	83.482.900,00	3.400.000,00	80.082.900,00	2.355,38
Jumlah	45.926.497.238,00	41.801.795.747,00	4.124.701.491,00	9,87



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.36 Perbandingan Beban Pemeliharaan - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.100.483.953,00	4.673.766.191,00	9.426.717.762,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.354.759.855,00	15.123.372.293,00	(3.768.612.438,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.387.770.530,00	20.201.026.875,00	186.743.655,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	83.482.900,00	11.850.000,00	71.632.900,00
Jumlah	45.926.497.238,00	40.010.015.359,00	5.916.481.879,00

Selisih atas Beban Pemeliharaan – LO dengan LRA sebesar Rp5.916.481.879,00 merupakan :

1. Jurnal Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Pemeliharaan senilai Rp12.820.704.072,00.
2. Jurnal Reklas Beban Barang dan Jasa BOS ke Beban Pemeliharaan senilai Rp 2.322.421.154,00.
3. Jurnal pengakuan Utang Beban Pemeliharaan senilai Rp 80.411.121,00.
4. Jurnal penambahan aset tetap karna barang jasa menjadi aset senilai Rp9.146.232.226,00.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp39.393.314.139,00	Rp50.636.739.096,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.243.434.957,00 atau 22,20% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.37 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.537.652.939,00	50.254.846.296,00	(11.717.193.357,00)	(22,20)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	855.661.200,00	381.892.800,00	473.768.400,00	124,06
Jumlah	39.393.314.139,00	50.636.739.096,00	(11.243.424.957,00)	(22,20)

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.38 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.537.652.939,00	37.238.587.959,00	1.299.064.980,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	855.661.200,00	855.661.200,00	0,00
Jumlah	39.393.314.139,00	38.094.249.159,00	1.299.064.980,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Selisih atas Beban Perjalanan Dinas LO dengan LRA sebesar Rp1.299.064.980,00 merupakan :

1. Jurnal Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Perjalanan Dinas senilai Rp1.301.767.790,00.
2. Jurnal Pengakuan Utang Belanja Perjalanan Dinas RSUD dr. Soedirman senilai Rp2.702.810,00.

5.4.2.6 Beban Subsidi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.447.997.750,00	Rp675.656.402,00

Beban Subsidi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp772.341.348,00 atau 114,31% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.39 Rincian Beban Subsidi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Subsidi kepada BUMD				
PT BPR BKK Kebumen (PESERODA)	350.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	16,67
PT BPR Bank Kebumen (PESERODA)	25.000.000,00	173.263.826,00	(148.263.826,00)	(85,57)
PT BPR BKK Jateng (PESERODA)	25.000.000,00	72.409.584,00	(47.409.584,00)	(65,47)
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (PESERODA)	1.047.997.750,00	129.982.991,00	918.014.759,00	706,26
Jumlah	1.447.997.750,00	675.656.401,00	772.341.349,00	114,31

Realisasi Beban Subsidi - LO Tahun 2024 sama dengan nilai realisasi Belanja Subsidi LRA TA 2024 yaitu sebesar Rp1.447.997.750,00 sehingga tidak terdapat selisih atas Beban Subsidi – LO dengan LRA pada Tahun 2024. Belanja Subsidi direalisasikan sesuai SP2D berikut:

1. SP2D Nomor 33.05/04.0/000013/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp25.000.000,00.
2. SP2D Nomor 33.05/04.0/000017/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp350.000.000,00.
3. SP2D Nomor 33.05/04.0/000014/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp25.000.000,00.
4. SP2D Nomor 33.05/04.0/000039/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/M/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebesar Rp200.000.000,00 namun ada pengembalian senilai Rp2.002.250,00.
5. SP2D Nomor 33.05/04.0/000045/LS/2.17.3.31.3.30.07.0000/PPR1/9/2024 tanggal 03 September 2024 sebesar Rp850.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.2.7 Beban Hibah

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp148.245.174.198,00

Rp88.719.045.255,00

Beban Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.526.128.943,00 atau 67,10% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.40 Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	39.856.210.097,00	22.225.540.000,00	17.630.670.097,00	79,33
Hibah kepada Badan. Lembaga, Organisasi Kemsyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.439.483.449,00	64.428.629.255,00	24.010.854.194,00	37,27
Hibah Dana BOS	15.487.637.152,00	0,00	15.487.637.152,00	100,00
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.134.631.000,00	2.064.876.000,00	69.755.000,00	3,38
Hibah Dana BOSP	2.327.212.500,00	0,00	2.327.212.500,00	100,00
Jumlah	148.245.174.198,00	88.719.045.255,00	59.526.128.943,00	67,10

Rincian Beban Hibah per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.41 Rincian Beban Hibah per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	59.180.609.996,00	5.362.541.270,00	53.818.068.726,00	1003,59
Dinkes PPKB	496.334.720,00	232.840.000,00	263.494.720,00	113,17
DPUPR	3.989.588.407,00	8.757.767.500,00	(4.768.179.093,00)	(54,45)
Disperkimhub	9.192.500.000,00	9.390.000.000,00	(197.500.000,00)	(2,10)
Dinsos P3A	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
Distapang	9.355.590.000,00	19.732.610.040,00	(10.377.020.040,00)	(52,59)
DLHKP	2.172.773.075,00	2.552.088.225,00	(379.315.150,00)	(14,86)
Disperindag KKUKM	1.298.246.500,00	593.987.220,00	704.259.280,00	118,56
Disparbud	1.962.500.000,00	2.440.500.000,00	(478.000.000,00)	(19,59)
Setda	21.576.170.000,00	15.091.295.000,00	6.484.875.000,00	42,97
Bakesbangpol	38.622.418.000,00	24.490.416.000,00	14.132.002.000,00	57,70
BPKPD	398.443.500,00	0,00	398.443.500,00	100,00
Jumlah	148.245.174.198,00	88.719.045.255,00	59.526.128.943,00	67,10

Perbandingan Beban Hibah LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.42 Perbandingan Beban Hibah - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	39.856.210.097,00	36.833.950.580,00	3.022.259.517,00
Hibah kepada Badan. Lembaga, Organisasi Kemsyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.439.483.449,00	88.439.483.449,00	0,00
Hibah Dana BOS	15.487.637.152,00	15.487.637.152,00	0,00
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.134.631.000,00	2.134.631.000,00	0,00
Hibah Dana BOSP	2.327.212.500,00	2.327.212.500,00	0,00
Jumlah	148.245.174.198,00	145.222.914.681,00	3.022.259.517,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Selisih atas Beban Hibah – LO dengan LRA sebesar Rp3.022.259.517,00 merupakan hibah aset tetap berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kantor ke Kementerian Agama Kabupaten Kebume sebesar Rp706.900.610,00, hibah aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp398.443.500,00 dan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.916.915.407,00 ke Polres Kebumen.

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp 9.875.120.500,00	Rp11.040.168.523,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.165.048.023,00 atau 10,55 % dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.43 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.690.490.000,00	8.157.000.000,00	533.490.000,00	6,54
Barang yang Direncanakan kepada Individu	608.112.500,00	865.309.473,00	(257.196.973,00)	(29,72)
Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	376.518.000,00	546.900.150,00	(170.382.150,00)	(31,15)
Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.470.958.900,00	(1.470.958.900,00)	(100,00)
Jumlah	9.875.120.500,00	11.040.168.523,00	(1.165.048.023,00)	10,55

Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.44 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	1.498.690.000,00	1.530.000.000,00	(31.310.000,00)	(2,05)
Dinkes PPKB	0,00	156.336.150,00	(156.336.150,00)	(100,00)
Disperkimhub	705.000.000,00	1.815.000.000,00	(1.110.000.000,00)	(61,16)
Satpol PP	72.000.000,00	40.000.000,00	32.000.000,00	80,00
Dinsos P3A	5.361.430.500,00	3.731.823.473,00	1.629.607.027,00	43,67
Disperindag KKUKM	0,00	1.772.008.900,00	(1.772.008.900,00)	(100,00)
Setda	2.238.000.000,00	1.995.000.000,00	243.000.000,00	12,18
Jumlah	9.875.120.500,00	11.040.168.523,00	(1.165.048.023,00)	(10,55)

Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.45 Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.690.490.000,00	8.690.490.000,00	0,00
Barang yang Direncanakan kepada Individu	608.112.500,00	608.112.500,00	0,00
Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	376.518.000,00	376.518.000,00	0,00
Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Jumlah	9.875.120.500,00	9.875.120.500,00	0,00

Tidak terdapat selisih atas Beban Bantuan Sosial – LO dengan LRA pada Tahun 2024.

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp2.027.357.162,70	Rp1.941.495.935,95

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp85.861.226,75 atau 4,42% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.46 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.074.427.462,13	1.009.124.510,07	65.302.952,06	6,47
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	429.312.170,94	547.148.514,88	(117.836.343,94)	(21,54)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	523.617.529,63	385.222.911,00	138.394.618,63	35,93
Jumlah	2.027.357.162,70	1.941.495.935,95	85.861.226,75	4,42

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp299.092.521.634,92	Rp295.412.850.752,87

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.679.670.882,05 atau 1,25% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.47 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	98.139.929.553,00	96.451.969.232,00	1.687.960.321,00	1,75
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.327.884.473,00	33.086.146.261,00	1.241.738.212,00	3,75
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	166.124.834.106,92	165.191.627.821,87	933.206.285,05	0,56
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	499.873.502,00	683.107.438,00	(183.233.936,00)	(26,82)
Jumlah	299.092.521.634,92	295.412.850.752,87	3.679.670.882,05	1,25

5.4.2.11 Beban Transfer

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp240.590.614.462,00	Rp221.014.650.419,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Beban Transfer Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.575.964.043,00 atau sebesar 8,86% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.48 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Bagi Hasil				
Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.930.080.000,00	11.224.696.000,00	1.705.384.000,00	15,19
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	3.004.239.925,00	2.518.470.881,00	485.769.044,00	19,29
Beban Bantuan Keuangan				
Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	178.887.305.538,00	(178.887.305.538,00)	(100,00)
Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	224.656.294.537,00	28.384.178.000,00	196.272.116.537,00	691,48
Jumlah	240.590.614.462,00	221.014.650.419,00	19.575.964.043,00	8,86

Perbandingan Beban Transfer LO dengan LRA Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.49 Perbandingan Beban Transfer - LO dengan LRA Tahun 2024

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Bagi Hasil			
Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.930.080.000,00	12.930.080.000,00	0,00
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	3.004.239.925,00	3.004.239.925,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan			
Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	224.656.294.537,00	224.656.294.537,00	0,00
Jumlah	240.590.614.462,00	240.590.614.462,00	0,00

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023
0,00	(Rp70.757.195.426,68)

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Defisit dari Operasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.713.471.676,42 atau 56,65% dari Tahun 2023.

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp3.564.719.993,00)	(Rp61.892.277.453,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp58.327.557.460,00 atau 94,24% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50 Rincian Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	727.784.000,00	0,00	727.784.000,00	100,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	4.292.503.993,00	61.892.277.453,00	(57.599.773.460,00)	(93,06)
Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(3.564.719.993,00)	(61.892.277.453,00)	58.327.557.460,00	(94,24)

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp727.784.000,00	Rp0,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp727.784.000,00 atau 100 % dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.51 Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	727.784.000,00	0,00	727.784.000,00	100,00
Jumlah	727.784.000,00	0,00	727.784.000,00	100,00

5.4.4.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp4.292.503.993,00	Rp61.892.277.453,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp57.599.773.460,00 atau 93,06% dari Tahun 2023.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp872.865.594,79	(Rp132.649.472.879,68)

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp133.522.338.474,47 atau 100,66% dari Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.4.6 Pos Luar Biasa

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp323.000.000,00)	(Rp409.940.801,00)

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Pos Luar Biasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp86.940.801,00 atau 21,21% dari Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.52 Rincian Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	323.000.000,00	409.940.801,00	(86.940.801,00)	21,21
Jumlah	323.000.000,00	409.940.801,00	(86.940.801,00)	21,21

5.4.6.1 Beban Luar Biasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp323.000.000,00	Rp409.940.801,00

Beban Luar Biasa merupakan beban atas bantuan untuk korban bencana alam, bantuan korban kebakaran, bantuan Migran Korban Tindak kekerasan, bantuan orang kehabisan bekal/PMKS, Bantuan kepada Korban Kebakaran.

Beban Luar Biasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp86.940.801,00 atau 21,21% dari Tahun 2023.

Realisasi Beban Luar Biasa - LO Tahun 2024 sama dengan nilai realisasi Belanja Tidak Terduga LRA TA 2023 yaitu sebesar Rp323.000.000,00 sehingga tidak terdapat selisih atas Beban Luar Biasa – LO dengan LRA pada Tahun 2023.

5.4.7 Surplus/Defisit - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp549.865.594,79	(Rp133.059.413.680,68)

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Pada Laporan Operasional Tahun 2024, Pemkab Kebumen mengalami surplus sebesar Rp549.865.594,79 dan Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp133.059.413.680,68. Hal ini menunjukkan terjadi penambahan defisit sebesar Rp71.371.005.468,42 atau 100,41%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 Kabupaten Kebumen. Mendasari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, LAK Kabupaten Kebumen merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola BUD dan BLUD baik pendapatan maupun belanjanya, serta Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana BOS. LAK dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Informasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah
2. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas

Saldo Awal Kas atau saldo Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp164.697.924.499,98 mengalami penurunan selama tahun 2024 sebesar Rp94.128.752.680,00 sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.965.691.946,98 dengan rincian sebagai berikut.

.Tabel 5.5.1 LAK TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	287.969.347.570,00	200.684.492.551,00	87.284.855.019,00	43,49
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(266.695.141.393,00)	(294.810.357.659,00)	28.115.216.266,00	(9,54)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(6.438.730,00)	(2.887.572,00)	(3.551.158,00)	122,98
Kenaikan/Penurunan Kas	21.267.767.447,00	(94.128.752.680,00)	115.396.520.127,00	(122,59)
Saldo Awal Kas	164.697.924.499,98	258.826.677.179,98	(94.128.752.680,00)	(36,37)
Saldo Akhir Kas	185.965.691.946,98	164.697.924.499,98	21.267.767.447,00	12,91

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemkab Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	3.135.928.048.534,00	2.898.983.493.842,00	236.944.554.692,00	8,17
Arus Kas Keluar	2.847.979.195.964,00	2.698.299.001.291,00	149.680.194.673,00	5,55
Arus Kas Bersih	287.969.347.570,00	200.684.492.551,00	87.284.855.019,00	43,49



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari :

Tabel 5.5.3 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan Pajak Daerah	139.434.789.479,00	137.222.705.502,00	2.212.083.977,00	1,61
Penerimaan Retribusi Daerah	33.229.154.159,00	28.881.046.419,00	4.348.107.740,00	15,06
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.856.399.056,00	19.123.340.688,00	2.733.058.368,00	14,29
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	288.004.440.144,00	276.385.853.217,00	11.618.586.927,00	4,20
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	33.987.975.000,00	36.123.723.591,00	-2.135.748.591,00	(5,91)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.306.369.023.000,00	1.239.930.914.430,00	66.438.108.570,00	5,36
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	544.030.251.883,00	507.146.964.042,00	36.883.287.841,00	7,27
Penerimaan Dana Insentif Fiskal	20.849.462.000,00	11.805.728.000,00	9.043.734.000,00	76,60
Penerimaan Dana Desa	461.258.494.000,00	455.959.893.200,00	5.298.600.800,00	1,16
Penerimaan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	181.816.080.313,00	174.243.934.191,00	7.572.146.122,00	4,35
Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	86.528.970.500,00	10.639.281.000,00	75.889.689.500,00	713,30
Penerimaan Hibah	18.563.009.000,00	1.520.109.562,00	17.042.899.438,00	1.121,16
Arus Kas Masuk	3.135.928.048.534,00	2.898.983.493.842,00	236.944.554.692,00	8,17

Arus Kas Masuk tersebut termasuk pendapatan yang diterima BLUD dan pendapatan dari Dana BOS yang diterima langsung sekolah, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.4 Rincian Pendapatan BLUD dan Dana BOS TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan BLUD				
RSUD Dr. Soedirman	136.485.507.838,00	23.408.760.440,00	113.076.747.398,00	483,05
RSUD Prembun	65.750.637.946,00	19.504.619.530,00	46.246.018.416,00	237,10
Puskesmas	76.770.107.586,00	6.454.129.611,98	70.315.977.974,02	1.089,47
Pendapatan BOS	143.172.447.421,00	868.116.142,00	165.727.926.779,00	16.392,31
Jumlah	422.178.700.791,00	50.235.625.723,98	395.366.670.567,02	740,40

5.5.1.1 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari :

Tabel 5.5.5 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pembayaran Pegawai	1.188.427.007.238,00	1.153.775.444.865,00	34.651.562.373,00	3,00
Pembayaran Barang dan Jasa	800.813.552.333,00	726.725.182.478,00	74.088.369.855,00	10,19
Pembayaran Subsidi	1.447.997.750,00	675.656.402,00	772.341.348,00	114,31
Pembayaran Hibah	145.222.914.681,00	128.698.064.603,00	16.524.850.078,00	12,84
Pembayaran Bantuan Sosial	9.875.120.500,00	11.040.168.523,00	(1.165.048.023,00)	(10,55)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pembayaran Tak Terduga	323.000.000,00	409.940.801,00	(86.940.801,00)	(21,21)
Pembayaran Transfer Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	12.930.080.000,00	11.224.696.000,00	1.705.384.000,00	15,19
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.004.239.925,00	2.518.470.881,00	485.769.044,00	19,29
Pembayaran Transfer Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	685.914.788.537,00	663.231.376.738,00	22.683.411.799,00	3,42
Arus Kas Keluar	2.847.958.700.964,00	2.698.299.001.291,00	149.659.699.673,00	5,55

Arus Kas Keluar tersebut termasuk belanja operasi pada BLUD dan belanja yang bersumber dari Dana BOS, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.6 Rincian Belanja BLUD dan Dana BOS TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Belanja BLUD				
Belanja Pegawai BLUD	323.811.000	579.594.000,00	(255.783.000,00)	(44,13)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	273.687.635.281	265.543.950.851,00	8.143.684.430,00	3,07
Belanja BOS				
Belanja Pegawai BOS	0,00	15.389.395.600,00	(15.389.395.600,00)	(100,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	94.610.212.259	85.241.751.109	9.368.461.150,00	10,99
Jumlah	368.621.658.540	366.754.272.312,00	1.867.386.228,00	0,51

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	14.540.691.100,00	24.263.555.879,00	(9.722.864.779,00)	(40,07)
Arus Kas Keluar	281.235.832.493,00	319.073.913.538,00	(37.838.081.045,00)	(11,86)
Arus Kas Bersih	(266.695.141.393,00)	(294.810.357.659,00)	28.115.216.266,00	(9,54)

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp28.115.216.266,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 dari Aktivitas Investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp266.695.141.393,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan hasil pencairan Dana Cadangan dan penjualan BMD yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris berupa Peralatan Mesin, Bangunan Gedung dan Aset Tetap Lainnya. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terdiri dari :

Tabel 5.5.8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pencairan Dana Cadangan	12.774.460.000,00	22.225.540.000,00	(9.451.080.000,00)	(42,52)
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.514.142.100,00	1.769.454.879,00	(255.312.779,00)	(14,43)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	179.439.000,00	204.361.000,00	(24.922.000,00)	(12,20)
Penjualan Aset Tetap Lainnya	72.650.000,00	64.200.000,00	8.450.000,00	13,16
Arus Kas Masuk	14.540.691.100,00	24.263.555.879,00	(9.722.864.779,00)	(40,07)

5.5.2.1 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terdiri dari Belanja Modal termasuk didalamnya Belanja Modal pada BLUD dan Belanja Modal yang bersumber Dana BOS, Penyertaan Modal Daerah serta pembentukan Dana Cadangan. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi terdiri dari.

Tabel 5.5.9 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	20.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(100,00)
Perolehan Tanah	5.547.762.848,00	1.400.551.240,00	4.147.211.608,00	296,11
Perolehan Peralatan dan Mesin	117.947.198.909,00	65.799.396.633,00	52.147.802.276,00	79,25
Perolehan Gedung dan Bangunan	40.299.475.917,00	75.265.208.901,00	(34.965.732.984,00)	(46,46)
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	102.857.035.252,00	124.921.560.732,00	(22.064.525.480,00)	(17,66)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.044.972.327,00	11.456.196.032,00	588.776.295,00	5,14
Perolehan Aset Lainnya	39.387.240,00	0,00	39.387.240,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	20.231.000.000,00	(17.731.000.000,00)	(87,64)
Arus Kas Keluar	281.235.832.493,00	319.073.913.538,00	(37.838.081.045,00)	(11,86)

Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana Badan Layanan Umum Daerah dirinci sebagai berikut:

Arus Kas Keluar tersebut termasuk Belanja Modal yang bersumber dari dana BLUD dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.10 Rincian Belanja Modal BLUD dan Dana BOS TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Belanja Modal BLUD				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.460.766.530,00	15.720.122.340,00	(6.259.355.810,00)	-39,82



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.095.803.744,00	413.512.000,00	5.682.291.744,00	1.374,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.000.759.640,00	78.468.000,00	922.291.640,00	1.175,37
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Belanja Modal BOS				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.925.149.156,00	18.428.636.028,00	3.496.513.128,00	18,97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.956.674.327,00	10.873.160.652,00	1.083.513.675,00	9,97
Jumlah	50.439.753.397,00	45.513.899.020,00	4.925.854.377,00	10,82

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.11 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	1.805.000.000,00	2.100.000.000,00	(295.000.000,00)	(14,05)
Arus Kas Keluar	1.805.000.000,00	2.100.000.000,00	(295.000.000,00)	(14,05)
Arus Kas Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.3.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola oleh Distapang dan DLHKP. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari :

Tabel 5.5.12 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.805.000.000,00	2.100.000.000,00	(295.000.000,00)	(14,05)
Arus Kas Masuk	1.805.000.000,00	2.100.000.000,00	(295.000.000,00)	(14,05)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.5.3.1 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan merupakan Pemberian Pinjaman Daerah berupa Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Gapoktan dan Rukun Nelayan. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari :

Tabel 5.5.13 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pemberian Pinjaman Daerah	1.805.000.000,00	2.100.000.000,00	(295.000.000,00)	(14,05)
Arus Kas Masuk	1.805.000.000,00	2.100.000.000,00	(295.000.000,00)	(14,05)

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.14 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	0,00	168.451.375.647,01	(168.451.375.647,01)	(100,00)
Arus Kas Keluar	6.438.730,00	168.454.263.219,01	(168.447.824.489,01)	(100,00)
Arus Kas Bersih	(6.438.730,00)	(2.887.572,00)	(3.551.158,00)	122,98

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada BUD dan Bendahara Dana BOS. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terdiri dari :

Tabel 5.5.15 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan PFK				
BUD	0,00	167.495.251.661,01	(167.495.251.661,01)	(100,00)
Bendahara Dana BOS	0,00	956.123.986,00	(956.123.986,00)	(100,00)
Arus Kas Masuk	0,00	168.451.375.647,01	(168.451.375.647,01)	(100,00)

5.5.4.1 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris merupakan pengeluaran PFK pada BUD dan Bendahara BOS. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terdiri dari :

Tabel 5.5.16 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan PFK				
BUD	0,00	167.495.251.661,01	(167.495.251.661,01)	(100,00)
Bendahara Dana BOS	6.438.730,00	959.011.558,00	(952.572.828,00)	(99,33)
Arus Kas Masuk	6.438.730,00	168.454.263.219,01	(168.447.824.489,01)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Terdapat kenaikan kas selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp21.267.767.447,00 yang merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yang dikelola oleh BUD, Bendahara SKPD, BLUD dan BOS.

5.5.5.1 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas TA 2024 adalah Saldo Akhir Kas TA 2023 sebesar Rp164.697.924.499,98 yang merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp94.128.752.680,00 dan Saldo Awal Kas sebesar Rp258.826.677.179,98 dengan rician sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah	Rp113.015.912.113,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp212.936.280,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
Kas di BLUD	Rp49.367.509.581,98
Kas Dana BOSP	Rp893.163.639,00
Kas Dana BOK Puskesmas	Rp1.208.402.886,00
Saldo Awal Kas 2024	Rp164.697.924.499,98

Terdapat selisih sebesar Rp6.438.730,00 antara Saldo Akhir Kas TA 2023 dengan SiLPA per 31 Desember 2023 yang merupakan Utang PFK pada Bendahara BOS per 31 Desember 2023.

5.5.5.2 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2024 sebesar Rp185.965.691.946,98 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp21.267.767.447,00 dan Saldo Awal Kas sebesar Rp164.697.924.499,98.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp185.965.691.946,98 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	150.457.185.590,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.264.100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	200,00
Kas di BLUD	32.804.386.756,98
Kas Dana BOSP	605.545.364,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.093.309.936,00
Saldo Akhir Kas 2024	185.965.691.946,98



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas dan aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Tabel 5.6.1 Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	4.458.091.640.119,65	4.592.239.658.445,71
SURPLUS/DEFISIT-LO	549.865.594,79	(133.059.413.680,68)
DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR:	293.539.595.630,10	(1.088.604.645,38)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Koreksi Piutang	(1.025.484,44)	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	742.368.116,67	0,00
Koreksi Aset Tetap	301.534.741.128,87	10.013.457.286,62
Koreksi Aset Lainnya	(8.736.488.131,00)	(11.102.061.932,00)
EKUITAS AKHIR	4.752.181.101.344,54	4.458.091.640.119,65

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp4.458.091.640.119,65 merupakan Saldo Ekuitas Tahun 2024 pada Neraca. Ekuitas Awal Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp134.148.018.326,06) atau 2,92%.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2024 terdapat Defisit-LO sebesar Rp549.865.594,79. Defisit -LO Tahun 2024 bertambah sebesar Rp133.609.279.275,47 atau 100,41% dari Defisit -LO Tahun 2023 yang hanya sebesar (Rp133.059.413.680,68).

5.6.3 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar Tahun 2024 sebesar Rp293.539.595.630,10 mengalami kenaikan sebesar Rp294.628.200.275,48 atau 27.064,76% dari Tahun 2023. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang mempengaruhi saldo akun Ekuitas Akhir adalah Lain-lain.

5.6.3.1 Lain-lain

Dampak Kumulatif Kesalahan – Lain-lain Rp293.539.595.630,10 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dampak Kumulatif Kesalahan – Lain-lain Tahun 2024 terdiri dari Koreksi Piutang sebesar (Rp1.025.484,44), Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp742.368.116,67,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp301.534.741.128,87 dan Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp8.736.488.131,00) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.6.2 Rincian Dampak Kumulatif Kesalahan – Lain-lain Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Piutang	(1.025.484,44)
	Penyesuaian atas Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(1.025.484,44)
B	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	742.368.116,67
	Penyesuaian atas Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	742.368.116,67
C	Koreksi Aset Tetap	301.534.741.128,87
	Tanah	
	Penyesuaian atas penambahan aset tetap karena hasil inventarisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanah jalan kabupaten merupakan penambahan ruas jalan baru sebagaimana SK Nomor 600.1.1/544 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Penambahan tanah jalan tersebut berasal dari tanah jalan non status, tanah jalan nasional dan tanah jalan desa	109.574.713.800,00
	Peralatan dan Mesin	
	Penyesuaian atas aset tetap peralatan mesin karena koreksi tidak memenuhi kriteria Aset Tetap pada:	
	1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(230.000,00)
	2 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(474.510.999,00)
	3 Dinas Komunikasi dan Informatika	(101.795.000,00)
	4 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	(26.422.500,00)
	5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.024.500,00)
	6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(470.250.800,00)
	7 Dinas Pertanian dan Pangan	(16.254.000,00)
	8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	(20.000.000,00)
	9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(13.742.000,00)
	10 Kecamatan Adimulyo	(2.080.000,00)
	11 Kecamatan Alian	(1.489.500,00)
	12 Kecamatan Ambal	(1.123.000,00)
	13 Kecamatan Gombong	(2.632.000,00)
	14 Kecamatan Karanganyar	(3.847.000,00)
	15 Kecamatan Kebumen	(3.033.000,00)
	16 Kecamatan Kutowinangun	(99.500,00)
	17 Kecamatan Mirit	(4.452.000,00)
	18 Satuan Polisi Pamong Praja	(5.354.000,00)
	19 Sekretariat Daerah	(3.600.000,00)
	22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(65.500,00)
	23 Kecamatan Buluspesantren	(57.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan koreksi karena bukan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen	(29.847.500,00)
	Penyesuaian atas penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset tetap dari Belanja Alat/Bahan kegiatan kantor pada Kecamatan Gombong	1.878.500,00
	Penyesuaian atas penambahan aset tetap karena hasil inventarisasi berupa dua buah laptop pada Kecamatan Klirong	16.286.000,00
	Gedung dan Bangunan	
	Penyesuaian atas pengurangan aset tetap karena koreksi koreksi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi pada BB Srimadono dan BPP Prembun tidak menjadi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Pangan	(10.194.000,00)
	Penyesuaian atas pengurangan aset tetap karena koreksi pencatatan ganda atribusi berupa jasa konsultan perencanaan pencatatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(29.415.000,00)
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	Penyesuaian aset tetap Jalan Jaringan Irigasi karena hasil inventarisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penambahan ruas jalan sebagaimana SK Bupati Kebumen Nomor : 600.1.1/544 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Jalan Kabupaten. Nilai konstruksi jalan tersebut berdasarkan nilai NJOP tahun 2023	186.838.783.774,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang reklas ke Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud (Kajian) berupa konsultan penyusunan <i>e-paksi</i>	(117.337.000,00)
	Aset Tetap Lainnya	
	Penyesuaian atas pengurangan aset tetap karena koreksi berupa buku tidak memenuhi kriteria aset tetap pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(911.833.103,00)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	Akumulasi Penyusutan	
	Penyesuaian atas koreksi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin antara lain:	
1	Koreksi tambah atas perhitungan ulang	(827,00)
2	Koreksi atas mutasi Masuk	(6.229.404.984,00)
3	Koreksi tambah atas hasil inventarisasi	(16.286.000,00)
4	Koreksi tambah nilai	(673.196,00)
5	Koreksi tambah atas perubahan masa manfaat	(11.395.291,00)
6	Koreksi tambah atas tahun perolehan	(1.641.521,00)
7	Koreksi tambah atas perubahan kode	(5.502.666,00)
8	Koreksi kurang atas perhitungan ulang	1.300,00
9	Koreksi atas mutasi keluar	5.811.404.480,00
10	Koreksi kurang nilai	2.260.000,00
11	Koreksi kurang atas perubahan masa manfaat	480.948.622,00
12	Koreksi kurang atas tahun perolehan	56.143,00
13	Koreksi kurang atas perubahan kode	5.680.000,00
	Penyesuaian atas koreksi akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan antara lain:	
1	Koreksi tambah atas Perhitungan Ulang	(206,00)
2	Koreksi atas mutasi masuk	(4.923.870.673,00)
3	Koreksi tambah atas hibah masuk	(6.400.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian		Nilai (Rp)
	4	Koreksi kurang atas perhitungan ulang	188,00
	5	Koreksi atas Mutasi keluar	4.834.196.639,00
	6	Koreksi kurang atas kapitalisasi	3.787.640,00
	7	Koreksi kurang nilai	49.025,00
	Penyesuaian atas koreksi akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan. dan irigasi antara lain:		
	1	Koreksi tambah atas Perhitungan ulang	(393,13)
	2	Koreksi atas mutasi masuk	(1.076.164.276,00)
	3	Koreksi tambah nilai	(121.607.422.577,00)
	4	Koreski tambah atas perubahan kode	(537.949.197,00)
	5	Koreksi kurang atas perhitungan ulang	150,00
	6	Koreksi kurang atas mutasi keluar	160.155.586,00
	7	Koreksi kurang nilai	129.933.991.294,00
	8	Koreksi kurang atas perubahan kode	537.949.197,00
D	Koreksi Aset Lainnya		(8.736.488.131,00)
	Aset Tidak Berwujud		
	Penyesuaian atas penambahan aset lainnya software hasil inventarisasi berupa <i>software</i> aplikasi jurnal pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		54.000.000,00
	Penyesuaian atas penambahan aset tetap karena reklas ke DED berupa konsultan penyusunan <i>e-paksi</i> pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		117.337.000,00
	Aset Lain-lain		
	Penyesuaian atas penghapusan aset tetap - SK hapus kendaraan dinas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		(603.947.500,00)
	Penyesuaian atas penambahan aset lainnya rusak berat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		41.418.500,00
	Penyesuaian atas koreksi pencatatan DED pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah		(61.473.000,00)
	Penyesuaian atas akumulasi penyusutan Rusak Berat atas sk hapus tahun 2022 dan mutasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		(22.428.400,00)
	Penyesuaian atas pengurangan aset lainnya rusak berat berupa sepeda motor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		(10.000.000,00)
	Penyesuaian atas pengurangan aset lainnya rusak berat berupa sepeda motor pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mutasi ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		(9.097.500,00)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
	Penyesuaian atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		(8.280.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
	Penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang pada:		
	1	Dinas Pertanian dan Pangan	(100.798.747,00)
	2	RSUD dr. Soedirman	(5.148.049.900,00)
	3	Kecamatan Poncowarno	(8.925.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian		Nilai (Rp)
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		(66.000.000,00)
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		(15.500.000,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		(12.247.000,00)
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		(221.446.800,00)
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		107.388.500,00
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		158.280.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika		37.076.500,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		653.431.447,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		108.500.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan		26.576.654,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja		50.000.000,00
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		91.328.906,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9.650.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		212.256.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		112.733.800,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)			
Penyesuaian aset lainnya Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			(4.228.271.591,00)
Jumlah			293.539.595.630,10

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir merupakan saldo Ekuitas Awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan ditambah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Neraca. Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp4.752.181.101.344,54 mengalami kenaikan sebesar Rp294.089.461.224,89 atau 6,60% dari tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Perangkat Daerah

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Perangkat Daerah dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A; dan
4. Dinas dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- d. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - f. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - j. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - o. Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 - q. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Badan dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - d. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

6. Kecamatan terdiri dari 26 Kecamatan tipe A.

Nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD TA 2024 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel 6.1 Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD TA 2024

No	Kode SKPD	Nama SKPD
1	1.01.2.19.0.00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	1.02.2.14.0.00.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	1.03.2.10.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	1.04.2.15.0.00.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
5	1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja
6	1.05.0.00.0.00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	1.06.2.08.0.00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8	2.09.3.27.0.00.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
9	2.11.3.28.3.25.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan
10	2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12	2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika
13	2.17.3.31.3.30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
14	2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	2.22.3.26.0.00.01	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
16	2.23.2.24.0.00.01	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
17	3.29.3.32.2.07.01	Dinas Tenaga Kerja
18	4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah
19	4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat Dprd
20	5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
21	5.02.0.00.0.00.01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
22	5.03.5.04.0.00.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat Daerah
24	7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Ayah
25	7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Buayan
26	7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Puring
27	7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Petanahan
28	7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Klirong
29	7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Buluspesantren
30	7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Ambal
31	7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Mirit
32	7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Bonorowo
33	7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Prembun
34	7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Padureso
35	7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Kutowinangun
36	7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Alian
37	7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Poncowarno
38	7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Kebumen
39	7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Pejagoan
40	7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Sruweng
41	7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Adimulyo
42	7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Kuwarasan
43	7.01.0.00.0.00.20	Kecamatan Rowokele
44	7.01.0.00.0.00.21	Kecamatan Sempor
45	7.01.0.00.0.00.22	Kecamatan Gombang
46	7.01.0.00.0.00.23	Kecamatan Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Kode SKPD	Nama SKPD
47	7.01.0.00.0.00.24	Kecamatan Karanggayam
48	7.01.0.00.0.00.25	Kecamatan Sadang
49	7.01.0.00.0.00.26	Kecamatan Karangsambung
50	8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pada TA 2024 terdapat 37 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yaitu 35 Puskesmas dan dua Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Entitas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

No	BLUD
1	UPTD RSUD Dr. Soedirman
2	UPTD RSUD Prembun
3	UPTD Puskesmas Adimulyo
4	UPTD Puskesmas Alian
5	UPTD Puskesmas Ambal I
6	UPTD Puskesmas Ambal II
7	UPTD Puskesmas Ayah I
8	UPTD Puskesmas Ayah II
9	UPTD Puskesmas Bonorowo
10	UPTD Puskesmas Buayan
11	UPTD Puskesmas Buluspesantren I
12	UPTD Puskesmas Buluspesantren II
13	UPTD Puskesmas Gombang I
14	UPTD Puskesmas Gombang II
15	UPTD Puskesmas Karanganyar
16	UPTD Puskesmas Karanggayam I
17	UPTD Puskesmas Karanggayam II
18	UPTD Puskesmas Karangsambung
19	UPTD Puskesmas Kebumen I
20	UPTD Puskesmas Kebumen II
21	UPTD Puskesmas Kebumen III
22	UPTD Puskesmas Klirong I
23	UPTD Puskesmas Klirong II
24	UPTD Puskesmas Kutowinangun
25	UPTD Puskesmas Kuwarasan
26	UPTD Puskesmas Mirit
27	UPTD Puskesmas Padureso
28	UPTD Puskesmas Pejagoan
29	UPTD Puskesmas Petanahan
30	UPTD Puskesmas Poncowarno
31	UPTD Puskesmas Prembun
32	UPTD Puskesmas Puring
33	UPTD Puskesmas Rowokele
34	UPTD Puskesmas Sadang
35	UPTD Puskesmas Sempor I
36	UPTD Puskesmas Sempor II
37	UPTD Puskesmas Sruweng



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

BAB VII
PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024
